

**KAJIAN  
EKONOMI REGIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Triwulan IV - 2005**

**Kantor Bank Indonesia  
Mataram**

---

Penerbit :

**BANK INDONESIA MATARAM**

Bidang Ekonomi, Moneter dan Perbankan  
Seksi Statistik, Kajian Ekonomi dan Moneter  
Jl. Pejanggik No.2

Mataram – Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600 ext. 111

Fax : 0370-631793

E-mail : [b\\_widihartanto@bi.go.id](mailto:b_widihartanto@bi.go.id)  
[thommy@bi.go.id](mailto:thommy@bi.go.id)

# MISI DAN VISI BANK INDONESIA

---

## **Visi Bank Indonesia :**

“Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

## **Misi Bank Indonesia :**

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan”

## **Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia :**

“Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan”

## **Visi Kantor Bank Indonesia Mataram :**

“Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai economic intelligence dan unit penelitian”

## **Misi Kantor Bank Indonesia Mataram :**

“Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait”

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Kajian Ekonomi Regional (KER) Propinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV tahun 2005 telah selesai disusun. Laporan ini menyajikan perkembangan beberapa aspek penting dalam perekonomian NTB yang meliputi perkembangan makro ekonomi regional, perkembangan inflasi, perkembangan perbankan dan sistem pembayaran, perkembangan ekonomi daerah, dan prospek perekonomian.

Laporan KER ini disusun Bank Indonesia Mataram secara triwulanan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia dan diharapkan juga dapat memenuhi kebutuhan pihak eksternal, seperti dinas/ instansi, perbankan, akademisi, dan masyarakat umum.

Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada instansi/dinas, dan pihak lainnya yang telah membantu penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini. Harapan kami hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Di sisi lain, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian guna lebih meningkatkan kualitas kajian ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua dalam berkarya untuk bangsa dan negara.

Mataram, Maret 2006

**BANK INDONESIA MATARAM**

I Made Sudja

Pemimpin

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GRAFIK		iv
DAFTAR LAMPIRAN		v
RINGKASAN EKSEKUTIF		vi
BAB I	Perkembangan Ekonomi Makro Regional	1
	1. Ringkasan Umum Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB	1
	2. PDRB menurut Penggunaan/sisi pengeluaran	3
	3. PDRB menurut sisi sektoral (pengeluaran)	10
	4. Tenaga Kerja ke Luar Negeri	17
BAB II	Evaluasi Perkembangan Inflasi Propinsi Nusa Tenggara Barat	19
BAB III	Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran	25
	3.1 Kinerja Perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat	25
	3.2 Bank Umum	28
	3.3 Bank Umum Syariah	40
	3.4 Perkembangan BPR	41
	3.5 Perkembangan Sistem Pembayaran	48
	3.6 Rekomendasi	52
BAB IV	Perkembangan Keuangan Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat	54
BAB V	Prospek Perekonomian dan Inflasi Regional	57
BOKS	Survei Opini Pimpinan/Pejabat Bank Umum Triwulan IV 2005 Terhadap Pemberian Kredit	34-a

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan (Sisi Pengeluaran)	3
Tabel 1.2. Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Propinsi NTB	9
Tabel 1.3. Komoditi Impor Propinsi NTB	10
Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan'93)	11
Tabel 1.5. Nilai Balance Score Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha	12
Tabel 2.1. Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan IV-2005	22
Tabel 2.2. Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar di Kota Mataram TriwulanIV-2005	23
Tabel 3.1. Perkembangan aliran uang di KBI Mataram	49
Tabel 3.2. Perkembangan PTTB	50
Tabel 3.3. Uang palsu yang ditemukan di Kantor Bank Indonesia Mataram	51
Tabel 3.4. Transaksi RTGS di Kantor Bank Indonesia Mataram	51
Tabel 3.5. Data perputaran Kliring di KBI Mataram	52
Tabel 4.1. Anggaran & Realisasi APBD Kabupaten Sumbawa	54
Tabel 4.2. Pertumbuhan, pencapaian & alokasi APBD Kabupaten Sumbawa	55

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan & Tahunan	1
Grafik 1.2. Pertumbuhan Sisi Konsumsi PDRB NTB triwulanan (y-o-y)	4
Grafik 1.3. Indeks Hasil Survei Konsumen Kota Mataram	5
Grafik 1.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6
Grafik 1.5. Pertumbuhan ekspor impor NTB	8
Grafik 2.1. Inflasi Kota Mataram	19
Grafik 2.2. Inflasi (q-t-q) Kota Mataram Per Komoditi	23
Grafik 2.3. Inflasi (q-t-q) Kota Mataram Per Komoditi (%)	24
Grafik 3.1. Perkembangan Data Perbankan NTB (Milyar Rp)	25
Grafik 3.2. Perkembangan UMKM, LDR & NPL (%)	27
Grafik 3.3. Perkembangan Profitabilitas & Efisiensi Perbankan NTB (%)	28
Grafik 3.4. Perkembangan DPK Bank Umum (Milyar Rp.)	30
Grafik 3.5. Perkembangan Kredit Bank Umum	32
Grafik 3.6. Perkembangan UMKM Bank Umum (Milyar Rp.)	38
Grafik 3.7. Perkembangan LDR & Profitabilitas Bank Umum (%)	39
Grafik 3.8. Perkembangan Bank Umum Syariah di NTB	41
Grafik 3.9. Perkembangan Data BPR	42
Grafik 3.10. Perkembangan Profitabilitas & Solvabilitas BPR	43

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1.1. Indikator Ekonomi dan Moneter Propinsi NTB	59
Lampiran 3.1. Perkembangan Asset, DPK & Kredit Perbankan di NTB (Jutaan Rp.)	61
Lampiran 3.2. Perkembangan Rasio-rasio Perbankan di NTB (%)	61
Lampiran 3.3. Perkembangan DPK Perbankan di NTB (Jutaan Rp.)	62
Lampiran 3.4. Perkembangan kredit bank umum berdasarkan lokasi kantor bank	62
Lampiran 3.5. Perkembangan kredit bank umum berdasarkan kolektibilitas	63
Lampiran 3.6. Perkembangan kredit bank umum berdasarkan jenis penggunaan	63
Lampiran 3.7. Perkembangan kredit BU berdasarkan sektor & sub sektor ekonomi	64
Lampiran 3.8. Kredit UMKM	66
Lampiran 3.9. Perkembangan asset BPR	66
Lampiran 3.10. Perkembangan DPK BPR	67
Lampiran 3.11. Perkembangan Kredit BPR	68



# Ringkasan Eksekutif

## 1. Perkembangan Ekonomi Nusa Tenggara Barat

Pada triwulan IV-2005, perekonomian Propinsi Nusa Tenggara Barat secara tahunan Atas Dasar Harga (ADH) konstan (y-o-y) mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,33% (termasuk pertambahan non migas). Angka pertumbuhan ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,71%. Seluruh sektor pada triwulan ini mengalami pertumbuhan dengan angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,15%, kecuali sub sektor kehutanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,27%. Sektor yang memberikan kontribusi tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 1,35% terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB pada triwulan IV-2005 didorong oleh pertumbuhan di semua sektor. Setelah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor bangunan (5,13%), sektor pertambangan dan penggalian (4,95%) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (4,51%). Sektor lainnya meskipun mengalami pertumbuhan di bawah keempat sektor tersebut, namun masih mampu tumbuh dengan prosentase pertumbuhan di atas 3%, yaitu sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami pertumbuhan pada kisaran angka 3,07% - 3,84%. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor industri pengolahan.

## 2. Keuangan Daerah

Data keuangan daerah yang diulas hanya Kabupaten Sumbawa sedangkan daerah kabupaten/kota lainnya termasuk cakupan untuk propinsi datanya belum tersedia.

APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2005 dibandingkan tahun 2004, mengalami penurunan sebesar 19,09% yang bersumber dari penurunan dana perimbangan yaitu sub "bagi hasil pajak dan bukan pajak" yang mencapai sebesar 67,79%, disusul "pendapatan lain-lain yang dianggap sah" sebesar 37,89% dan sub "retribusi daerah" PAD sebesar 30,58%. Penurunan anggaran penerimaan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan royalti dari PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT), karena terjadinya pemekaran Kabupaten Sumbawa menjadi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Disisi lain keberadaan PT.NNT terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga kabupaten baru tersebut memperoleh bagian yang lebih besar daripada Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut berimbas pula pada penurunan anggaran belanjanya yang secara total mencapai angka sebesar 13,60% dan berdampak terhadap penurunan pengeluaran belanja publik pada sub belanja operasi dan pemeliharaan sebesar 39,29%. Secara umum ketergantungan daerah ini pada dana perimbangan yang berasal dari

pemerintah pusat masih terasa cukup tinggi dengan porsi sebesar 88,97% dan 89,68% masing-masing pada tahun 2004 dan 2005 dari total anggaran pendapatan. Begitu pula halnya dengan perbandingan antara realisasi APBD 2005 terhadap 2004, dimana jumlah pendapatan menurun sebesar 23,96% dan belanja sebesar 19,19%.

### 3. Inflasi

Inflasi kota Mataram pada triwulan ini mengalami lonjakan yang sangat tajam. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q), inflasi pada triwulan IV-2005 mencapai angka 11,44%, jauh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya hanya sebesar 1,40%. Sementara itu, inflasi kumulatif dari Januari s.d Desember 2005 (y-t-d) mencapai 17,73%, meningkat sangat tinggi dari tahun 2004 yang hanya sebesar 6,61%. Trend inflasi selama triwulan IV-2005 ini menunjukkan angka tertinggi selama 2 tahun terakhir. Namun demikian secara bulanan (m-t-m), di Kota Mataram terjadi deflasi sebesar -0,40%, lebih besar dibandingkan deflasi yang terjadi pada akhir triwulan III-2005.

Pada triwulan ini, penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 6,01% sekaligus merupakan kelompok yang mengalami inflasi tertinggi. Selanjutnya adalah kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar dan kelompok bahan makanan.

Tingginya inflasi yang terjadi pada triwulan ini selain disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap, terutama pasca kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, juga dipengaruhi oleh faktor seasonal seiring dengan berbagai peristiwa keagamaan seperti tibanya bulan puasa, perayaan Idul Fitri, Natal dan tahun baru. Sumbangan inflasi tertinggi bersumber dari kelompok transportasi adalah akibat dari tingginya kenaikan harga bensin dan minyak tanah yang dijual lebih tinggi dari pada yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pada gilirannya berdampak pada kenaikan tarif angkutan yang sangat tinggi, baik angkutan dalam kota maupun antar daerah/propinsi. Sementara itu, sumbangan inflasi pada kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar, terutama berasal dari ongkos tukang bukan mandor, semen dan kontrak rumah. Kenaikan harga BBM juga berpengaruh kepada meningkatnya biaya produksi. Sedangkan pada kelompok bahan makanan, sumbangan inflasi yang cukup tinggi lebih dipengaruhi oleh ketersediaan hasil panen dan produksi. Disamping itu banyak barang-barang kebutuhan masyarakat NTB, terutama barang konsumsi yang diimpor dari luar daerah, sangat dipengaruhi oleh biaya transportasi barang seperti biaya angkutan darat khususnya bis dan truk, penyeberangan kapal fery dan juga transportasi udara sangat dirasakan di NTB sebagai akibat letak geografis yang dipisahkan oleh pulau-pulau.

### 4. Perkembangan Perbankan di Nusa Tenggara Barat

Perkembangan perbankan baik secara triwulanan maupun secara tahunan (y-o-y) relatif cukup baik, terlihat dari adanya peningkatan asset, dana pihak ketiga dan kredit baik secara

triwulanan dan tahunan. Meskipun dari sisi keuntungan (rasio ROA) sedikit mengalami penurunan sebagai dampak kenaikan biaya-biaya akibat kenaikan BBM yang tercermin dari meningkatnya rasio BOPO dan CER dalam kisaran kecil. Begitu pula dengan rasio NPL yang cenderung mulai kembali meningkat, sebagai akibat kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan biaya produksi dan penurunan daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi pembayaran angsuran debitur kepada perbankan di wilayah ini.

Dari sisi kelembagaan, pada posisi triwulan laporan, jumlah kantor bank umum pelapor bertambah sebanyak 1 kantor yaitu pembukaan kantor cabang PT.BRI Syariah dan peningkatan status dari kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang sebanyak 1 kantor yaitu PT.Bank NTB Cabang Taliwang, penambahan 4 kantor kas PT.Bank BTN dan 1 kantor unit PT.BRI Mataram.

Peningkatan penghimpunan dana masyarakat atau lazim disebut dana pihak ketiga (DPK) merupakan pengaruh dari meningkatnya suku bunga dan adanya deposit/nasabah baru, tercermin dari meningkatnya jumlah nominal kepemilikan DPK dari perseorangan yang ditempatkan pada bank umum. Peningkatan DPK terutama bersumber dari deposito perseorangan. Selain itu karena adanya aliran dana masuk dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui bank umum, meskipun disisi lain dana pihak ketiga milik pemerintah daerah mengalami penurunan karena adanya pembayaran atas realisasi proyek-proyek pemda dan diperkirakan masih terus berlanjut pada awal triwulan berikutnya.

Komposisi dana pihak ketiga berdasarkan jenis simpanannya, pada posisi triwulan laporan relatif tidak berbeda dengan triwulan sebelumnya.

Sementara itu, melambatnya pertumbuhan *outstanding* kredit perbankan di penghujung tahun 2005 diperkirakan karena sektor riil masih perlu waktu untuk melakukan penyesuaian aktivitas bisnisnya sebagai dampak kenaikan BBM yang mengimbas pada naiknya suku bunga simpanan meskipun belum mempengaruhi suku bunga pinjaman. Namun secara tahunan (y-o-y) *outstanding* kredit perbankan tumbuh sebesar 27,04% melampaui angka pertumbuhan kredit nasional sebesar 22%.

Pangsa kredit perbankan berdasarkan jenis penggunaannya, relatif tidak berbeda dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya, dimana masih didominasi oleh kredit konsumsi yang menguasai pangsa mencapai 51,99%, disusul modal kerja sebesar 36,86% dan sisanya sebesar 11,15% ditempati kredit investasi. Pangsa kredit modal kerja dan investasi dalam 1 (satu) tahun terakhir terus meningkat yaitu masing-masing sebesar 2,66% dan 1,60%, sedangkan kredit konsumsi meskipun menguasai pasar/*leading sector* namun pangasanya cenderung mulai menurun sekitar 4% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya, hal ini

diperkirakan mulai ketatnya persaingan pada sektor ini. Disisi lain, peningkatan kredit modal kerja terutama terjadi pada sektor perdagangan.

Komposisi terbesar kredit terserap pada sektor lain-lain yang mencapai porsi sebesar 52,50%, disusul sektor perdagangan sebesar 33,74% dan sektor pertanian dengan pangsa hanya 4,47% serta sisanya disalurkan pada 7 (tujuh) sektor ekonomi lainnya. Komposisi ini sejalan dengan kredit yang disalurkan menurut jenis penggunaannya, dimana pangsa kredit konsumsi yang mendominasi pada sektor lain-lain juga mengalami penurunan sebesar 4,73% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Diperkirakan penurunan tersebut bergeser ke sektor perdagangan yang pangasanya justru meningkat sebesar 4,03% dan sektor pertanian yang meningkat 1,30%. Penyaluran kredit pada kedua sektor tersebut semakin menjadi perhatian perbankan, karena cukup prospektif terutama sektor pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja meskipun risiko bisnis disektor ini dianggap relatif tinggi.

Portofolio total kredit perbankan pada triwulan laporan yang disalurkan pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) khususnya pada sektor produktif baru mencapai 47,24% dari total kredit yang diberikan atau meningkat sebesar 43,46% dibandingkan dengan posisi akhir 2004 yang menandakan aktifitas ekonomi pada sektor UMKM semakin meningkat.

Rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* pada posisi triwulan laporan tercatat sebesar 82,43% atau meningkat dibanding dengan akhir tahun 2004 sebesar 76,25%, namun dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya menurun sebesar 2,91% dari 85,34%. Penurunan LDR secara triwulanan disebabkan peningkatan sumber dana masyarakat secara nominal lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kredit.

Angka rasio kredit bermasalah/non lancar pembayarannya atau lebih dikenal dengan istilah rasio *Non Performing Loan (NPL)* secara *gross* pada triwulan IV 2005 tercatat sebesar 2,66% atau meningkat sebesar 0,06% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 2,60% dan meningkat 0,16% dari posisi akhir tahun 2004 sebesar 2,51%. Peningkatan NPL pada sektor lain-lain (lebih dominan konsumsi) dan sektor perdagangan serta jasa-jasa dunia usaha menjadi penyebab utama peningkatan angka rasio NPL di NTB. Peningkatan harga-harga sebagai dampak meningkatnya harga BBM berpengaruh terhadap kemampuan membayar debitur yang memiliki kredit konsumsi di perbankan yang kecenderungannya semakin menurun terutama untuk membiayai kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Sedangkan pada sektor perdagangan dan jasa-jasa dunia usaha diperkirakan omsetnya (produksi) mengalami penurunan sebagai dampak dari kenaikan BBM yang berpengaruh terhadap penurunan daya beli dan permintaan masyarakat, disisi lain ongkos operasional meningkat sehingga mengalami kesulitan membayar angsuran kredit secara tepat waktu.

Profitabilitas perbankan masih relatif cukup baik meskipun mengalami penurunan dibandingkan akhir 2004 maupun triwulan sebelumnya, penurunan tersebut disebabkan oleh

meningkatnya biaya operasional terutama biaya dana (*cost of fund*) akibat dari kenaikan suku bunga deposito sebagai dampak kenaikan BI Rate sebagai konsekuensi kondisi laju inflasi yang relatif tinggi pada saat ini, terutama bersumber dari *administered goods*.

## 5. Perkembangan Sistem Pembayaran

Jumlah nominal transaksi non tunai melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*), secara total sebesar Rp8,82 triliun atau meningkat sebanyak 2,85% dibanding transaksi yang sama selama tahun 2004. Peningkatan transaksi RTGS diantaranya karena adanya aliran transaksi yang masuk dari pemerintah pusat seperti dana-dana untuk Bantuan Langsung Tunai (kompensasi BBM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dana perimbangan (DAU & DAK).

Sedangkan transaksi non tunai lainnya melalui kegiatan kliring selama tahun 2005 meningkat sebesar 18,51%. Meningkatnya nominal transaksi kliring merupakan salah satu gambaran adanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah ini, disamping kesadaran para pelaku ekonomi yang menggunakan sarana giralisasi dalam kegiatan bisnisnya guna menghindari risiko.

Sementara itu, transaksi keuangan secara tunai cenderung *net inflow*. Hal ini terjadi karena adanya pencairan kredit perbankan, pembelian hasil panen tembakau (pada triwulan III 2005) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (dana kompensasi BBM).

Jumlah uang yang tidak layak edar selama tahun 2005 meningkat sebesar 47,54%. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan jumlah uang lusuh di NTB. Pada umumnya uang yang tidak layak edar (lusuh) banyak diperoleh dari Pulau Sumbawa, mengingat relatif sedikitnya jumlah perbankan di daerah tersebut dibandingkan dengan di Pulau Lombok.

Jumlah uang palsu yang ditemukan/dilaporkan kepada Bank Indonesia Mataram selama tahun 2005 relatif cukup tinggi dan tercatat sebesar Rp48.030.000,- atau meningkat sebesar 182,36% dibandingkan tahun 2004 yang tercatat hanya sebesar Rp17.010.000,-. Modusnya sudah merambah ke daerah yang relatif terpencil (seperti di Lunyuk, Pulau Sumbawa). Sehingga diharapkan masyarakat terutama para kasir toko atau kasir tempat bisnis lainnya (seperti pom bensin dan pedagang di pasar tradisional) dapat lebih teliti dalam menerima uang sebagai alat pembayaran dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan responsif dari aparat. Sosialisasi keaslian uang rupiah dapat pula melibatkan unsur aparat kecamatan yang dapat menjadi ujung tombak bagi masyarakat setempat dalam rangka memperoleh informasi mengenai keaslian uang rupiah.

## 6. Prospek Makro Ekonomi Regional (*Economic Outlook*)

Pada triwulan mendatang, kondisi kegiatan perekonomian di NTB diperkirakan masih akan mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha, dimana diprediksikan bahwa akan terjadi kembali penurunan kegiatan usaha, yang diindikasikan dari penurunan perkiraan kegiatan usaha, tercermin dari ekspektasi negatif terhadap volume

permintaan/pesanan/kontrak, nilai penjualan/pendapatan, persediaan hasil pertanian dan ekspektasi penggunaan tenaga kerja.

Dengan adanya rencana pembangunan beberapa proyek seperti proyek pembangunan bandara internasional di Loteng, pembangunan bendungan Pandanduri di Lotim, pembangunan di sektor kelistrikan di Lombok dan Sumbawa serta BLT yang terus berlanjut hingga tahun 2006 ditambah adanya kecenderungan perubahan arah kebijakan pemberian kredit perbankan dari konsumtif ke modal kerja, diperkirakan akan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2006.

Namun demikian, prospek pertumbuhan ekonomi pada triwulan mendatang diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan semula karena adanya bencana banjir yang menyebabkan berbagai kerusakan prasarana fisik dan tergenangnya areal penanaman padi di beberapa daerah meskipun tidak terlalu signifikan, sehingga angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2006 diprediksi akan minus/negatif, meskipun secara y-o-y akan berada pada kisaran 2% - 3%.

Sementara itu, jumlah *remittance* TKI diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2005.

## 7. Prospek Inflasi

Mencermati arah kecenderungan pergerakan angka inflasi, laju inflasi pada awal triwulan I-2006 diperkirakan akan mengalami perlambatan. Meskipun melambat, angka inflasi masih akan cukup tinggi sebagai dampak dari *second round inflation* akibat kenaikan harga BBM yang sangat tinggi selama tahun 2005, yang dampaknya belum dapat diatasi dalam kurun waktu singkat. Inflasi yang cukup tinggi masih akan terjadi pada beberapa sektor, terutama sektor makanan jadi, sektor perumahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih.

Angka inflasi tahunan (y-o-y) Kota Mataram pada triwulan I-2006 diperkirakan akan berada pada kisaran angka 16%-18% dan secara triwulanan (q-t-q) akan berkisar pada 2% hingga 3%. Sedangkan inflasi bulanan diprediksi mengalami peningkatan sekitar 1,5% sampai 2,5% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, setelah terjadi deflasi pada bulan Desember 2005. Prediksi tersebut kemungkinan dapat tercapai dengan asumsi tidak ada kenaikan harga BBM lanjutan, faktor musiman bersifat normal dan faktor eksternal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian NTB.

Sementara itu, BI rate sebagai salah satu sasaran operasional untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang akan berpengaruh terhadap angka inflasi, pada triwulan I-2006 diperkirakan masih tetap dipertahankan pada angka yang relatif tinggi hingga triwulan II-2006.

## 8. Rekomendasi

- a. Sulitnya memperoleh data realisasi APBD tahun 2005 baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, perlu diciptakan suatu sistem yang dapat *on line* antar pemerintah daerah di NTB, sehingga berbagai pihak/masyarakat dapat memperoleh informasi secara menyeluruh atas realisasi APBD secara *real time* guna tercipta kinerja pemerintahan yang *good governance*.
- b. Perlunya peningkatan anggaran belanja publik dan belanja modal dalam struktur APBD tahun 2006 baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB, guna mendorong pertumbuhan sektor riil yang dapat meningkatkan PDRB Nusa Tenggara Barat.
- c. Jumlah kredit non lancar (NPL) perbankan pada triwulan mendatang diperkirakan akan meningkat, dengan :
  - memberlakukan analisis kelayakan kredit baru secara lebih berhati-hati terutama permintaan kredit konsumtif dan sektor tertentu yang NPLnya cenderung meningkat.
  - Sedapat mungkin menahan laju tingkat suku bunga kredit agar tidak menambah beban debitur melalui langkah efisiensi biaya-biaya yang tidak secara signifikan meningkatkan pendapatan, misalnya mengurangi biaya promosi yang tidak perlu.
  - Menggali potensi calon debitur yang bankable dan sedapat mungkin tidak melakukan penetrasi terhadap debitur yang sama, khususnya kredit kepada debitur yang bersifat konsumtif.
- d. Perlu optimalisasi penagihan kredit non lancar bagi bank umum di wilayah Bima terutama kredit yang disalurkan untuk sektor konstruksi (NPL=56,46%) dimana sebagian besarnya terkonsentrasi pada pengerjaan proyek-proyek pemerintah, antara lain dengan melakukan pendekatan terhadap pemerintah daerah, disamping itu perlu lebih selektif dan hati-hati dalam penyaluran kredit ke sektor ini.
- e. Perlu adanya pemikiran bagi perbankan di wilayah Sumbawa, Dompu atau Bima untuk membentuk *cash center* guna menjamin kelancaran arus distribusi uang, disamping dapat menekan biaya distribusi, juga dapat menekan peredaran uang tidak layak edar (lusuh) di daerah tersebut ataupun menghambat peredaran uang palsu yang akhir-akhir ini terasa agak meningkat. *Cash center* tersebut nantinya akan berhubungan dengan Bank Indonesia sebagai distributor uang layak edar dan menarik uang tidak layak edar.
- f. Perlunya meningkatkan sosialisasi keaslian uang rupiah dan cara penggunaannya agar tidak cepat lusuh terutama kepada masyarakat kecil, bendaharawan dinas, kecamatan/desa, dan perguruan tinggi baik melalui media massa maupun sosialisasi secara langsung oleh Bank Indonesia.

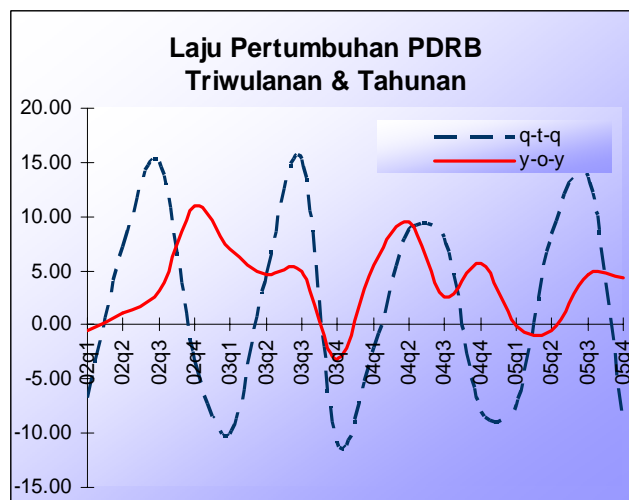


# BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

## 1. Ringkasan Umum Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTB

Kegiatan perekonomian di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV-2005 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-t-q) mengalami kontraksi, tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar -8,43% (ADH Konstan 1993). Penurunan ini kurang menggembarakan mengingat pada triwulan sebelumnya perekonomian Propinsi NTB dapat mencapai angka pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 13,69%. Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y), perekonomian Propinsi NTB pada triwulan ini menunjukkan peningkatan / tumbuh sebesar 4,33%, meskipun masih lebih rendah dari posisi triwulan sebelumnya sebesar 4,71%.

Grafik 1.1



Sumber : data BPS diolah

Grafik di atas menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan perekonomian Propinsi NTB selama 4 tahun terakhir. Baik secara tahunan maupun triwulanan terlihat adanya penurunan laju pertumbuhan PDRB pada triwulan IV-2005. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan nilai tambah pada sebagian besar sektor ekonomi. Secara tahunan (y-o-y), trendnya menunjukkan fluktuasi dengan *range* yang cukup lebar. Pada triwulan IV-2005, laju pertumbuhan ekonomi tahunan mengalami penurunan setelah mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya di triwulan III-2005. Demikian



pula secara triwulanan, laju pertumbuhan PDRB sangat berfluktuasi karena struktur ekonomi NTB cenderung sangat dipengaruhi faktor musiman terkait dengan basis perekonomian pada sektor pertanian. Dengan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan ini terjadi pertumbuhan negatif setelah menyentuh titik tertinggi pada triwulan III-2005.

Struktur perekonomian NTB pada triwulan IV-2005 berdasarkan harga konstan tahun 1993 secara sektoral didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian masing-masing sebesar 27,43% dan 22,96%. Sektor lain yang juga berperan cukup besar adalah sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dengan distribusi masing-masing sebesar 14,02%, 11,06% dan 10,71%. Ditinjau dari sisi penggunaan, sektor yang paling dominan adalah konsumsi rumah tangga dan ekspor masing-masing sebesar 42,30% dan 32,50%.

Pada triwulan ini, secara tahunan, seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor bangunan yang angka pertumbuhannya masing-masing sebesar 7,15% dan 5,13%. Kedua sektor tersebut pada triwulan ini bukan merupakan sektor dengan *share* terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB, karena masing-masing hanya berkontribusi sebesar 0,75% dan 0,34%. Kontribusi tertinggi pada triwulan ini diberikan oleh sektor dengan distribusi tertinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian dengan sumbangan masing-masing sebesar 1,35% dan 0,89% dari total pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB sebesar 4,33%. Angka pertumbuhan kedua sektor tersebut masing-masing sebesar 4,95% dan 3,84%. Sektor lainnya yaitu sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa juga turut memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi NTB dengan kisaran angka pertumbuhan 2,49% sampai dengan 4,51%.

Pertumbuhan di sektor pengangkutan dan komunikasi terutama disebabkan oleh meningkatnya arus transportasi barang dan penumpang serta hubungan komunikasi seiring dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru dimana aktivitas tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor bangunan lebih disebabkan oleh banyaknya proyek-proyek pemerintah maupun swasta yang terealisasi pada triwulan ini, dengan realisasi nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dalam 3 tahun terakhir, sektor ini terus berkembang dan selalu memberikan pertumbuhan dan kontribusi positif bagi perekonomian NTB.

Disisi penggunaan, komponen ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,26%. Komponen konsumsi seluruhnya mengalami pertumbuhan positif, baik konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah masing-masing sebesar 5,30%, 4,15% dan 3,14%. Demikian pula dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,98%. Sedangkan perubahan stok dan impor menunjukkan penurunan pada triwulan ini.

2. PDRB Menurut Penggunaan/Sisi Pengeluaran

Tabel 1.1  
Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan (Sisi Pengeluaran)

Pertumbuhan Sisi Pengeluaran (y-o-y)	2004				2005			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pengeluaran Kons. Rmh Tangga	4.77	5.33	6.01	6.58	4.62	4.65	5.07	4.15
Konsumsi Lemb. Nirlaba	9.78	13.13	8.57	6.48	4.23	4.92	7.00	5.30
Pengeluaran Kons. Pemerintah	4.84	5.37	5.88	6.22	5.50	4.78	3.37	3.14
Pembentukan Mod. Tetap Bruto (PMTB)	6.73	6.66	6.85	7.31	4.91	4.72	4.12	3.98
Perubahan Stok	38.67	91.58	5.43	50.23	8.88	199.85	24.09	125.98
Ekspor	3.75	9.88	-4.35	17.78	12.70	-25.15	3.90	12.26
Impor	20.53	1.62	7.02	16.32	11.35	33.75	9.61	-1.59
Pertumb. Ek. Trmsk Pertambangan Non Migas	5.49	9.47	2.59	5.70	-0.12	-0.49	4.71	4.33
Pertumb. Ek. Tidak Trmsk Pertambangan Non Migas	5.41	5.22	4.30	3.87	4.17	5.67	4.73	4.10

Sumber : data BPS di olah

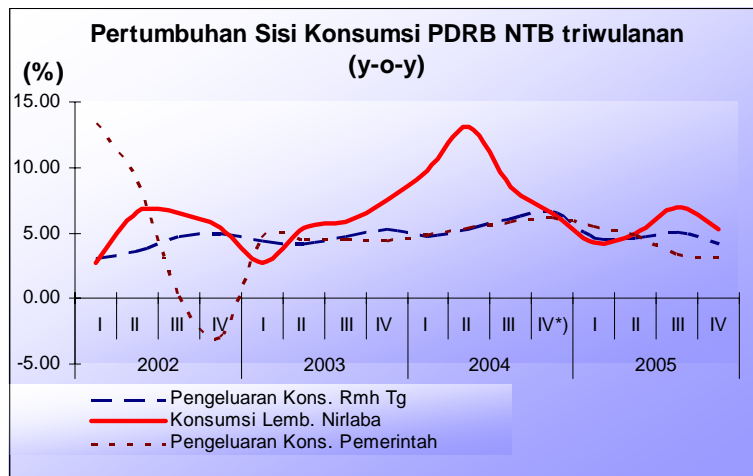
Pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penggunaan atau pengeluaran pada triwulan ini (secara y-o-y) didominasi oleh ekspor, diikuti oleh konsumsi. Meningkatnya ekspor luar negeri secara signifikan yang didominasi oleh ekspor konsentrat tembaga mendorong pertumbuhan ekspor pada triwulan ini. Disisi lain, harga barang-barang tambang termasuk harga minyak mentah dunia yang meningkat cukup tajam pada triwulan ini mendorong meningkatnya ekspor konsentrat tembaga yang pangasanya hampir seluruhnya merupakan konsumsi luar negeri. Namun demikian, angka pertumbuhan ini masih lebih kecil dibandingkan pencapaian pertumbuhan ekspor pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,78%.

Sementara itu, komponen konsumsi baik konsumsi lembaga nirlaba, konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada triwulan ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,30%, 4,15% dan 3,14%. Pertumbuhan seluruh komponen konsumsi pada triwulan ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2004 sebagai akibat dari kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Meskipun pertumbuhan komponen PMTB pada triwulan ini positif sebesar 3,98%, tetapi trendnya mengalami penurunan sepanjang tahun 2005. Kondisi ini diduga disebabkan oleh dampak kenaikan harga BBM yang berakibat pada meningkatnya biaya-biaya produksi di sektor riil dan menahan minat sektor riil untuk berinvestasi khususnya dalam hal pembelian barang investasi jangka panjang. Sedangkan perubahan stok dan impor pada triwulan ini mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -125,98% dan -1,59%. Menurunnya aktivitas impor tersebut terutama terjadi pada impor luar negeri yang merupakan dampak dari kondisi perekonomian secara keseluruhan pada triwulan ini yang masih terganggu akibat kebijakan menaikkan harga BBM, serta sektor riil yang melihat adanya penurunan permintaan akibat adanya penurunan daya beli masyarakat dan

pemerintah yang terindikasi dari penurunan pertumbuhan PDRB konsumsi/pengeluaran rumah tangga, lembaga nirlaba dan pemerintah pada triwulan ini.

### Pengeluaran Konsumsi

Grafik 1.2



Sumber : data BPS di olah

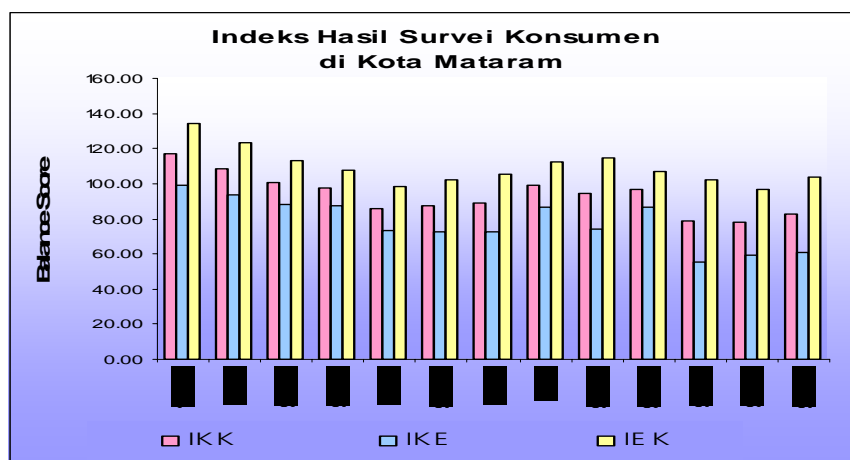
Dari grafik 1.2 dapat dilihat pertumbuhan PDRB Propinsi NTB secara tahunan (y-o-y) dari sisi konsumsi, menggambarkan kecenderungan pertumbuhan yang menurun pada triwulan IV-2005, setelah sebelumnya mencapai puncaknya pada triwulan III-2005. Seluruh komponen konsumsi baik untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba dan pengeluaran konsumsi pemerintah, mengalami pertumbuhan positif, meskipun pertumbuhannya masih lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan yang sama pada tahun 2004.

Tumbuhnya konsumsi Lembaga Nirlaba ini didorong oleh peningkatan aktivitas yayasan-yayasan dan lembaga keagamaan di NTB terkait dengan kegiatan pada bulan puasa dan perayaan Hari Raya Idul Fitri, dimana mayoritas masyarakat di NTB beragama Islam. Dari komponen konsumsi rumah tangga, pertumbuhannya dipengaruhi oleh adanya kompensasi dari pemerintah berupa kebijakan kompensasi subsidi BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000,- per rumah tangga miskin, dan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) serta subsidi biaya kesehatan untuk masyarakat ekonomi golongan bawah. Disamping itu, meningkatnya konsumsi makanan maupun non makanan seiring dengan tibanya bulan puasa, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru turut memberikan pengaruh. Meskipun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhannya di triwulan yang sama tahun 2004 sebesar 6,58%. Hal ini membuktikan bahwa walaupun pemerintah telah memberikan kompensasi, dampak kenaikan harga BBM cukup signifikan terhadap melemahnya daya beli atau konsumsi masyarakat.

Seiring dengan kecenderungan pertumbuhan konsumsi pada triwulan IV-2005, konsumsi pemerintah juga tumbuh sebesar 3,14%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan upah dan gaji pegawai dan peningkatan belanja rutin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik. Khusus untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, kecenderungannya hampir merata sehingga tidak mempunyai pola tertentu setiap triwulannya. Faktor lainnya yang berpengaruh juga adalah adanya kebijakan pengangkatan pegawai negeri sipil pada hampir semua departemen yang mengakibatkan peningkatan pembiayaan pemerintah dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik, baik pada pos anggaran biaya aparatur dan anggaran pembangunan, serta anggaran untuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga selama tahun 2004 cenderung menunjukkan peningkatan, namun memasuki tahun 2005 hingga triwulan IV-2005 angka pertumbuhannya menunjukkan trend yang menurun. Menurunnya tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini sejalan dengan hasil survei konsumen yang diselenggarakan atas kerjasama Bank Indonesia Mataram dengan BPS Propinsi NTB, yang menggambarkan sikap pesimis para konsumen dalam menyikapi perkembangan perekonomian ke depan.

Grafik 1.3  
Indeks Hasil Survei Konsumen Kota Mataram



**Keterangan :**

IKK : Indeks Keyakinan Konsumen

IKE : Indeks Kondisi Ekonomi

IEK : Indeks Ekspektasi Konsumen

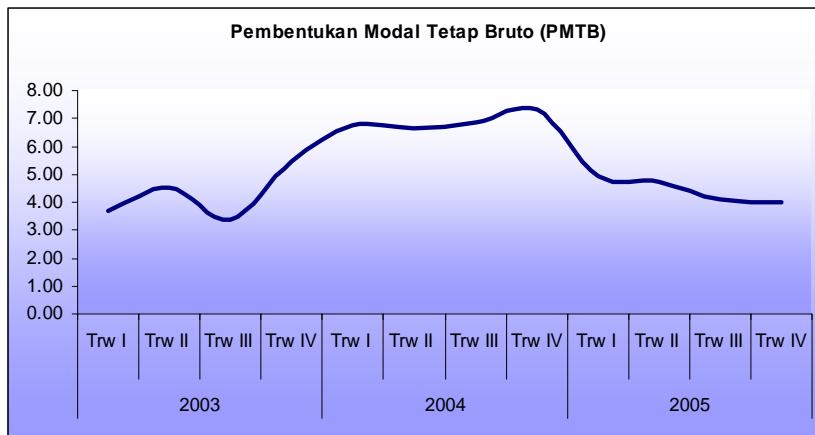
Angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sepanjang tahun 2005 hingga triwulan IV-2005 menunjukkan nilai saldo bersih dibawah 100 (pesimis). Pada akhir triwulan ini IKK menunjukkan angka 82,60. Meskipun Indeks Ekspektasi Umum (IEK) menunjukkan angka yang optimis (104,00), namun Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) sebesar 61,20 memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga secara umum keyakinan konsumen menjadi pesimis. Hal ini menunjukkan bahwa

kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah baik pusat dan daerah cenderung memburuk.

Dari hasil survei konsumen yang dilakukan di Kota Mataram diketahui bahwa hasil pencacahan pada akhir triwulan IV-2005 cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang menunjukkan ekspektasi harga tertinggi disepanjang tahun 2005. Hal ini erat kaitannya dengan harapan konsumen atas rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik di tahun 2006. Disamping itu, dipengaruhi pula oleh ekspektasi masyarakat akan harga barang-barang yang diperkirakan akan terus meningkat, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja yang semakin menyempit dan adanya kecenderungan suku bunga akan meningkat. Kondisi ini berdampak terhadap tendensi rencana konsumsi masyarakat ke depan yang semakin menurun akibat ekspektasi harga yang akan melambung seiring masih berlangsungnya dampak dari kenaikan BBM yang telah diberlakukan. Saat ini sebagian besar masyarakat cenderung menghindari pembelian barang tahan lama seperti perabotan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan lain-lain sebagai akibat ekspektasi menurunnya pendapatan riil konsumen.

### Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Grafik 1.4.



Sumber : data BPS diolah

Pertumbuhan PMTB pada triwulan IV-2005 sebesar 3,98% menyentuh titik terendah dalam 2 tahun terakhir sejak tahun 2004. Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y) terjadi penurunan tajam, dimana pada triwulan IV-2004 pertumbuhan PMTB mencapai 7,31%. Kondisi ini diprediksi masih terkait dengan dampak kenaikan harga BBM yang berakibat pada meningkatnya biaya-biaya produksi di sektor riil, disamping daya beli masyarakat juga mengalami stagflasi akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa akibat naiknya harga BBM. Menurunnya pertumbuhan komponen PMTB pada triwulan ini juga merupakan bentuk gambaran pola dari akumulasi pembentukan modal yang terjadi pada masing-masing sektor ekonomi selama

satu tahun, dimana kegiatan PMTB mencapai aktifitas tertinggi pada triwulan II dan triwulan III dan akan mengalami penurunan pada triwulan I dan IV setiap tahunnya.

Dari data investasi yang diperoleh dari BKPM Propinsi NTB diketahui bahwa selama tahun 2005, sampai dengan posisi triwulan IV, hanya sebagian kecil rencana investasi dari PMA yang terealisasi, sedangkan PMDN tidak ada realisasinya. Dari jumlah PMDN yang direncanakan pada tahun 2005 sebesar Rp500 juta pada sektor jasa lainnya, ternyata tidak ada yang terealisasi hingga akhir triwulan IV-2005. Sedangkan PMA yang semula direncanakan sebesar US\$13.13 juta pada sektor perikanan (US\$0.25 juta), sektor perhotelan (US\$0.18 juta) dan sektor jasa lainnya (US\$0.34 juta), hanya terealisasi sebesar US\$0.77 juta pada sektor perhotelan (US\$0.18 juta) dan sektor jasa lainnya (US\$0.59 juta). Kecilnya angka realisasi investasi tersebut terkait dengan beberapa permasalahan antara lain kesulitan para investor menemukan mitra usaha yang profesional di daerah NTB karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam hal manajerial dan kemampuan modal yang terbatas; masih kurang pahamnya calon investor terhadap kebijakan pemerintah daerah dan prosedur perizinan investasi di daerah; terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga para investor menjadi enggan untuk berinvestasi serta kondisi keamanan dan kenyamanan tinggal yang belum kondusif di wilayah ini.

Namun demikian, ke depan diharapkan nilai investasi di NTB dapat meningkat, terkait dengan berbagai rencana realisasi proyek-proyek seperti pembangunan bandara internasional di Kabupaten Lombok tengah, pembangunan bendungan Pandanduri di Lombok Timur, pembangunan di sektor kelistrikan di Lombok dan Sumbawa, rencana ekspansi/pembangunan tambang Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara. Apabila proyek-proyek tersebut dapat segera terealisasi, maka dampak *multiplier effect* yang ditimbulkan diharapkan mampu mendorong angka pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB.

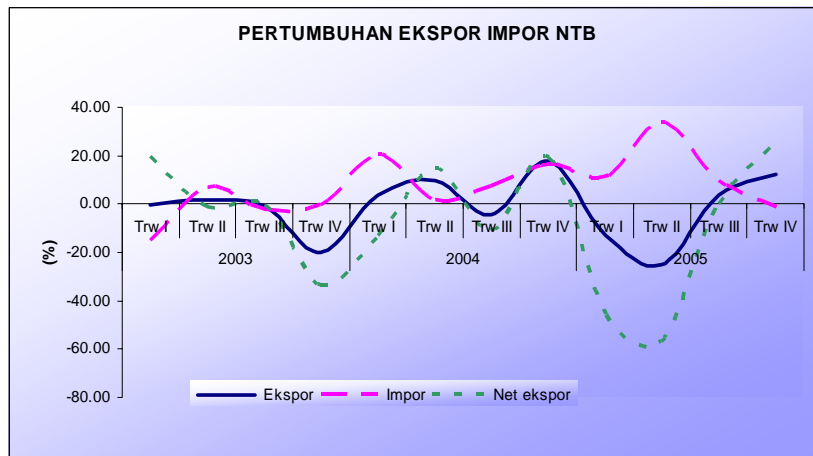
Sementara itu, dilihat dari sisi penyaluran kredit perbankan pada triwulan ini, terjadi peningkatan jumlah kredit perbankan yang cukup signifikan yang diberikan untuk kegiatan investasi. Sebagian besar kredit tersebut disalurkan oleh bank umum yang beroperasi di NTB. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, pertumbuhan kredit investasi ini mencapai 49,93%. Meskipun kredit investasi yang disalurkan kepada usaha properti sedikit menurun, namun terjadi peningkatan yang sangat tinggi untuk kredit investasi kepada usaha agrobisnis dan usaha lainnya. Selama tahun 2005, secara perlahan terjadi pergeseran penyaluran kredit dari kredit konsumsi kepada kredit kepada sektor riil / usaha-usaha produktif. Pangsa kredit konsumsi terus mengalami penurunan. Pada akhir triwulan IV-2005, pangsa kredit perbankan yang disalurkan bank umum di NTB kepada sektor riil yaitu berupa modal kerja dan investasi telah mencapai 46,96%, meningkat dari akhir tahun 2004 sebesar 42,34%. Sedangkan pangsa kredit konsumsi menurun dari 57,67% menjadi 53,04%. Sektor investasi yang saat ini banyak diminati adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, sektor jasa-jasa dunia usaha dan sektor jasa-jasa sosial/masyarakat. Perubahan komposisi

kredit dari jenis konsumtif ke sektor produktif terutama ke kredit investasi ini juga turut berperan dalam pembentukan investasi di daerah ini.

### Net Ekspor (Ekspor – Impor)

Pada triwulan IV-2005, nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekspor NTB meningkat sebesar 12,26% dibandingkan dengan triwulan IV-2004. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan komponen ekspor (ditinjau secara tahunan) adalah meningkatnya secara signifikan ekspor luar negeri, yang didominasi oleh ekspor konsentrat tembaga. Disamping itu, terjadi peningkatan harga barang-barang tambang termasuk harga minyak mentah dunia yang cukup tajam pada triwulan ini mendorong meningkatnya nilai penjualan ekspor konsentrat tembaga yang pangasanya hampir seluruhnya merupakan konsumsi luar negeri. Komoditi ekspor konsentrat ini lebih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global seperti harga konsentrat dunia dan permintaan dari luar negeri. Perdagangan antar daerah (ekspor regional) juga menunjukkan peningkatan, karena hasil panen produk-produk pertanian cukup berhasil terutama produk-produk yang diperdagangkan antar daerah seperti tembakau dan lain-lain.

Grafik 1.5



Sumber : data BPS diolah

Disisi lain, komponen impor mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,59%. Dari grafik di atas, impor NTB terlihat relatif stabil dengan kecenderungan menurun pada triwulan ini. Menurunnya aktivitas impor tersebut terutama terjadi pada impor luar negeri. Penurunan ini juga merupakan akibat kondisi perekonomian secara keseluruhan yang belum stabil sebagai dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Nilai ekspor dan impor NTB selama 3 tahun terakhir memiliki rentang selisih yang cukup besar, dimana nilai ekspor lebih besar dari pada nilai impor, sehingga NTB masih mengalami surplus dari kegiatan ekspor impor. Dengan adanya net ekspor, neraca perdagangan NTB masih positif meskipun terdapat kecenderungan penurunan. Melihat masalah ini, upaya peningkatan hasil



produksi dan kualitas barang ekspor NTB dan substitusi barang impor dengan produksi barang yang dapat dibuat/dihasilkan dari daerah NTB sendiri perlu dilakukan.

### Kinerja Ekspor - Impor Luar Negeri Propinsi NTB

Berdasarkan data ekspor impor dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB, nilai ekspor NTB hingga triwulan tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 6,30% dibandingkan dengan ekspor tahun 2004.

**Tabel 1.2**  
**Komoditi dan Negara Tujuan Ekspor Propinsi NTB**

(Juta US\$)

NO	KOMODITI EKSPOR	NILAI	NO	NEGARA TUJUAN	NILAI
1	Konsentrat Tembaga	1,027.32	1	India	316.22
2	Tepung Caragienan	2.82	2	Jepang	309.46
3	Mutiara/Mutiara Bulat	2.51	3	Korea	202.65
4	Biji Mete	1.20	4	Jerman	77.72
5	Kerajinan Gerabah	1.19	5	Philipina	72.97
6	Kerajinan Kayu	0.28	6	China	53.13
7	Kerajinan Hand.Drief		7	Amerika	1.40
8	Fruit Deco	0.16	8	Taiwan	1.08
9	Kerajinan Batu	0.10	9	Australia	0.52
10	Kerajinan Rotan	0.10	10	Negara lainnya	0.84
	Lainnya	0.30			
<b>TOTAL EKSPOR</b>		<b>1,035.99</b>	<b>TOTAL EKSPOR</b>		<b>1,035.99</b>

Sumber : data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

Realisasi ekspor yang tercatat dari data Pemberitahuan Ekspor Barang yang berasal dari pengiriman barang-barang dari NTB ke luar negeri melalui beberapa pelabuhan dan bandar udara di Indonesia pada tahun 2005 mencapai US\$1.035,98 juta, sedangkan pada tahun 2004 tercatat sebesar US\$974 juta. Ekspor terbesar ditujukan kepada negara India (US\$316,22 juta) , Jepang (US\$309,46 juta), Korea (US\$202,65 juta), Jerman (US\$77,72), Philipina (US\$72,97 juta), China (US\$53,13 juta) dan sisanya ke negara-negara lainnya. Produk utama yang diekspor adalah konsentrat tembaga yang secara konsisten sebagai produk dengan nilai ekspor tertinggi. Secara tahunan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, distribusi produk ini sedikit menurun dari tahun 2004 yang mencapai 99,71%. Nilai ekspor konsentrat tembaga pada tahun 2005 mencapai US\$1.027,32 juta atau 99,16% dari total nilai ekspor pada tahun 2005. Selebihnya adalah produk mutiara, tepung caraginean, biji mete dan kerajinan. Dari kerajinan, gerabah merupakan produk unggulan. Selain itu, kerajinan lainnya adalah kerajinan kayu, kerajinan batu, *hand drief fruit deco*, kerajinan rotan dan lainnya. Ekspor produk dari NTB dikirimkan melalui pelabuhan Benete-Sumbawa disamping pelabuhan tersebut, Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya, Bandar Udara Selaparang-NTB, Soekarno Hatta-Jakarta, Ngurah Rai-Denpasar, Tanjung Emas-Semarang, Tanjung Priok-Jakarta dan Juanda-Surabaya. Produk konsentrat tembaga yang merupakan produk utama dari



ekspor NTB dikirimkan melalui pelabuhan Benete- Sumbawa. Dari data tersebut, terlihat bahwa ekspor dari sektor pertanian (dalam arti luas) relatif kecil, padahal potensinya sangat besar, seperti permintaan sapi asal NTB, hasil laut lainnya di luar mutiara dan rumput laut (ikan kerapu, kakap, udang, dan sebagainya) dan perkebunan.

**Tabel 1.3**  
**Komoditi Impor Propinsi NTB**

(Miliar Rupiah)

NO	KOMODITI IMPOR	NEGARA	NILAI
1	Guide Books, Empty Boxes	Singapura	0.03
2	Spareparts For Motor Cycle	Singapura	0.02
3	Ship Spareparts	Singapura	0.00
4	1760 Now & Beyond Site Based Reports	Australia	0.02
5	Plastic Loops	India	0.00
6	Ship Spareparts	Singapura	0.03
7	Kapal Ferry MV"PUTRI GIANYAR"	Japan	13.41
	<b>TOTAL REALISASI IMPOR 2005</b>		<b>13.53</b>

Sumber : data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi NTB

Sementara itu, realisasi impor NTB pada tahun 2005 mencapai Rp13,53 Miliar. Dari nilai tersebut, 99,17% adalah impor kapal ferry MV Putri Gianyar dari Jepang pada bulan Desember. Produk impor lainnya berupa *ship spareparts*, *guide books*, *empty boxes* dari *spareparts for motor cycle* dari Singapura, produk *1760 now & beyond site based reports* dari Australia dan *plastic loops* dari India. Pada umumnya barang impor tersebut digunakan untuk sektor yang produktif seperti untuk kelancaran sarana transportasi dan industri. Secara net, perdagangan luar negeri Propinsi NTB mengalami surplus perdagangan yang sangat besar.

### 3. PDRB Menurut Sisi Sektoral (Penawaran)

Pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB pada triwulan IV-2005 didorong oleh pertumbuhan di semua sektor. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (7,15%), sektor bangunan (5,13%), sektor pertambangan dan penggalian (4,95%) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (4,51%). Pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi lebih didorong oleh faktor musiman. Demikian pula di sektor bangunan, pertumbuhannya lebih disebabkan karena banyaknya realisasi proyek swasta dan proyek-proyek pemerintah, yang sebagian besar terealisasi pada triwulan IV. Adanya realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing di sektor perhotelan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan di sektor ini.

Dilihat dari besarnya sumbangan pertumbuhan yang diberikan oleh masing-masing sektor, kontribusi terbesar bersumber dari sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian dengan sumbangan masing-masing sebesar 1,35% dan 0,89%. Kedua sektor tersebut merupakan sektor

unggulan yang secara konsisten mendominasi jumlah PDRB NTB selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sektor pengangkutan juga turut memberikan kontribusi yang cukup tinggi sebesar 0,75% terkait dengan meningkatnya arus transportasi barang dan penumpang sehubungan dengan berbagai perayaan pada triwulan ini. Sektor lainnya hanya menyumbang dengan kisaran angka di bawah 0,5%.

Tabel 1.4.  
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan '93)

SEKTOR	TRW I-2005				TRW II-2005				TRW III-2005				TRW IV-2005			
	NILAI PDRB*)	DISTR.	GRWTH	SUMBG	NILAI PDRB*)	DISTR.	GROWTH	SUMBG	NILAI PDRB*)	DISTR.	GROWTH	SUMBG	NILAI PDRB*)	DISTR.	GROWTH	SUMBG
	(Miliar Rp)	(%)	(%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	(%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	(%)	(%)	(Miliar Rp)	(%)	(%)	(%)
Pertanian	296.56	23.88	1.10	0.26	309.42	23.00	2.28	0.51	415.41	27.16	2.85	0.79	321.62	22.96	3.84	0.89
Pertambangan	329.87	26.56	-10.30	-3.05	381.36	28.35	-13.36	-4.35	412.34	26.96	4.53	1.22	384.25	27.43	4.95	1.35
Industri	53.29	4.29	8.95	0.35	57.47	4.27	13.48	0.50	60.85	3.98	5.89	0.23	66.93	4.78	2.49	0.12
Listrik	5.62	0.45	3.41	0.01	5.96	0.44	4.61	0.02	6.08	0.40	4.30	0.02	6.27	0.45	3.63	0.02
Bangunan	72.77	5.86	4.89	0.27	79.80	5.93	4.99	0.28	102.94	6.73	6.01	0.40	93.72	6.69	5.13	0.34
Perdagangan	162.24	13.07	6.06	0.75	181.26	13.47	9.25	1.14	194.55	12.72	6.84	0.85	196.39	14.02	3.07	0.44
Pengangkutan	135.86	10.94	6.43	0.66	142.66	10.60	7.46	0.73	150.10	9.81	7.07	0.68	149.99	10.71	7.15	0.75
Keuangan	26.94	2.17	7.15	0.14	27.41	2.04	5.36	0.10	28.40	1.86	5.98	0.11	26.62	1.90	4.51	0.09
Jasa-Jasa	158.60	12.77	3.90	0.48	160.04	11.90	5.12	0.58	158.84	10.39	3.88	0.41	154.85	11.06	3.14	0.35
Total	1,241.75	100.00	-0.12	-0.12	1,345.39	100.00	-0.49	-0.49	1,529.50	100.00	4.71	4.71	1,400.63	100.00	4.33	4.33

Sumber : data BPS Propinsi NTB

Sementara itu, dari hasil survei kegiatan dunia usaha diperoleh gambaran bahwa pada umumnya para responden yang berasal dari kalangan dunia usaha menyatakan bahwa kegiatan usaha pada triwulan ini mengindikasikan terjadinya penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih/NSB (balance score) -5,00, setelah sebelumnya mengalami ekspansi dengan NSB 8,33.

Turunnya permintaan pasar, produksi barang/jasa, dan persediaan hasil panen/barang merupakan indikasi penurunan kegiatan usaha. Beberapa faktor yang memberikan peranan terhadap penurunan permintaan tersebut adalah peningkatan rata-rata harga/tarif barang/jasa sebagai dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2005, meskipun pada triwulan ini dipengaruhi oleh faktor musiman seperti adanya beberapa perayaan hari besar yaitu bulan puasa, Idul Fitri dan Natal, yang biasanya sangat mendorong peningkatan kegiatan usaha. Sementara itu, persepsi responden terhadap situasi bisnis pada triwulan IV-2005 mengindikasikan optimisme, tercermin dari SB 15 % (meningkat) meskipun tidak sebesar triwulan sebelumnya.

Tabel 1.5  
 Nilai Balance Score Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

Sektor	TRW I-05		TRW II-05		TRW III-05		TRW IV-05	
	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis	Keg. Usaha	Situasi Bisnis
Umum	-8.33	15.00	-10.00	16.67	8.33	20.00	-5.00	15.00
Pertanian	28.57	19.05	-9.20	14.29	-9.52	28.57	-9.52	28.57
Pertambangan	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-50.00	100.00	-50.00
Industri	-50.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	-25.00
Listrik	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	0.00
Bangunan	100.00	0.00	-33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perdagangan	-45.45	0.00	-27.27	9.09	45.45	36.36	9.09	18.18
Pengangkutan	14.29	28.57	28.57	42.86	57.14	42.86	14.29	28.57
Keuangan	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00
Jasa-Jasa	-40.00	40.00	-40.00	20.00	-20.00	0.00	-40.00	0.00

Sumber : hasil survei SKDU BI-BPS Prop.NTB

Sektor-sektor yang mengindikasikan penurunan kegiatan usaha adalah sektor sektor pertambangan & penggalian (SB -100,00%), listrik, gas & air bersih (SB -50,00%), jasa-jasa (SB -40%) dan sektor pertanian (SB -9,52%). Sedangkan sektor lainnya mengalami peningkatan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan relatif stabil.

Tingkat permintaan yang cenderung menurun di sektor jasa-jasa berdampak terhadap turunnya nilai penjualan/pendapatan perusahaan, disamping persaingan usaha pada sektor yang sama yang membatasi kinerja perusahaan. Di sektor pertanian, faktor yang mempengaruhi penurunan kegiatan usaha adalah menurunnya produksi dan persediaan hasil panen, karena pada triwulan ini merupakan musim tanam seiring dengan tibanya musim hujan. Sementara itu, penurunan kegiatan usaha sektor pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh turunnya produksi barang galian. Selain itu, masih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagai akibat dari kenaikan harga minyak mentah dunia karena keterbatasan pasokan turut berpengaruh pula. Kendala terbesar dari sektor listrik, gas dan air bersih adalah kegiatan produksinya terutama subsektor listrik, sangat dipengaruhi terbatasnya bahan bakar sebagai dampak langsung terjadinya kenaikan harga BBM, menyebabkan penurunan kegiatan usaha di sektor ini.

Pada triwulan ini penggunaan tenaga kerja secara umum di NTB cenderung stabil, dimana sebagian besar responden (90%) dunia usaha menyatakan bahwa mereka tidak akan mengurangi atau menambah jumlah karyawannya (tetap). Hanya sebagian kecil yang berkeinginan mengurangi (5% dari jumlah responden) atau menambah (5% dari jumlah responden) jumlah tenaganya. Penambahan tenaga kerja teridentifikasi berasal dari sektor pertanian, yaitu di sub sektor tanaman

bahan makanan dan perkebunan. Sedangkan pengurangan tenaga kerja terjadi pada sektor bangunan, karena pesimisme pelaku dunia usaha di sektor ini akibat kenaikan harga bahan bangunan dan biaya transportasi yang cukup signifikan, sehingga sangat berpengaruh terhadap keseluruhan biaya produksi.

### Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada triwulan ini, ditinjau secara tahunan (y-o-y) tumbuh sebesar 3,84%. Peningkatan pada sektor ini disebabkan karena peningkatan pada hampir semua sub sektornya, kecuali sub sektor kehutanan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,27%. Selama 3 tahun terakhir, sub sektor ini terus mengalami pertumbuhan negatif, kecuali pada triwulan II-2005 tumbuh positif sebesar 2,14%. Masih maraknya kasus *illegal logging* di NTB dirasakan sangat menghambat pertumbuhan sub sektor ini. Dari sektor pertanian, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 4,56%, sekaligus memberikan sumbangan tertinggi pada triwulan ini, sedangkan sub sektor lainnya tumbuh dengan kisaran angka 2,12% sampai dengan 3,41%. Meskipun mengalami pertumbuhan tertinggi, bila dibandingkan dengan angka pertumbuhannya pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,64%, pada triwulan ini terjadi perlambatan pertumbuhan. Penyebab masalah ini masih terkait dengan dampak kenaikan harga BBM yang mempengaruhi biaya produksi, seperti kenaikan harga pupuk dan biaya tenaga kerja. Terbatasnya ketersediaan pupuk memicu kenaikan harga pupuk di NTB. Khusus pupuk jenis urea, meski dinyatakan stoknya aman, namun terdapat kecenderungan para pengecer pupuk menimbun persediaan pupuk sebagai dampak psikologis dari isu kenaikan harga pupuk pada bulan Januari 2006 mendatang, meskipun Menteri Pertanian sudah memastikan tidak akan ada kenaikan harga pupuk hingga Maret 2006.

Namun demikian secara y-o-y, pertumbuhan sub sektor bahan makanan yang dicapai pada triwulan ini lebih ditunjang oleh pertumbuhan komoditi bawang merah dan bawang putih yang merupakan komoditi dengan *share* terbesar kedua setelah padi. Sementara itu, sub sektor tanaman perkebunan menunjukkan percepatan pertumbuhan sebesar 3,41%, yang dipengaruhi oleh masih berlangsungnya musim panen tembakau pada triwulan ini dengan hasil produksi yang lebih besar dari tahun lalu. Sub sektor ini memberikan kontribusi sebesar 0,10% terhadap pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan IV-2005. Panen raya tembakau (khususnya tembakau virginia) yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah pada triwulan ini menjadi pendorong utama pertumbuhan pada sub sektor perkebunan. Luasnya areal penanaman tembakau di NTB yang kurang lebih mencapai 18.634 ha dengan produksi sekitar 36.414 ton, memberikan sumbangan terhadap PDRB NTB sebesar 0,15%.

Sub sektor perikanan pada triwulan ini tumbuh sebesar 3,21% dengan sumbangan sebesar 0,07%. Pertumbuhan sub sektor ini dipicu oleh peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat sebagai dampak dari efek substitusi konsumsi daging. Masih kuatnya rasa trauma masyarakat akan pengaruh

informasi tentang penyebaran virus flu burung hingga saat ini menyebabkan masyarakat di NTB juga lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi hasil peternakan hewan unggas seperti burung dan ayam. Demikian pula dengan adanya informasi/berita tentang virus antrax yang menyerang hewan ternak seperti kambing, kerbau dan sapi terutama yang berasal dari Pulau Sumbawa juga turut membuat konsumen cenderung mengurangi konsumsi daging dan beralih mengkonsumsi ikan. Ke depan, sub sektor perikanan ini memiliki prospek yang cerah sehubungan dengan prioritas pembangunan NTB pada sektor kelautan dan perikanan, karena potensi laut NTB yang dinilai cukup menjanjikan baik dari sisi permintaan (*demand*) dan sisi *supply* (persediaan potensi sumber daya alam laut) tetapi pemanfaatan sektor tersebut pada saat ini masih belum optimal.

#### Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan IV-2005 mengalami pertumbuhan sebesar 4,95% dan dapat memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan ini. Namun jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada triwulan IV-2004 sebesar 11,10%, sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya hasil produksi pertambangan non migas terutama pada produksi konsentrat tembaga yang mendominasi sektor ini. Tahap eksplorasi yang lebih difokuskan pada lebar (bukan kedalaman) berpengaruh terhadap jumlah dan kandungan mineral bijih konsentrat tembaga yang menurun. Namun demikian, pertumbuhan yang terjadi di sektor ini pada triwulan IV-2005 didorong oleh peningkatan nilai penjualan hasil produksi konsentrat tembaga yang dipengaruhi oleh kenaikan harga penjualan produk tersebut di pasar internasional karena penjualan sangat dipengaruhi oleh pasar global.

#### Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan sebesar 3,07%, dengan kontribusi yang cukup tinggi pada triwulan IV-2005 sebesar 0,44%. Pertumbuhan sektor ini ditunjang oleh pertumbuhan semua sub sektor pendukungnya, terutama sub sektor hotel dan restoran sebesar 4,45% yang memberikan sumbangan sebesar 0,07%, sedangkan sub sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 2,89% dengan sumbangan sebesar 0,36%. Pertumbuhan sub sektor hotel dan restoran dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan ke NTB menunjukkan trend yang semakin membaik, namun perkembangannya agak terhambat oleh peristiwa bom Bali II, yang menyebabkan terjadinya *tourist cancellation* (yang membatalkan kedatangannya ke NTB). Sejak tahun 2000 hingga 2005, jumlah wisatawan (mancanegara dan nusantara) yang berkunjung ke Lombok Barat (sebagai tempat mayoritas yang dikunjungi wisatawan) cenderung terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2003 yang jumlahnya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengaruh dari peristiwa bom Bali I yang terjadi pada bulan Oktober 2002. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lombok Barat,

jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat pada tahun 2005 mencapai 222.730 orang, meningkat dibandingkan tahun 2004 sebanyak 200.240 orang. Dari jumlah tersebut, wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari Eropa, disusul dari kawasan Asean, Asia Pasifik dan Amerika. Tempat terfavorit di Lombok Barat yang dikunjungi adalah Senggigi (81,36%), Gili Terawangan (10,74%), dan tempat lainnya seperti Gili Meno, Gili Air, Tanjung, Narmada, Sekotong dan Bayan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah tamu yang menginap di hotel, dan juga terkait dengan berbagai peristiwa keagamaan dan perayaan menjelang akhir tahun yang berimbas pula terhadap bergairahnya bisnis restoran.

Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran disebabkan oleh peningkatan penjualan kebutuhan barang sehari-hari seiring dengan datangnya bulan puasa, perayaan Idul Fitri, Natal dan tahun baru, khususnya bahan makanan dan barang sandang. Disisi lain, peningkatan jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan ini cukup memberikan andil terhadap pertumbuhan sektor ini, dimana pertumbuhan kreditnya secara y-o-y mencapai 15,08%.

### **Sektor Pengangkutan dan Komunikasi**

Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi dari seluruh sektor sebesar 7,15% dan mampu memberikan sumbangan yang cukup tinggi sebesar 0,75% dari total pertumbuhan ekonomi NTB. Di sepanjang tahun 2005, angka pertumbuhan sektor ini secara konsisten berada di atas 5%. Pertumbuhan yang terjadi pada sub sektor pengangkutan didorong oleh peningkatan arus barang dan penumpang sehubungan dengan datangnya bulan puasa yang dilanjutkan dengan perayaan Idul Fitri, Natal dan tahun baru serta peristiwa keagamaan lainnya dengan tingkat aktivitas yang cenderung meningkat yang dipengaruhi pula oleh pemberangkatan haji pada akhir triwulan IV-2005. Sub sektor angkutan darat memberikan *share* terbesar (7,26%) pada sektor ini, disusul oleh angkutan laut (0,63%) dan angkutan udara (0,27%). Meskipun mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini, pertumbuhan sektor ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2004 sebesar 7,62%. Pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2005 berdampak langsung terhadap perlambatan pertumbuhan di sektor ini. Sementara itu pada sub sektor komunikasi, semakin berkembangnya jaringan operator seluler dan ekspansi jangkauan wilayahnya di NTB (terutama di Pulau Sumbawa yang relatif sedikit jaringan transmisi telepon selulernya) seiring dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi masyarakat saat ini mendorong pertumbuhan di sub sektor komunikasi. Disamping itu, persaingan berbagai operator seluler untuk merebut pangsa pasar yang ada menyebabkan para operator seluler menawarkan berbagai macam variasi tawaran jasa jaringan komunikasi yang menguntungkan konsumen. Selama 3 tahun terakhir sektor ini selalu memberikan pertumbuhan dan kontribusi positif bagi perekonomian NTB.

### Sektor Bangunan

Setelah sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah sektor bangunan. Pada triwulan IV-2005, secara y-o-y, sektor ini tumbuh sebesar 5,13% dan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 0,34%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sektor ini secara konsisten mengalami pertumbuhan di atas 4%, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang berpotensi untuk terus berkembang. Disamping pengaruh dari realisasi pembangunan proyek-proyek pemerintah, pertumbuhan ini didorong pula oleh peningkatan pendanaan dari perbankan NTB, tercermin dari jumlah kredit yang disalurkan kepada sektor konstruksi meningkat sangat signifikan dan pada akhir triwulan IV-2005 telah mencapai 43,50% (y-o-y). Meskipun angka NPL sektor konstruksi cenderung tinggi (di atas 5%), tampaknya sektor ini cukup menarik untuk dibiayai perbankan karena prospek perkembangannya yang cukup baik. Hal ini terbukti dari tetap konsistennya pertumbuhan sektor ini meskipun pada triwulan IV-2005 terjadi kenaikan harga bahan bangunan yang cukup tinggi pasca kenaikan harga BBM.

### Sektor Lainnya

Sektor lainnya seperti industri pengolahan; listrik, gas & air bersih; keuangan; persewaan & jasa perusahaan serta jasa-jasa juga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian NTB. Pada triwulan IV-2005, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan angka pertumbuhan terendah dari seluruh sektor pembentuk PDRB NTB, di mana sektor ini hanya tumbuh sebesar 2,49% dan memberikan sumbangan yang relatif kecil sebesar 0,12%. Rendahnya pertumbuhan di sektor ini masih berkaitan dengan dampak dari kenaikan BBM, sehingga menyebabkan peningkatan biaya produksi, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Masalah ini menyebabkan kecenderungan industri-industri pengolahan tersebut lebih meningkatkan perhatiannya pada efisiensi biaya dan berdampak pada pengoptimalan tenaga kerja yang dimiliki dan bahkan ada yang mengurangi tenaga kerjanya. Peningkatan biaya produksi selanjutnya berdampak terhadap kenaikan harga jual dari produk-produk yang dihasilkan oleh industri pengolahan ini yang dipicu pula oleh kenaikan biaya transportasi untuk pendistribusiannya ke pasar.

Sementara itu, meskipun sektor listrik, gas dan air bersih mengalami pertumbuhan sebesar 3,63% pada triwulan ini, pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhannya pada triwulan IV-2004 yang mencapai 5,29%. Dengan angka pertumbuhan tersebut, sektor ini memberikan kontribusi terkecil terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, yaitu hanya sebesar 0,02%. Terkait dengan keterbatasan bahan bakar yang dipengaruhi pula oleh kenaikan harga bahan bakar menyebabkan keterbatasan *supply* baik listrik, gas dan air bersih.

Di sisi lain, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor dengan kontribusi terkecil kedua setelah sektor listrik, gas dan air bersih pada triwulan IV-2005. Dengan



pertumbuhan sebesar 4,51% sektor ini hanya mampu menyumbang 0,09% terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Pertumbuhan sektor bangunan turut berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ini, karena didorong oleh meningkatnya jasa sewa bangunan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap sektor ini. Sedangkan sektor jasa-jasa pada triwulan ini tumbuh sebesar 3,14% dan memberikan sumbangan 0,35%.

#### 4. Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Tenaga Kerja Indonesia di NTB memiliki peranan yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, dimana pemasukan dari TKI ini setiap tahun jumlahnya cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari potensi NTB yang telah dikenal sebagai salah satu daerah potensial pengirim TKI. Dampak positif lain dari potensi tersebut adalah memberikan peluang bagi berkembangnya lembaga PJTKI, yang pada tahun 2005 berjumlah lebih dari 150 PJTKI yang resmi terdaftar dan beroperasi di NTB. Kelonggaran yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dalam hal perizinan kepada calon PJTKI menjadi salah satu penyebab menjamurnya lembaga ini di NTB. Meskipun di sisi lain berdampak negatif antara lain semakin berkurangnya tenaga produktif di sektor pertanian atau bangunan serta dampak sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, sampai dengan triwulan IV-2005, terdapat sekitar 55.891 orang lowongan bekerja di luar negeri. Dari lowongan tersebut, jumlah TKI dari NTB yang ditempatkan bekerja di luar negeri hanya sebanyak 42.067 orang. Malaysia merupakan negara penampung TKI asal NTB terbesar, dimana sebanyak 32.196 orang (76,50%) dipekerjakan di negara ini. Saudi Arabia menempati urutan kedua yang mempekerjakan TKI NTB yang menampung sekitar 9.047 orang (21,50%), dan berikutnya adalah negara Korea dan Kuwait yang hanya mempekerjakan sedikit TKI dari NTB.

Dari penempatan TKI tersebut, menurut Dinas Tenaga Kerja Propinsi NTB, selama tahun 2005, jumlah *remittance* yang mengalir ke NTB mencapai Rp400,08 Miliar. Malaysia sebagai negara terbesar penampung TKI NTB memberikan kontribusi *remittance* tertinggi sebesar Rp208,92 Miliar (52,20%) dan dari Arab Saudi sebesar Rp182,73 Miliar (45,70%). Selain kedua negara tersebut, Kuwait, Singapura, Qatar dan Jepang juga berperan menyumbangkan *remittance* meskipun tidak cukup signifikan. Sedangkan berdasarkan data yang dihimpun dari perbankan di NTB yang memberikan jasa transfer *remittance* dari TKI NTB, hingga akhir triwulan IV-2005 jumlah *remittance* yang masuk sedikit lebih besar. Total *remittance* yang tercatat di perbankan NTB mencapai Rp503,82 Miliar, menurun jika dibandingkan dengan total *remittance* pada tahun 2004 yang mencapai Rp633,09 Miliar. Jika dibandingkan dengan jumlah *remittance* nasional, yang pada tahun 2005 mencapai US\$2,9 Miliar atau setara dengan Rp26,10 Triliun (asumsi nilai kurs per dollar AS sebesar Rp9.000,-), maka NTB menyumbang *remittance* sebesar 1,93% terhadap nasional. *Remittance* TKI pada tahun 2005 berasal dari TKI yang bekerja tersebar di berbagai negara yang



didominasi oleh negara-negara Timur Tengah dan Malaysia. Sebagian besar *remittance* berasal dari TKI yang bekerja di Arab Saudi dengan *remittance* sebesar Rp24,43 Miliar, disusul Malaysia sebesar 8,91 Miliar, Kuwait sebesar Rp4,79 Miliar, Amerika sebesar Rp1,63 Miliar, Australia sebesar Rp1,26 Miliar, dan negara-negara lainnya.

Sementara itu, lowongan bekerja di luar negeri, lowongan untuk pekerja laki-laki lebih dibutuhkan dibandingkan dengan perempuan dengan perbandingan 69,30 % dan 30,70%. Hal ini disebabkan karena lowongan yang tersedia lebih membutuhkan pekerja di bidang petani perkebunan, industri, konstruksi, *cleaning service*, peternakan dan operator. Sedangkan tenaga kerja perempuan lebih terbatas pada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, operator dan *cleaning service*. Penempatan jumlah TKI NTB disesuaikan dengan jumlah kebutuhannya, dimana jumlah tenaga kerja laki-laki yang ditempatkan sebanyak 76,70%, dan sisanya 23,30% adalah perempuan.

Pada umumnya TKI yang dikirim ke luar negeri memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, tercermin dari mayoritas pendidikannya adalah lulusan SD (76,10%), SLTP (20,38%) dan SLTA (3,10%). Masalah rendahnya tingkat pendidikan TKI tersebut menyebabkan pengetahuan dan keterampilan para TKI menjadi sangat terbatas dan pada saat bekerja akhirnya banyak yang mengalami kendala/kesulitan. Dengan demikian, pembekalan pengetahuan dan keterampilan baru para calon TKI menjadi aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian. Berkaitan dengan masalah tersebut, jika dilihat dari daerah asalnya, TKI di NTB, terbanyak berasal dari Lombok Tengah (34,50%), disusul oleh TKI dari Lombok Timur (30,30%) dan berikutnya dari Sumbawa (17,70%), Lombok Barat (16,30%), dan hanya sebagian kecil yang berasal dari Mataram dan Dompu.

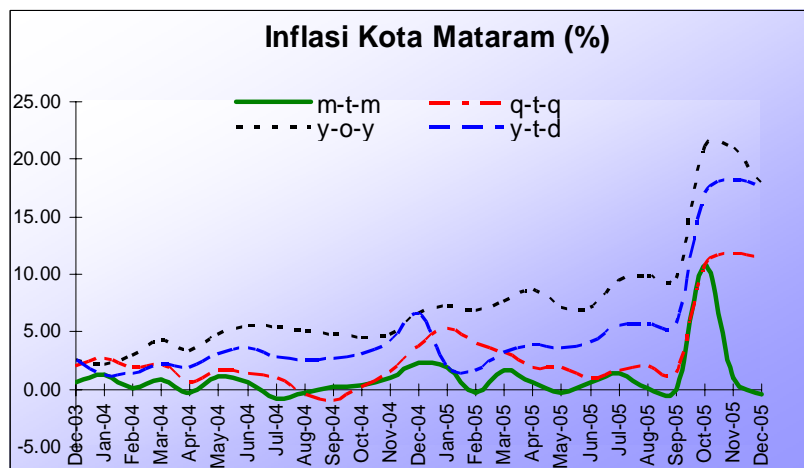
## Bab II

# Evaluasi Perkembangan Inflasi Propinsi Nusa Tenggara Barat

Pada triwulan IV-2005, laju inflasi kota Mataram menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Inflasi kota Mataram secara triwulanan pada triwulan IV-2005 mencapai angka 11,44%. Sementara itu, angka inflasi kumulatif (Januari s.d. Desember) atau tahunan (y-o-y) mencapai 17,73%. Trend inflasi selama triwulan IV-2005 ini menunjukkan angka tertinggi selama 2 tahun terakhir, namun secara bulanan (m-t-m), terjadi deflasi sebesar -0,40%, atau lebih besar dibandingkan deflasi yang terjadi pada akhir triwulan III-2005.

Dari grafik inflasi secara tahunan terlihat bahwa laju inflasi cenderung terus meningkat dalam 2 tahun terakhir dan terjadi kenaikan yang sangat luar biasa pada triwulan IV-2005, terutama pada bulan Oktober 2005 yang merupakan puncak tertinggi, hingga menyentuh angka 21,05%. Dilihat dari trendnya selama triwulan IV-2005, secara perlahan terjadi penurunan pada akhir triwulan ini dan pada bulan Desember 2005 menjadi sebesar 17,73%.

Grafik 2.1



Semua sumber data inflasi (dalam bab II buku ini) berasal dari BPS Pusat, diolah

Meskipun demikian, angka ini masih berada jauh di atas angka inflasi tahunan yang terjadi pada akhir triwulan III-2005, hanya sebesar 9,64%. Trend yang sama ditunjukkan pula oleh inflasi kumulatif (y-t-d) yang terus menunjukkan peningkatan sejak awal tahun 2005, hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2005 sebesar 18,20%, sedangkan pada akhir tahun yaitu Desember 2005 sebesar 17,73%. Lonjakan yang sangat tajam pada triwulan ini juga tampak apabila mengamati trend inflasi secara triwulanan (q-t-q) selama 2 (dua) tahun terakhir, dimana inflasi triwulanan Kota Mataram mencapai 11,44%, atau meningkat sangat tinggi dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,40%. Tingginya inflasi yang terjadi pada tahun 2005 lebih disebabkan oleh kenaikan harga BBM selama tahun 2005. Yang terkuat pengaruhnya adalah kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan Oktober 2005 (tahap kedua), setelah kenaikan pertama diberlakukan pada bulan Maret 2005. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan harga barang di NTB karena sebagian besar barang-barang kebutuhan masyarakat (terutama barang konsumsi) diimpor dari luar daerah. Berbeda dengan inflasi secara bulanan, kota Mataram pada triwulan IV-2005 mengalami deflasi sebesar -0,40%. Deflasi ini terjadi lagi setelah sebelumnya pernah terjadi pada bulan Februari, Mei dan September 2005 yang masing-masing menyentuh angka -0,25%, -0,27% dan -0,06%.

Inflasi triwulanan (q-t-q) pada akhir triwulan IV-2005 tercatat sebesar 11,44%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,40%. Kenaikan inflasi triwulanan pada triwulan ini dipengaruhi oleh inflasi seluruh kelompok komoditi dengan kisaran angka dari 0,63% sampai 32,48%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 32,48% yang sekaligus sebagai penyumbang tertinggi sebesar 4,16% dari total inflasi. Selanjutnya berturut-turut adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 13,43% sebagai penyumbang tertinggi kedua sebesar 3,35%, diikuti oleh kelompok bahan makanan sebesar 10,03% yang menyumbang 2,94%. Berikutnya kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga yang mengalami inflasi sebesar 7,19% dan menyumbang 0,30%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 2,90% yang menyumbang 0,56%, sedangkan inflasi terendah terjadi pada kelompok komoditi lainnya hanya berada dibawah 2%, yaitu kelompok sandang dan kelompok kesehatan masing-masing sebesar 1,97% dan 0,63% dengan sumbangan masing-masing sebesar 0,10% dan 0,03%.

Tingginya sumbangan inflasi dari kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dilatarbelakangi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005 terutama yang terjadi di bulan Oktober 2005. Dampak secara langsung dirasakan oleh sektor transportasi yang direspon dengan naiknya tarif angkutan umum dalam kota maupun antar kabupaten dalam propinsi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama setelah kenaikan terjadi. Pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kenaikan masih dipicu masalah yang sama. Naiknya harga rumah dan bahan bangunan seperti semen, kayu, besi dan juga ongkos tukang sebagai *second round inflation effect* karena adanya efek berantai yang menyebabkan peningkatan biaya produksi (*cost push inflation*) memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingkat inflasi pada kelompok tersebut. Sementara itu keterbatasan supply listrik dan gas juga memicu peningkatan harga dan dipengaruhi pula oleh biaya produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar.

Di sisi lain, meningkatnya permintaan masyarakat (*demand pull inflation*) terhadap bahan makanan seperti beras, tomat sayur, daging sapi, cabe merah, terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru, merupakan faktor penyebab utama kenaikan harga bahan makanan.

Disamping itu berkurangnya produksi dan persediaan hasil panen dari produk-produk pertanian (faktor musiman), khususnya untuk komoditi padi (beras), serta adanya isu rencana impor beras oleh pemerintah semakin mempertajam kenaikan harga beras pada triwulan ini. Memasuki musim tanam dan faktor tingginya curah hujan menjelang akhir tahun membatasi produktivitas di sektor pertanian.

Meskipun telah beberapa bulan berlalu sejak terjadinya serangan virus yang menyerang hewan unggas seperti burung dan ayam dan virus antrax pada hewan ternak di mana sentra peternakan yang berada di Kabupaten Sumbawa dinyatakan sebagai endemik, namun hingga saat ini masih terdapat beberapa kasus sehubungan dengan penyebaran virus tersebut sehingga meninggalkan rasa trauma pada sebagian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan permintaan/konsumsi terhadap ikan lebih tinggi dari pada peningkatan konsumsi akan daging, karena ada kecenderungan masyarakat mengalihkan konsumsi daging kepada konsumsi ikan, padahal supply ikan relatif terbatas karena faktor musim. Dari kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, kenaikan harga terutama terjadi pada biaya jasa pendidikan yaitu biaya sekolah untuk akademi/ perguruan tinggi.

Sedangkan pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, yang cukup tinggi kenaikannya adalah harga bubur kacang hijau, plecing kangkung, roti, abon, air kemasan, kopi, minuman ringan dan rokok (rokok kretek dan rokok putih). Imbas kenaikan harga BBM dirasakan pula oleh industri pengolahan yang menghasilkan produk-produk tersebut. Disamping itu, prosentase komponen biaya distribusi dalam struktur biaya produksi lebih besar dibandingkan dengan komponen energi dan biaya tenaga kerja. Hal ini mendorong perlunya suatu upaya perbaikan atau efisiensi dalam sistem distribusi.

Secara tahunan (y-o-y), angka inflasi pada akhir triwulan IV-2005 ini tercatat sebesar 17,73%, meningkat sangat tajam dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, hanya sebesar 6,61%. Berdasarkan urutan kelompok komoditi yang mengalami kenaikan harga, tidak berbeda dengan inflasi triwulanan. Kelompok komoditi yang mengalami inflasi tertinggi secara tahunan adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 50,49%, diikuti oleh kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar sebesar 18,51%. Selanjutnya adalah kelompok bahan makanan sebesar 14,45%. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengikuti dengan angka inflasi sebesar 10,22%. Kelompok lainnya dengan kisaran angka inflasi di bawah 10% adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok kesehatan dan kelompok sandang masing-masing sebesar sebesar 8,44%, 7,63% dan 6,57%. Berdasarkan sumbangannya terhadap inflasi, penyumbang tertinggi dari total inflasi adalah dari kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 6,01%, kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar sebesar 4,67% dan kelompok bahan makanan sebesar 4,30%.

Pengaruh kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM menyebabkan tingginya sumbangan inflasi dari kelompok transportasi, terutama pada harga bensin dan minyak tanah. Hal ini

berdampak pula pada meningkatnya tarif angkutan dalam kota. Di kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar, sumbangan inflasi terutama bersumber dari ongkos tukang bukan mandor, semen dan kontrak rumah. Disamping itu naiknya harga BBM berpengaruh terhadap terbatasnya supply listrik karena faktor biaya produksi yang meningkat. Sementara itu turunnya produksi dan persediaan hasil panen sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemenuhan permintaan akan bahan makanan terutama beras dan banyaknya kebutuhan konsumsi yang diimpor dari luar daerah merupakan salah satu penyebab tingginya sumbangan angka inflasi dari kelompok bahan makanan. Bagi para petani kenaikan harga pupuk dan biaya produksi lainnya serta keterbatasan persediaan pupuk dan bibit cukup berpengaruh terhadap hasil produksinya.

Tabel 2.1

Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan IV-2005		Sumbangan Thd Inflasi
No.	Sub Komoditi	(%)
1	Bensin	3.48
2	Minyak tanah	2.34
3	Beras	0.70
4	Angkutan dalam kota	0.41
5	Tomat sayur	0.37
6	Akademi / perguruan tinggi	0.29
7	Daging sapi	0.29
8	Cabe merah	0.23
9	Tukang bukan mandor	0.18
10	Semen	0.18

Dari tabel 2.5 dapat dilihat 10 komoditi penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram pada triwulan IV-2005 (q-t-q). Sumbangan terbesar berasal dari komoditi bensin yang menyumbang 3,48% terhadap total inflasi, disusul oleh minyak tanah sebesar 2,34%, beras sebesar 0,70%, angkutan dalam kota sebesar 0,41% dan seterusnya.

Meskipun pada triwulan ini telah terjadi peningkatan angka inflasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya dan terjadi pada sebagian besar komoditi, masih terdapat beberapa komoditi yang menyumbang deflasi, meskipun tidak terjadi pada banyak komoditi. Hanya 3 (tiga) komoditi yang tercatat mengalami deflasi terbesar pada triwulan ini, dapat dilihat pada tabel 2.6. Komoditi tersebut adalah daging ayam ras, telur ayam ras dan anggur dengan sumbangan deflasi masing-masing sebesar -0,03%, 0,02% dan 0,01%. Deflasi ini lebih dipengaruhi oleh menurunnya tingkat permintaan masyarakat terhadap komoditi-komoditi tersebut. Sikap hati-hati konsumen dalam mengkonsumsi daging ayam ras dan telur ayam ras yang dilatarbelakangi oleh penyebaran virus flu burung hingga saat ini menjadi penyebab utama menurunnya harga komoditi

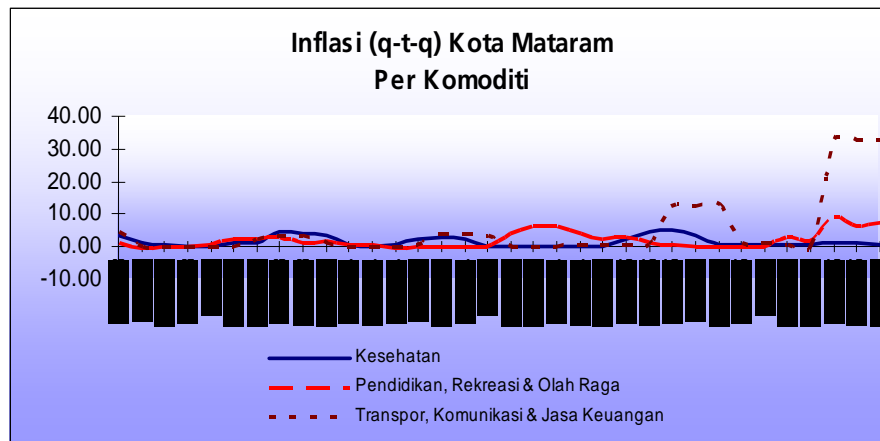
tersebut. Demikian pula dengan konsumsi anggur yang mengalami penurunan pada triwulan ini sehingga mendorong penurunan harga jualnya. Pengaruh faktor-faktor tersebut cukup besar, mengingat pada triwulan ini bertepatan dengan berbagai perayaan seperti Idul Fitri, Natal dan tahun baru, saat biasanya harga hampir seluruh bahan makanan mengalami kenaikan.

Tabel 2.2

Komoditi Penyumbang Deflasi Terbesar di Kota Mataram Triwulan IV-2005		Sumbangan Thd Inflasi
No.	Sub Komoditi	(%)
1	Daging ayam ras	-0.03
2	Telur ayam ras	-0.02
3	Anggur	-0.01

Grafik 2.2 menggambarkan trend inflasi triwulanan menurut jenis komoditi di Kota Mataram. Setelah sebelumnya kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan cenderung stabil

Grafik 2.2

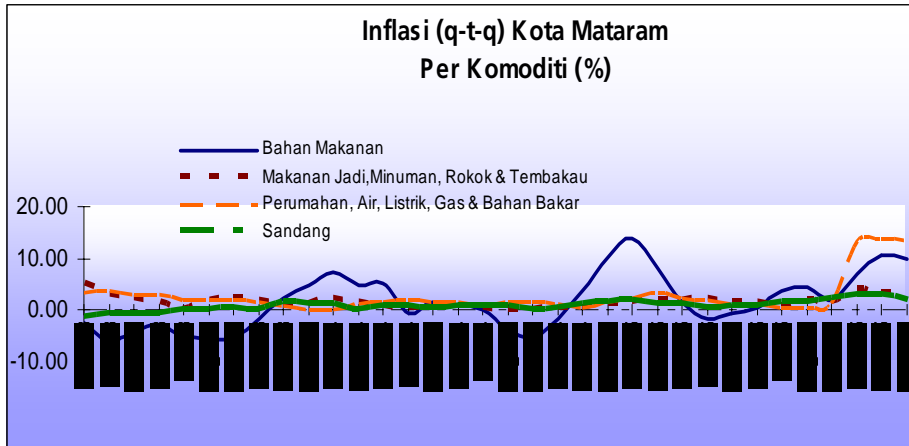


pada kisaran angka inflasi yang rendah, angkanya terlihat berfluktuasi cukup tinggi pada saat diberlakukannya kenaikan harga BBM yaitu pada triwulan I dan IV-2005 sehingga menyentuh level tertingginya. Demikian pula dengan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga yang cenderung bergerak dalam batasan *range* angka yang tidak terlalu tinggi, dan sepanjang tahun 2005 baru terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada triwulan IV-2005. Sedangkan kelompok kesehatan cenderung lebih stabil, meskipun terlihat adanya sedikit peningkatan pada triwulan ini.

Sementara itu, dari grafik 2.3 juga dapat dilihat bahwa setelah mengalami peningkatan pada triwulan I & II-2005, inflasi komoditi bahan makanan kembali mengalami lonjakan yang cukup tinggi

pada triwulan IV-2005. Cenderung berfluktuasinya inflasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor musiman yang menjadi karakteristik daerah NTB, seperti faktor curah hujan yang berpengaruh pula terhadap musim tanam dan musim panen untuk produk pertanian.

Grafik 2.3



Demikian pula dengan bulan-bulan tertentu saat gelombang pasang/surut mempengaruhi hasil penangkapan ikan oleh nelayan. Kondisi daerah peternakan yang lebih subur di saat musim hujan tiba di sebagian besar wilayah Pulau Sumbawa juga turut memberikan pengaruh. Berbeda dengan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang cenderung lebih stabil pada kisaran angka yang cukup rendah, namun pada triwulan ini mengalami peningkatan yang sangat tajam dan mencapai posisi tertinggi sejak 2 (dua) tahun terakhir, terlihat akan cenderung terus meningkat sebagai dampak dari efek berantai yang ditimbulkan pasca kenaikan harga BBM. Faktor yang paling dominan untuk menjelaskan alasan kenaikan ini adalah terjadinya peningkatan pada biaya produksi. Demikian pula kecenderungan yang sama terjadi pada kelompok barang sandang dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, meskipun terjadi kenaikan pada triwulan ini, namun tidak mengalami lonjakan yang berarti.

Pada triwulan IV-2005 ini, laju inflasi tahunan di Kota Mataram mencapai 17,73% berada di atas laju inflasi nasional yang sebesar 17,11%. Apabila dibandingkan dengan wilayah regional terdekat, inflasi kota Mataram pada triwulan ini adalah yang tertinggi di antara daerah lainnya seperti Kediri (16,84%), Jember (16,68%), Malang (15,74%), Kupang (15,16%), Surabaya (14,12%), dan terendah di Denpasar (11,30%). Hal ini lebih dipengaruhi oleh karakteristik wilayah NTB (Lombok dan Sumbawa) yang dikelilingi oleh lautan yang memisahkannya dengan daerah lain di Indonesia, sehingga kenaikan harga BBM sangat berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian dan tingkat harga barang-barang secara umum, mengingat sebagian besar kebutuhan konsumsi masyarakat diimpor melalui perdagangan antar daerah yang sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya transportasi.

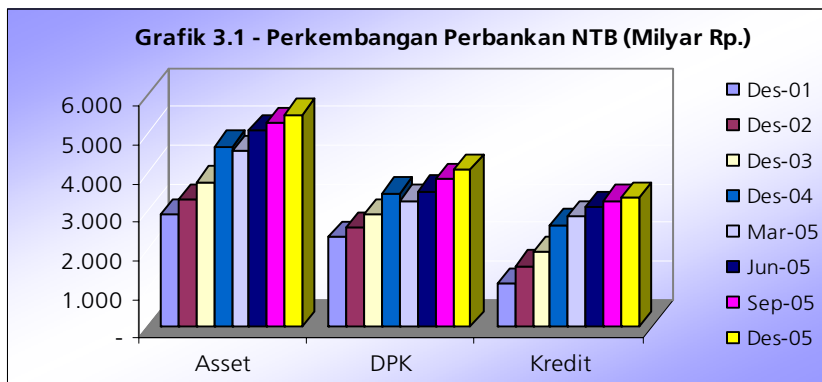


# BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

## 3.1. Kinerja Perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Perkembangan perbankan di Wilayah Kerja Bank Indonesia Mataram yang mencakup seluruh Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Triwulan IV 2005, baik secara triwulanan maupun secara tahunan (y-o-y) relatif cukup baik, terlihat dari adanya peningkatan asset sebesar 4,36% (q-t-q) atau 17,90% (y-o-y) menjadi sebesar Rp5,50 triliun; peningkatan sumber dana masyarakat secara triwulanan sebesar 6,53% atau 17,52% (y-o-y) menjadi Rp4,07 triliun dan penyaluran kredit (berdasarkan bank pelapor) sebesar 2,89% (q-t-q) atau 27,04% secara tahunan menjadi Rp3,35 triliun. Meskipun dari sisi keuntungan (rasio ROA) sedikit mengalami penurunan sebagai dampak kenaikan biaya-biaya akibat kenaikan BBM yang tercermin dari rasio BOPO dan CER sedikit mengalami peningkatan. Begitu pula dengan rasio NPL yang cenderung mulai kembali meningkat, sebagai akibat kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan biaya produksi dan mempengaruhi pembayaran angsuran debitur kepada perbankan di wilayah ini.

Dari sisi kelembagaan pada posisi triwulan laporan, jumlah kantor bank umum pelapor bertambah sebanyak 1 kantor yaitu pembukaan kantor cabang PT.BRI Syariah dan peningkatan status dari kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang sebanyak 1 kantor yaitu PT.Bank NTB Cabang Taliwang, penambahan 4 kantor kas PT.Bank BTN dan 1 kantor unit PT.BRI Mataram, sehingga jumlah kantor bank yang ada di NTB menjadi sebanyak 132 kantor terbagi 1 kantor pusat, 32 kantor cabang (28 bank konvensional & 4 bank syariah) dan sisanya kantor cabang pembantu, kantor kas dan kantor unit. Sedangkan jumlah BPR tidak berbeda dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebanyak 65 kantor pusat BPR (46 BPR dimiliki oleh Pemda dan 19 BPR milik swasta) dan 3 kantor cabang.



Sumber : Data perbankan & sistem pembayaran dalam bab ini berasal dari BI Mataram, diolah



Peningkatan penghimpunan dana masyarakat atau lazim disebut dana pihak ketiga (DPK) sebesar 6,53% secara triwulanan atau 17,52% secara tahunan, diperkirakan pengaruh dari meningkatnya suku bunga dan adanya deposit/nasabah baru, tercermin dari meningkatnya jumlah nominal kepemilikan DPK dari perseorangan yang ditempatkan pada bank umum meningkat sebesar 8,83% (q-t-q) atau 13,62% (y-o-y). Peningkatan DPK terutama bersumber dari deposito perseorangan yang meningkat sebesar 22,35% (q-t-q) dan 48,70% (y-o-y). Selain itu karena adanya aliran dana masuk dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui bank umum yang meningkat sebesar 220,35% (q-t-q) atau 39,25% (y-o-y), meskipun disisi lain dana pihak ketiga milik pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar 54,77% (q-t-q) karena adanya pembayaran atas realisasi proyek-proyek pemda dan diperkirakan masih terus berlanjut pada awal triwulan berikutnya.

Komposisi dana pihak ketiga berdasarkan jenis simpanannya, pada posisi triwulan laporan relatif tidak berbeda dengan triwulan sebelumnya yaitu masih terkonsentrasi dalam bentuk tabungan dengan pangsa sebesar 53,17%, disusul giro 24,18% dan sisanya deposito 22,65%.

Sementara itu, pertumbuhan *outstanding* kredit perbankan di penghujung tahun 2005 hanya sebesar 2,89% dibandingkan dengan triwulanan sebelumnya atau sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 3 triwulan sebelumnya yang rata-rata sebesar 7,28%, diperkirakan karena sektor riil masih perlu waktu untuk melakukan penyesuaian aktivitas bisnisnya sebagai dampak kenaikan BBM yang mengimbas pada naiknya suku bunga simpanan meskipun belum mempengaruhi suku bunga pinjaman. Namun secara tahunan (y-o-y) *outstanding* kredit perbankan tumbuh sebesar 27,04% melampaui angka pertumbuhan kredit nasional sebesar 22%.

Pangsa kredit perbankan berdasarkan jenis penggunaannya, relatif tidak berbeda dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya, dimana masih didominasi oleh kredit konsumsi yang menguasai pangsa mencapai 51,99%, disusul modal kerja sebesar 36,86% dan sisanya sebesar 11,15% ditempati kredit investasi. Pangsa kredit modal kerja dan investasi dalam 1 (satu) tahun terakhir terus meningkat yaitu masing-masing sebesar 2,66% dan 1,60%, sedangkan kredit konsumsi meskipun menguasai pasar/*leading sector* namun pangasanya cenderung mulai menurun sekitar 4% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya, hal ini diperkirakan mulai ketatnya persaingan pada sektor ini. Disisi lain, peningkatan kredit modal kerja terutama terjadi pada sektor perdagangan.

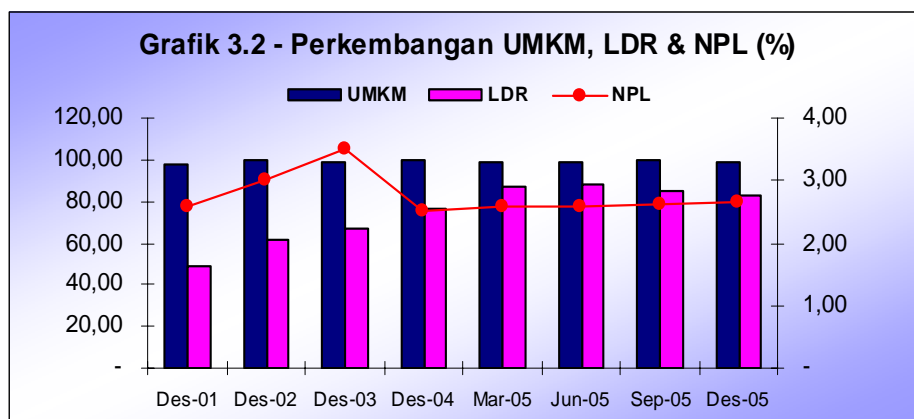
Kredit yang disalurkan menurut kategori 10 (sepuluh) sektor ekonomi yang ada, komposisi terbesar terserap pada sektor lain-lain yang mencapai porsi sebesar 52,50%, disusul sektor perdagangan sebesar 33,74% dan sektor pertanian dengan pangsa hanya 4,47% serta sisanya disalurkan pada 7 (tujuh) sektor ekonomi lainnya. Komposisi ini sejalan dengan kredit yang disalurkan menurut jenis penggunaannya, dimana pangsa kredit konsumsi yang mendominasi pada sektor lain-lain juga mengalami penurunan sebesar 4,73% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Diperkirakan penurunan tersebut bergeser ke sektor perdagangan yang pangasanya justru

meningkat sebesar 4,03% dan sektor pertanian yang meningkat 1,30%. Penyaluran kredit pada kedua sektor tersebut semakin menjadi perhatian perbankan, karena cukup prospektif terutama sektor pertanian yang dapat menyerap tenaga kerja meskipun risiko bisnis disektor ini dianggap relatif tinggi.

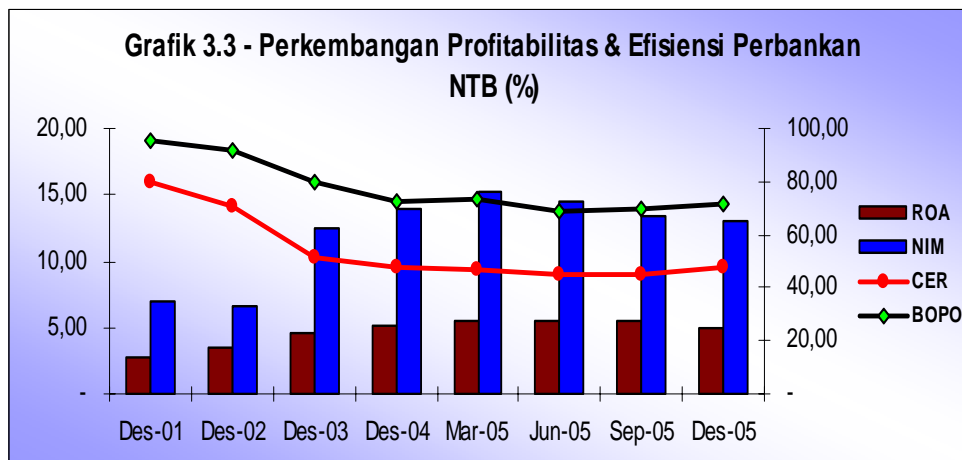
Sementara itu, portofolio total kredit perbankan pada triwulan laporan yang disalurkan pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) khususnya pada sektor produktif baru mencapai 47,24% dari total kredit yang diberikan atau meningkat sebesar 43,46% dibandingkan dengan posisi akhir 2004 yang menandakan aktifitas ekonomi pada sektor UMKM semakin meningkat.

Rasio perbandingan jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah dana masyarakat atau *Loan to Deposit Ratio (LDR)* pada posisi triwulan laporan tercatat sebesar 82,43% atau meningkat dibanding dengan akhir tahun 2004 sebesar 6,28% dari sebesar 76,25%, namun dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya menurun sebesar 2,91% dari 85,34%. Penurunan LDR secara triwulanan disebabkan peningkatan sumber dana masyarakat secara nominal lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kredit.

Angka rasio kredit bermasalah/non lancar pembayarannya atau lebih dikenal dengan istilah rasio *Non Performing Loan (NPL)* secara *gross* pada triwulan IV 2005 tercatat sebesar 2,66% atau meningkat sebesar 0,06% (2,60%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan meningkat 0,16% (2,51%) dari posisi akhir tahun 2004. Peningkatan NPL pada sektor lain-lain (lebih dominan konsumsi) dan sektor perdagangan serta jasa-jasa dunia usaha menjadi penyebab utama peningkatan angka rasio NPL di NTB. Peningkatan harga-harga sebagai dampak meningkatnya harga BBM berpengaruh terhadap kemampuan membayar debitur yang memiliki kredit konsumsi di perbankan yang kecenderungannya semakin menurun terutama untuk membiayai kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedangkan pada sektor perdagangan dan jasa-jasa dunia usaha diperkirakan omsetnya (produksi) mengalami penurunan sebagai dampak dari kenaikan BBM yang berpengaruh terhadap penurunan daya beli dan permintaan masyarakat, disisi lain ongkos operasional meningkat sehingga mengalami kesulitan membayar angsuran kredit secara tepat waktu.



Profitabilitas perbankan yang menunjukkan kemampuan perbankan untuk menghasilkan laba sampai dengan akhir 2005 masih relatif cukup baik meskipun mengalami penurunan dibandingkan akhir 2004 maupun triwulan sebelumnya, penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional terutama biaya dana (*cost of fund*) akibat dari kenaikan suku bunga deposito sebagai dampak kenaikan BI Rate sebagai konsekuensi kondisi laju inflasi yang relatif tinggi pada saat ini, terutama bersumber dari *administered goods*. Rasio profitabilitas pada triwulan laporan masing-masing adalah rasio ROA (*Return On Assets*) tercatat sebesar 5,03%, CER (*Cost Efficiency Ratio*) sebesar 47,71%, BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) sebesar 71,97% dan rasio NIM (*Net Interest Margin*) sebesar 13,07%. Dari gambar rasio-rasio tersebut terlihat bahwa penurunan rasio ROA disebabkan oleh peningkatan rasio BOPO dan CER.



### 3.2. Bank Umum

Kinerja Bank Umum pada triwulan IV 2005 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q) dan selama tahun 2005 (y-t-d) cukup baik, terlihat dari peningkatan indikator utama bank seperti pertumbuhan asset yang meningkat masing-masing sebesar 4,39% (q-t-q) dan 17,93% (y-t-d); penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 6,57% (q-t-q) dan 17,50% (y-t-d); *outstanding* kredit yang diberikan (berdasarkan lokasi kantor bank pelapor) sebesar 2,95% (q-t-q) dan 27,17% (y-t-d); dan meningkatnya laba bank sebelum pajak sebesar 29,70% (q-t-q) dan 15,38% (y-t-d).

#### 3.2.1. Kelembagaan

Jumlah Bank Umum yang beroperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan laporan sebanyak 15 (lima belas) bank sama dengan triwulan sebelumnya termasuk 1 (satu) kantor pusat PT.Bank NTB, namun jumlah kantor bank pelapor meningkat sebanyak 2 (dua) kantor, akibat adanya penambahan 1 (satu) kantor PT. BRI Syariah yang berlokasi di Kota Mataram dan peningkatan status dari Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Kantor Cabang PT. Bank NTB Taliwang serta adanya pembukaan 5 kantor kas (4 dari BTN dan 1 dari BRI), peningkatan jumlah

kantor cabang bank pelapor dan kantor kas di Propinsi Nusa Tenggara Barat menandakan bahwa iklim berinvestasi di propinsi ini masih cukup baik khususnya di bisnis keuangan/bank sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi (4,67% diluar pertambahan) yang tercermin dari membaiknya pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan jumlah kantor bank di Propinsi NTB menurut kategori bank sebanyak 15 kantor (5 bank pemerintah & 10 bank swasta) dengan jumlah kantor yang terdiri dari 32 kantor cabang (bank pelapor) dengan 4 kantor cabang syariah dan 28 kantor cabang konvensional, kantor cabang pembantu (KCP) tercatat sebanyak 88 kantor yang terdiri dari 36 KCP bank umum lainnya dan 52 kantor unit BRI, dan kantor kas sebanyak 11 kantor. Sementara itu jumlah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang ada di NTB sampai dengan triwulan IV 2005 tercatat sebanyak 101 buah, meningkat sebanyak 5 buah ATM dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 96 buah.

### **3.2.2. Asset**

Total asset Bank Umum sampai dengan posisi triwulan IV 2005 tercatat sebesar Rp5,23 triliun atau meningkat sebesar 4,39% dibandingkan triwulan sebelumnya (q-t-q) atau meningkat sebesar 17,93% dibandingkan dengan posisi Desember 2004. Peningkatan asset Bank Umum tersebut sejalan dengan peningkatan atas penghimpunan dana masyarakat dan peningkatan penyaluran kredit.

Sedangkan komposisi asset Bank Umum berdasarkan lokasi kantor bank, masih terkonsentrasi di ibukota Propinsi NTB yaitu di Kota Mataram (termasuk Kabupaten Lombok Barat) sebesar 62,75%, disusul Kabupaten Sumbawa (termasuk Sumbawa Barat) sebesar 10,72%, Kabupaten Bima (termasuk Kota Bima) sebesar 9,75%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 6,64%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 6,30% dan terakhir Kabupaten Dompu sebesar 3,85%.

### **3.2.3. Dana Pihak Ketiga**

Penghimpunan dana masyarakat atau lazim disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum sampai dengan posisi triwulan laporan mencapai angka sebesar Rp3,92 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 943.078 (secara triwulanan meningkat sebanyak 0,11 rekening atau meningkat 3,20% secara tahunan). Sedangkan dari sisi nominal meningkat sebesar 6,57% dibandingkan triwulan sebelumnya atau secara tahunan meningkat sebesar 17,50%. Peningkatan DPK Bank Umum diperkirakan disebabkan oleh pengaruh dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, disisi lain juga pengaruh dari meningkatnya suku bunga simpanan sebagai dampak kenaikan suku bunga BI Rate yang mendorong masyarakat untuk lebih suka menyimpan dananya di lembaga perbankan dan menunda sementara konsumsi dan investasi dalam jangka panjang, terlihat dari besarnya komposisi peningkatan sumber dana yang berasal dari perseorangan sebesar 60,27% dari peningkatan seluruh dana pihak ketiga bank umum. Disamping itu adanya aliran sumber dana dari pemerintah pusat

berupa dana perimbangan, terlihat dari peningkatan golongan pemilik sumber dana dari sektor pemerintah yang secara tahunan meningkat sebesar 36,35%, meskipun secara triwulanan menurun sebesar 6,15% yang disebabkan oleh adanya pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah direalisasikan pada triwulan laporan.

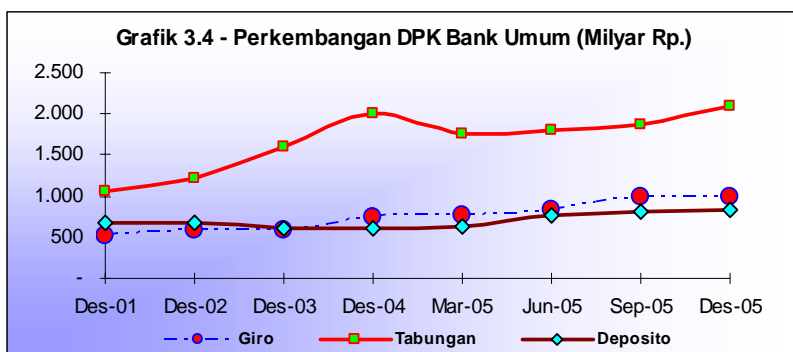
Sementara itu, dari DPK yang berhasil dihimpun Bank Umum, Bank Pemerintah masih mendominasi pangsa dengan komposisi sebesar 76,86%, sedangkan sisanya sebesar 23,14% berhasil dihimpun oleh Bank Swasta, mengingat jaringan bank umum pemerintah lebih besar dan tersebar luas di berbagai daerah.

Berdasarkan lokasi kantor bank yang beroperasi di wilayah Propinsi NTB sampai dengan triwulan laporan, konsentrasi terbesar penghimpunan dana masyarakat masih berada di Kota Mataram mencapai angka sebesar 65,05% mengingat kegiatan ekonomi masih didominasi di ibukota propinsi ini, selanjutnya disusul Kabupaten Sumbawa 12,60%, kabupaten Bima 8,49%, Kabupaten Lombok Timur 7,10%, Kabupaten Lombok Tengah 3,92% dan Kabupaten Dompu sebesar 2,84%.

Komposisi DPK Bank Umum posisi triwulan laporan berdasarkan bentuk simpanan masih didominasi jenis Tabungan sebesar 53,49%, disusul Giro sebesar 25,07% dan Deposito sebesar 21,44%. Komposisi dana murah tersebut menyebabkan bank umum diperkirakan masih dapat menahan/menekan laju suku bunga kredit, namun tidak dapat menahan meningkatnya biaya dana (*cost of fund*) sebagai dampak kenaikan suku bunga simpanan, terlihat dari rasio *Net Interest Margin* (NIM) yang cenderung menurun (posisi akhir 2005 sebesar 12,45% dari 13,38% posisi akhir 2004) sejalan dengan meningkatnya rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

Sementara itu, karakteristik masyarakat di NTB cenderung untuk menyimpan dananya dalam bentuk tabungan dari pada bentuk simpanan lainnya, karena lebih sering digunakan untuk menjaga likuiditas/transaksi kelancaran pembayaran karena nilai nominalnya yang relatif kecil secara rata-rata. Begitu juga simpanan dalam bentuk deposito juga lebih cenderung untuk memilih yang berjangka waktu singkat, terlihat dari komposisi jumlah deposito yang berjangka waktu 1 bulan pada triwulan laporan mencapai angka 71,73%.

Dari sisi golongan kepemilikan, penghimpunan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perseorangan menguasai pangsa sebesar 74,74%, disusul sektor pemerintah sebesar 17,33% dan sisanya sektor swasta lainnya (seperti perusahaan swasta, dana pensiun dll) sebesar 7,93%.



### **3.2.3.1. Giro**

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Umum dalam bentuk Giro pada posisi triwulan laporan tercatat sebesar Rp983 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 12.955, secara nominal terjadi peningkatan sebesar 33,42% dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan sebesar 1,45% dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya. Peningkatan secara tahunan terutama bersumber dari adanya aliran dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terealisasi di penghujung tahun 2005, terlihat dari peningkatan sektor pemerintah (berdasarkan golongan pemilik) dengan komposisi sebesar 69,92% dari total peningkatan sebesar Rp246 miliar. Sedangkan terjadinya penurunan giro dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, bersumber dari pembayaran realisasi proyek-proyek pemerintah daerah.

Sementara itu, penghimpunan DPK dalam bentuk giro, sama dengan kondisi triwulan sebelumnya yang masih didominasi oleh bank pemerintah yang mencapai angka sebesar 91,62% dan sisanya sebesar 8,38% oleh bank swasta. Berdasarkan lokasi kantor bank, dana pihak ketiga terbesar berada di Kota Mataram (termasuk Kabupaten Lombok Barat) yang mencapai sebesar 60,73%, sisanya terbagi pada 5 Kabupaten lainnya.

Berdasarkan kepemilikan rekening giro pada bank umum di NTB, sebagian besar (64,23%) dimiliki oleh sektor pemerintah (pusat 52,06%, pemda 35,44% dan lainnya 12,5%), sedangkan sektor swasta menguasai pangsa sebesar 35,40% (perorangan 49,43% dan perusahaan lainnya termasuk swasta lainnya sebesar 50,57%) dan sisanya 0,37% dimiliki oleh bukan penduduk.

### **3.2.3.2. Tabungan**

Sumber dana bank yang berasal dari Tabungan pada posisi triwulan laporan telah mencapai angka sebesar Rp2,10 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 921.358. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q) secara nominal mengalami peningkatan sebesar 11,88% dan meningkat 5,09% dibandingkan dengan akhir tahun 2004.

Penghimpunan Tabungan terbesar dilakukan oleh Bank Pemerintah dengan prosentase sebesar 77,09% dan sisanya oleh Bank Swasta sebesar 22,91%. Sementara itu sebaran jumlah tabungan berdasarkan lokasi kantor bank juga masih terjadi di Kota Mataram (termasuk Kabupaten Lombok Barat) yang mencapai angka sebesar 58,31%, sedangkan sisanya terjadi pada 5 kabupaten lainnya dengan komposisi terkecil berada di Kabupaten Dompu yaitu sebesar 2,90%.

Sedangkan berdasarkan kepemilikannya, sektor perseorangan masih mendominasi yang menguasai pangsa sebesar 97,52%, disusul sektor swasta lainnya (perusahaan lainnya, lembaga pendidikan, koperasi dll) sebesar 2,10% dan sisanya sektor pemerintah (didominasi badan-badan dan lembaga pemerintah).



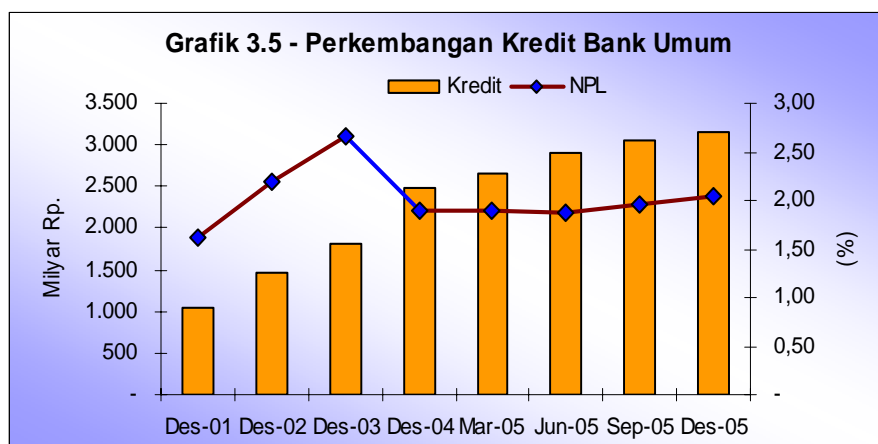
### 3.2.3.3. Deposito

Penempatan dana masyarakat dalam bentuk deposito pada posisi triwulan IV 2005 tercatat sebesar Rp841 miliar atau meningkat sebesar 4,16% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-t-q) atau meningkat sebesar 39,04% dibandingkan dengan akhir tahun 2004 (y-t-d). Peningkatan deposito diperkirakan terjadi akibat meningkatnya suku bunga deposito (suku bunga tertinggi menjadi 13,50%) karena pengaruh peningkatan suku bunga BI Rate menjadi 12,75%.

Sementara itu, komposisi penghimpunan Deposito sebesar 59,03% (triwulan sebelumnya 66,58%) terserap ke Bank Pemerintah sedangkan sisanya sebesar 40,97% (triwulan sebelumnya 33,42%) ke Bank Swasta. Tampak bahwa mulai terjadi persaingan yang ketat dalam merebut simpati nasabah, terlihat dari mulai menurunnya pangsa pasar bank pemerintah yang beralih ke bank swasta.

Sementara itu sebaran penghimpunan deposito berdasarkan lokasi kantor bank sebesar 86,92% terjadi di Kota Mataram. Sedangkan menurutnya kepemilikannya, sektor swasta menguasai pangsa sebesar 94,05% (lebih didominasi perseorangan sebesar 90,14%), sisanya sektor pemerintah.

### 3.2.4. Penyaluran Kredit Bank Umum di Propinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Bank Pelapor



Baki debit (*out standing*) penyaluran kredit Bank Umum sampai dengan triwulan laporan tercatat sebesar Rp3,15 triliun atau meningkat sebesar 2,95% (q-t-q) dan meningkat sebesar 27,17% dibandingkan dengan akhir tahun 2004. Hal ini mencerminkan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor riil, yang juga dapat dilihat dari penggunaan plafond kredit yang telah disetujui mencapai sebesar 88,09% atau meningkat sebesar 0,50% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah debitur juga meningkat seiring dengan indikasi peningkatan jumlah rekening debitur yang mencapai angka 154.983 rekening atau meningkat sebesar 1,80% dari triwulan III 2005. Pertumbuhan kredit pada triwulan IV secara triwulanan sepanjang tahun 2005 merupakan yang terendah yaitu hanya sebesar 2,95%, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada triwulan II

yaitu sebesar 9,23%. Pertumbuhan kredit yang relatif melambat pada akhir 2005 telah diperkirakan sebelumnya mengingat sektor riil cenderung untuk lebih mengoptimalkan penggunaan plafon kreditnya daripada merealisasi kredit baru mengingat faktor musiman yang mempengaruhi turunnya laju pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan IV 2005, disisi lain sektor riil diperkirakan juga masih menunggu kebijakan perbankan yang akan menyesuaikan tingkat bunga kredit akibat peningkatan suku bunga simpanan. Namun demikian, laju pertumbuhan penyaluran kredit bank umum di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 sebesar 27,17% tersebut telah melampaui target indikatif pertumbuhan kredit nasional yang ditetapkan sebesar 22%.

Pertumbuhan kredit bank umum pada tahun 2005 secara nominal sebesar Rp674 miliar, disalurkan dalam bentuk kredit modal kerja sebanyak 46,15%, disusul kredit konsumsi sebesar 36,01% dan sisanya sebesar 17,84% pada sektor investasi. Karakteristik struktur ekonomi di NTB yang relatif tidak memiliki industri skala besar, menyebabkan sektor perdagangan lebih banyak menyerap pertumbuhan kredit bank umum pada tahun 2005. Sedangkan kredit yang disalurkan ke sektor konsumsi pangasanya cenderung menurun dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama pada tahun 2004 (menyerap 60,27% dari pertumbuhan kredit), mengingat ketatnya persaingan pada sektor ini, disisi lain pasar kredit konsumsi tampak mulai cenderung stagnan.

Dari total kredit yang disalurkan, Bank Pemerintah menguasai pangsa penyaluran kredit terbesar yaitu mencapai angka sebesar 83,13% sedangkan sisanya sebesar 16,87% disalurkan melalui Bank Swasta.

Sementara itu, jumlah nominal kredit non lancar Bank Umum pada triwulan laporan relatif rendah yaitu sebesar Rp65 miliar, namun trendnya sedikit meningkat, sejalan dengan peningkatan rasio perbandingan antara jumlah kredit non lancar terhadap total kredit atau NPL (*Non Performing Loan gross*), dari 1,89% pada akhir 2004 menjadi 1,95% pada triwulan sebelumnya dan kembali meningkat menjadi 2,05% pada triwulan laporan. Peningkatan jumlah nominal kredit non lancar disebabkan oleh meningkatnya jumlah kredit non lancar yang disalurkan dengan peningkatan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, sektor lain-lain (didominasi konsumsi) dan sektor konstruksi. Secara nominal NPL tertinggi tercatat pada sektor perdagangan dari Rp20 miliar pada akhir 2004 menjadi Rp30 miliar pada akhir 2005, sedangkan secara persentase peningkatan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi dari 1,28% menjadi 5,96%, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada sub sektor jalan raya dan jembatan dari 0% menjadi 24,45%.

Selain karena faktor kenaikan harga-harga juga ada indikasi kurang kehati-hatiannya bank umum tertentu dalam proses kelayakan kreditnya. Namun demikian angka persentase NPL bank umum di NTB relatif jauh dibawah ketentuan indikatif Bank Indonesia sebesar 5% (net). Selain itu, sektor yang rasio NPL nya relatif kecil adalah sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi serta cukup prospektif adalah sektor pertanian. Membaiknya permintaan dan harga jual di sektor pertanian, baik tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan dan peternakan menyebabkan



pendapatan di sektor ini meningkat dengan baik. Diperkirakan untuk beberapa triwulan ke depan prospek di sektor ini masih cukup menjanjikan.

Disisi lain, penyaluran kredit bank umum berdasarkan kualitas kredit (kolektibilitas) sampai dengan posisi triwulan IV 2005, sejalan dengan jumlah rasio NPL yang relatif kecil, kualitas kredit tergolong **Lancar** menempati porsi terbesar yaitu sebesar 94,60%, **Dalam Perhatian Khusus** sebesar 3,35%, **Kurang Lancar** sebesar 0,31%, **Diragukan** 0,39% dan tergolong **Macet** sebesar 1,35%.

Suku bunga kredit relatif stabil, dimana kredit modal kerja berada pada kisaran 5,00% (terendah) hingga 36% (tertinggi), kredit investasi berkisar 6,5% (terendah) hingga 24,5% serta kredit konsumsi pada kisaran 3,50% (terendah) hingga 32,00% (tertinggi). Sementara itu, risiko kredit atau NPL kredit yang digunakan untuk modal kerja (NPL=3,34%) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan NPL kredit yang digunakan untuk investasi (2,35%) dan konsumsi (1,12%).

#### 3.2.4.1. Kredit Berdasarkan Lokasi Kantor Bank

Kredit yang disalurkan berdasarkan lokasi kantor bank sampai dengan posisi triwulan IV 2005 di Propinsi Nusa Tenggara Barat, relatif sama dengan triwulan sebelumnya yaitu terkonsentrasi di Kota Mataram & Kabupaten Lombok Barat dengan pangsa sebesar 46,60%, disusul Kabupaten/Kota Bima sebesar 14,83%, Kabupaten Sumbawa/Sumbawa Barat sebesar 11,53%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 10,78%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 10,13% dan Kabupaten Dompu sebesar 6,12%.

Rasio kredit bermasalah/NPLs tertinggi masih terjadi di Kabupaten Bima yaitu mencapai angka sebesar 4,07%, disusul Kabupaten Lombok Timur sebesar 2,57%, Kabupaten Dompu sebesar 1,90%, Kabupaten Sumbawa/Sumbawa Barat sebesar 1,87%, Kota Mataram & Kabupaten Lombok Barat sebesar 1,60% dan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 0,95%.

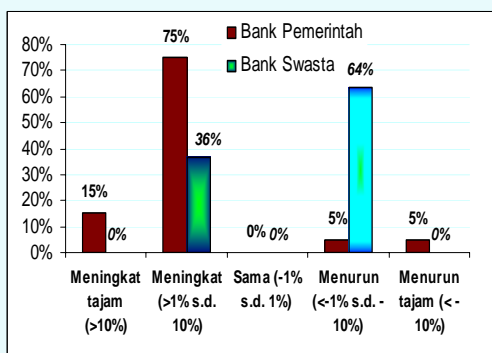
Peningkatan NPL tertinggi (baik secara persentase maupun secara nominal) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ataupun posisi yang sama tahun sebelumnya (2004) terjadi di Kabupaten/Kota Bima, hal ini merupakan cerminan bahwa kualitas kredit yang diberikan oleh bank umum di daerah tersebut cenderung menurun. NPL yang relatif tinggi tersebut diperkirakan karena adanya penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan peruntukan awal akibat kekurangcermatan dalam melakukan analisis sebelum kredit diberikan. NPL tertinggi berdasarkan sektor ekonomi di daerah ini disumbang oleh sektor konstruksi dengan angka signifikan sebesar 56,46% (tertinggi di sub sektor lainnya 86,05% & sub sektor jalan raya dan jembatan 43,25%), disusul sektor jasa-jasa dunia usaha sebesar 38,98%, industri pengolahan sebesar 32,49%, sektor pertanian sebesar 11,98% (tertinggi di sub sektor peternakan sebesar 55,06%), perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,39% (tertinggi di sub sektor pembelian & pengumpulan barang dalam negeri 38,13%) dan sektor lain-lain (didominasi konsumsi) sebesar 2,14%. Memperhatikan data NPL tersebut mencerminkan bahwa kegiatan dunia usaha yang terkait dengan pengerjaan proyek-proyek pemerintah daerah perlu

## SURVEI OPINI PIMPINAN/PEJABAT BANK UMUM TRIWULAN IV 2005 TERHADAP PEMBERIAN KREDIT

Dari hasil opini para pimpinan bank umum di NTB diperoleh gambaran perkembangan total permintaan kredit (plafon kredit baru dan tambahan plafon) dari nasabah bank umum pada triwulan IV (Oktober-Desember 2005) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Juni-September 2005) pada seluruh kantor cabang bank umum dan yang berkantor pusat di NTB secara umum (sebesar 63,33% dari total kantor bank pelapor/responden) menunjukkan peningkatan antara 1% hingga 10%, terjadi peningkatan permintaan kredit baru dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 58,62%.

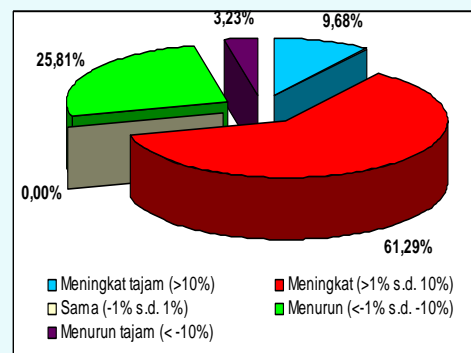
### Grafik 1.

Opini Responden Bank Pemerintah dan Swasta di NTB  
Tentang Total Permintaan Kredit Baru Trw.IV 2005



### Grafik 2.

Opini Responden Bank Umum di NTB Tentang  
Total Permintaan Kredit Baru di NTB Trw.IV 2005



Jumlah responden dengan kategori permintaan kredit barunya meningkat tajam (tumbuh > 10%) mengalami penurunan dari 27,59% menjadi 10% responden. Sedangkan permintaan kredit baru yang mengalami penurunan (menurun 1 – 10%) terjadi peningkatan dari sebesar 3,45% pada triwulan sebelumnya menjadi 23,33% responden. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan outstanding kredit bank umum yang menurun dari rata-rata sebesar Rp49,36 miliar (rata-rata 1,67% per bulan) pada triwulan III 2005 menjadi sebesar Rp30,01 miliar (rata-rata 0,98% per bulan) pada triwulan IV 2005. Terjadinya penurunan permintaan kredit baru (terutama investasi dan konsumsi) dan pertumbuhan outstanding kredit bank umum, merupakan dampak dari kenaikan harga BBM yang berakibat pada meningkatnya laju inflasi. Kenaikan tersebut juga mendorong bank meningkatkan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Kondisi sektor riil sempat stagnan karena penggunaan kreditnya terkait dengan perkembangan tingkat bunga kredit, terlihat dari penurunan terbesar yang terjadi pada posisi bulan November 2005, namun

kembali meningkat pada akhir tahun 2005. Dampak kenaikan BBM juga berimbas pada kemampuan debitur membayar pokok atau bunga kreditnya, terlihat dari meningkatnya rasio NPL (*Non Performing Loan*) baik dalam bentuk modal kerja, investasi ataupun konsumsi dari 1,95% pada akhir triwulan III 2005 menjadi sebesar 2,05% pada akhir triwulan IV 2005.

Total permintaan kredit dari nasabah pada triwulan I 2006 dibandingkan dengan triwulan IV 2005 pada seluruh kantor bank pelapor pada umumnya memperkirakan adanya kenaikan baki debit kredit antara 1% hingga lebih dari 10% (80,65% dari total responden), 6,45%nya relatif sama dengan triwulan sebelumnya dan lainnya sebesar 12,90% memperkirakan terjadi penurunan baki debit/outsanding kredit. Secara regional berdasarkan lokasi kantor bank, hampir semua bank umum di daerah kota/kabupaten memperkirakan terjadinya peningkatan baki debit/outstanding kredit, kecuali bank umum yang berlokasi di Lombok Timur dan Kota Mataram yang memperkirakan adanya penurunan masing-masing sebesar 33,33% dan 17,65%. Sedangkan untuk kondisi permintaan kredit baru pada triwulan mendatang, sebanyak 80,65% responden memperkirakan adanya peningkatan kredit (meningkat 1% hingga 10%), 12,90% responden menjawab sama dengan triwulan sebelumnya dan sisanya sebanyak 6,45% memperkirakan terjadinya penurunan permintaan kredit baru (dari 1% hingga 10%).

Kenaikan permintaan kredit dari nasabah pada triwulan I 2006, kebanyakan akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja (70,97%), disusul konsumtif sebesar 22,58% dan 6,45% sisanya untuk investasi, sedikit terjadi pergeseran dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dimana 82,76% responden memprediksi adanya kenaikan permintaan kredit untuk modal kerja, disusul konsumtif sebesar 17,24% dan tidak menyalurkan kredit untuk investasi.

Alasan peningkatan kredit baru pada triwulan I 2006 juga diperkirakan karena prospek usaha nasabah yang masih akan membaik (84%) terkait dengan proyeksi membaiknya kondisi ekonomi. Alasan itu juga yang dikemukakan oleh bank swasta, sedangkan responden bank pemerintah menambahkan alasannya dengan rendahnya risiko usaha. Bagi responden yang memperkirakan penurunan kredit disebabkan oleh perkiraan kenaikan suku bunga kredit yang tinggi karena penetapan kebijakan internal bank dan diperkirakan telah mulai memberatkan nasabahnya.

Secara sektoral, permintaan kredit baru tersebut lebih banyak disalurkan oleh 80% dari total responden pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, pada sektor lain-lain sebanyak 10% responden (cenderung konsumtif), sektor jasa sosial/masyarakat sebanyak 6,67% responden dan sektor pertanian sebanyak 3,33% responden. Khusus di sektor perdagangan, secara spesifik banyak digunakan untuk pembiayaan perdagangan eceran (seperti, sembako, barang kelontong, mini market, bahan bangunan) dan pembelian hasil bumi (padi, palawija dan perkebunan).

Sedangkan sektor/sub sektor yang dihindari bank-bank umum di NTB pada triwulan IV masih relatif sama dan belum berubah apabila dibandingkan dengan rencana triwulan I 2006. Secara umum ada sedikit perbedaan sektor/sub sektor yang dihindari bank pada setiap daerah. Namun dapat terlihat ada beberapa sektor yang cukup dominan dan dihindari hampir di semua daerah, seperti sektor transportasi, konstruksi dan kontraktor, peternakan unggas dan industri pengolahan kayu.

mendapat perhatian yang serius bagi kalangan perbankan di daerah ini untuk mencari tahu akar permasalahan yang sesungguhnya. Disisi lain, beberapa sektor yang menjadi andalan di daerah Bima turut pula memprihatinkan seperti sektor pertanian khususnya pada sub sektor peternakan dan sektor perdagangan khususnya pada sub sektor pembelian dan pengumpulan barang dalam negeri yang rasio NPL sangat tinggi, sebagai gambaran kemampuan membayar kembali kredit yang disalurkan sangat rendah.

#### **3.2.4.2. Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan**

Komposisi penyaluran kredit Bank Umum berdasarkan jenis penggunaan tetap didominasi oleh kredit konsumsi yang mencapai angka sebesar Rp1,67 triliun (53,04% dari total kredit), meningkat sebesar 1,42% dari triwulan sebelumnya dan 16,97% dibandingkan akhir 2004, meskipun secara nominal terjadi peningkatan namun pangsaanya menunjukkan trend yang cenderung menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dan akhir tahun 2004 yaitu masing-masing sebesar 1,48% dan 8,02% yang berarti terjadi pergeseran penyaluran kredit ke sektor yang produktif. Selanjutnya disusul kredit modal kerja sebesar Rp 1,12 triliun (35,52%) dengan pangsa yang trendnya cenderung meningkat sebesar 3,58% dan 8,86% dibandingkan triwulan sebelumnya dan akhir tahun 2004, sedangkan sisanya sebesar Rp361 miliar (11,44%) ditempati oleh kredit investasi yang pangsaanya juga terus meningkat sebesar 17,90% dibandingkan akhir tahun 2004, meskipun mengalami penurunan sebesar 3,61% dari triwulan sebelumnya.

Total pertumbuhan kredit perbankan di Nusa Tenggara Barat yang mencapai angka sebesar Rp674 miliar (527,17%) dibandingkan akhir 2004, porsi terbesar sudah beralih dan terserap pada sektor modal kerja (sebelumnya konsumsi) yakni mencapai angka sebesar 46,15%, disusul kredit konsumsi sebesar 36,01% dan investasi sebesar 17,84%. Telah terjadi pergeseran penyerapan pangsa pertumbuhan kredit bank umum yang pada tahun sebelumnya lebih dominan terserap pada sektor konsumsi (60,27%), sedangkan pada tahun 2005 pangsaanya mulai berpindah ke kredit dalam bentuk modal kerja ataupun investasi, peralihan terjadi karena ketatnya persaingan pada sektor ini dan kondisi pasar yang diperkirakan mulai jenuh. Hal ini tentunya berdampak positif yang menandakan adanya pergerakan ekonomi ke arah yang lebih produktif pada sektor riil di Propinsi NTB.

NPL gross penyaluran kredit menurut jenis penggunaannya, tertinggi tercatat pada kredit yang disalurkan dalam bentuk modal kerja sebesar 3,34% (tertinggi pada sub agrobisnis 9,43%), disusul investasi sebesar 2,35% dan terkecil dalam bentuk konsumsi yang tercatat sebesar 1,12% (tertinggi pada sub ruko dan rukan sebesar 3,32%), namun angka tersebut masih relatif jauh dari angka NPLs indikatif yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5% net.

#### **3.2.4.3. Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi**

Penyaluran kredit bank umum terhadap 10 sektor ekonomi yang ada, tidak berbeda dengan kondisi triwulan sebelumnya yang sangat didominasi sektor Lain-lain (konsumsi) yaitu mencapai

sebesar Rp1,68 triliun (53,20% dari total kredit). Meskipun secara nominal meningkat sebesar 1,38% (q-t-q) dan 16,13% (y-t-d) namun pangsa nya menunjukkan trend yang cenderung menurun yaitu sebesar 1,52% (q-t-q) dan 8,68% (y-t-d). Penyaluran kredit pada sektor ini nilai tambahnya diperkirakan relatif tidak sebesar apabila disalurkan ke sektor yang lebih produktif (*multiplier effect*nya yang relatif kecil). Sedangkan NPL (*gross*) di sektor ini masih relatif kecil yaitu sebesar 1,14%, namun cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 0,83% pada posisi Desember 2004 dan 1,04% pada posisi triwulan sebelumnya.

Peringkat kedua diduduki sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pangsa sebesar 33,09% (Rp1,04 triliun) yang lebih didominasi oleh sub sektor perdagangan eceran dengan komposisi sebesar 54,79% dari total kredit di sektor tersebut. Berkembangnya sektor retail dan meningkatnya permintaan masyarakat khususnya untuk kebutuhan bahan makanan, kebutuhan pokok, dan barang konsumsi lainnya menjadi penyebab utama berkembangnya sektor perdagangan di wilayah ini, terlihat dari peningkatan yang signifikan yang mencapai angka 46,35% dari posisi akhir 2004 dan sebesar 5,67% dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan NPL di sektor ini juga cenderung mengalami peningkatan dibandingkan posisi akhir 2004 dan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 2,87% dan 2,89 menjadi 2,92% pada posisi triwulan sebelumnya. Peningkatan NPL diperkirakan akibat naiknya harga-harga barang konsumsi sebagai dampak kenaikan BBM yang mempengaruhi daya beli masyarakat sedangkan pendapatan masyarakat cenderung tetap.

Selanjutnya disusul sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian yang baru menguasai pangsa sebesar 4,54%, namun angka pertumbuhan dari sektor ini meningkat cukup pesat dengan angka pertumbuhan sebesar 84,18% dibandingkan posisi akhir 2004, meskipun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya mengalami perlambatan yang hanya meningkat sebesar 0,13%. Sektor ini diperkirakan akan terus mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk dari kalangan perbankan mengingat sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja dan masih cukup potensial untuk dibiayai. Namun demikian, karena sektor ini sangat dipengaruhi oleh musim/cuaca sehingga rasio NPLs (*gross*) pada sektor ini cenderung berfluktuasi dan pada saat ini angkanya relatif cukup tinggi yaitu sebesar 3,45% dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun trendnya mulai menurun terlihat dari membaiknya NPL di sektor ini dari sebesar 11,57% pada posisi Desember 2004, menjadi sebesar 3,55% pada posisi triwulan sebelumnya dan kembali menurun pada posisi triwulan laporan menjadi sebesar 3,45%. Membaiknya permintaan dan harga di sektor pertanian, antara lain produk pertanian, kelautan, perkebunan dan peternakan (khususnya sapi dan kerbau) serta iklim yang mendukung menyebabkan sektor ini menjadi salah satu target penyaluran kredit oleh perbankan.

Sementara itu, 7 (tujuh) sektor lainnya yaitu sektor pertambangan; industri pengolahan; listrik, gas & air; konstruksi; pengangkutan, pergudangan & komunikasi; jasa-jasa dunia usaha, dan; jasa-jasa sosial/masyarakat, hanya menguasai pangsa sebesar 9,17%.

#### 3.2.4.4. Berdasarkan Golongan Debitur

*Outstanding* kredit bank umum berdasarkan kepemilikannya (golongan debitur) pada posisi triwulan laporan, sebesar 99,97% (Rp3,15 triliun) disalurkan kepada golongan penduduk dan sisanya sebesar 0,03% (Rp1,6 miliar) disalurkan kepada golongan bukan penduduk.

Pada golongan penduduk, porsi terbesarnya didominasi oleh sektor swasta dengan pangsa sebesar 99,87%, sedangkan sisanya sebesar 0,13% diserap sektor pemerintah.

Di sektor swasta, sebesar 92,28% (Rp2,90 triliun) disalurkan kepada golongan perseorangan, 5,23% (Rp165 miliar) disalurkan kepada perusahaan-perusahaan lainnya, 2,06% (65 miliar) kepada koperasi dan sisanya disalurkan kepada sektor swasta lainnya.

Sedangkan di sektor pemerintah, sebesar 85,46% (Rp2,8 miliar) disalurkan kepada BULOG dan sisanya 14,54% (Rp476 juta) disalurkan kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

#### 3.2.4.5. Perkembangan Kredit UMKM

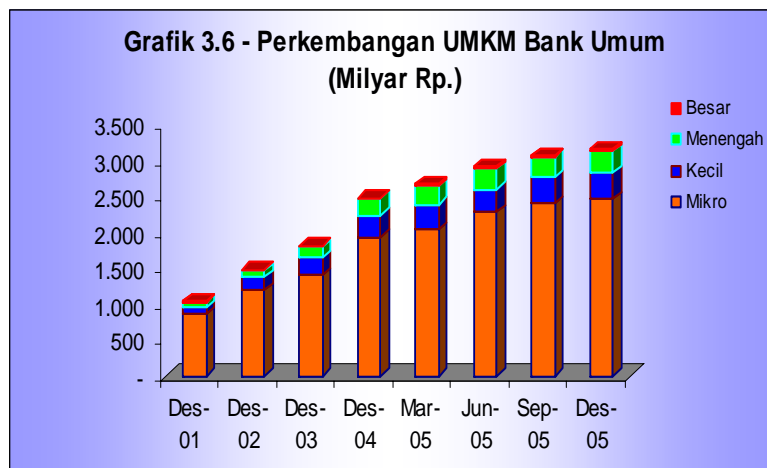
Kredit yang disalurkan kredit Bank Umum pada Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berdasarkan klasifikasi plafond kredit maksimal Rp5 Miliar pada posisi Triwulan IV 2005 mencapai total baki debit (*outstanding*) sebesar Rp3,13 triliun (99,19% dari total kredit) sedangkan penyaluran kredit ke Sektor Usaha Besar dengan klasifikasi plafond kredit lebih dari Rp5 Miliar, hanya sebesar Rp26 miliar (0,81% dari total kredit). Hal ini merupakan cerminan bahwa sektor industri berskala besar (korporat) di Propinsi NTB masih relatif sangat terbatas, sehingga penyaluran kredit bank umum tetap didominasi oleh kredit pada sektor UMKM. Sedangkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM yang murni pada sektor usaha produktif (diluar kredit konsumsi) hanya sebesar 46,15%.

Sementara itu, komposisi penyaluran kredit pada sektor UMKM pada triwulan laporan relatif sama dengan triwulan sebelumnya yang didominasi sektor usaha mikro (dengan plafon s.d Rp 50 juta) yang tercatat sebesar 77,84% dari total baki debit kredit yang diberikan, disusul untuk usaha kecil (plafon > Rp50 juta s.d Rp500 juta) sebesar 11,37% dan usaha menengah (plafon lebih besar dari Rp 500 juta s.d Rp 5 miliar) sebesar 9,98%, sedangkan sisanya sebesar 0,81% di luar sektor UMKM yaitu untuk usaha besar dengan plafon lebih dari Rp 5 miliar.

NPL tertinggi tercatat pada segmen usaha kecil sebesar 4,14%, disusul kelompok usaha menengah sebesar 3,84% dan terkecil pada golongan usaha mikro sebesar 1,50%, sedangkan NPL pada golongan usaha besar tercatat sebesar 3,79%. Kecuali sektor usaha mikro, rasio angka NPLs ketiga sektor usaha lainnya menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Artinya risiko kredit

bermasalah pada usaha mikro relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor usaha yang skalanya lebih besar.

Dengan melihat angka pertumbuhan yang baik dan rasio NPL yang relatif kecil, penyaluran kredit pada usaha mikro menjadi sangat prospektif. Namun perlu juga diperhatikan efek kenaikan BBM pada usaha skala mikro oleh perbankan, agar angka rasio NPL yang rendah tersebut tidak berpotensi menjadi memburuk/semakin tinggi. Upaya pemerintah daerah, legislatif daerah dan perbankan dalam mengembangkan sektor ini di masa yang akan datang perlu menjadi perhatian utama, seperti melalui peningkatan peran KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) dalam menjembati sektor riil yang belum terhubung dengan sektor perbankan dan *linkage program*, sehingga pada akhirnya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan baik.



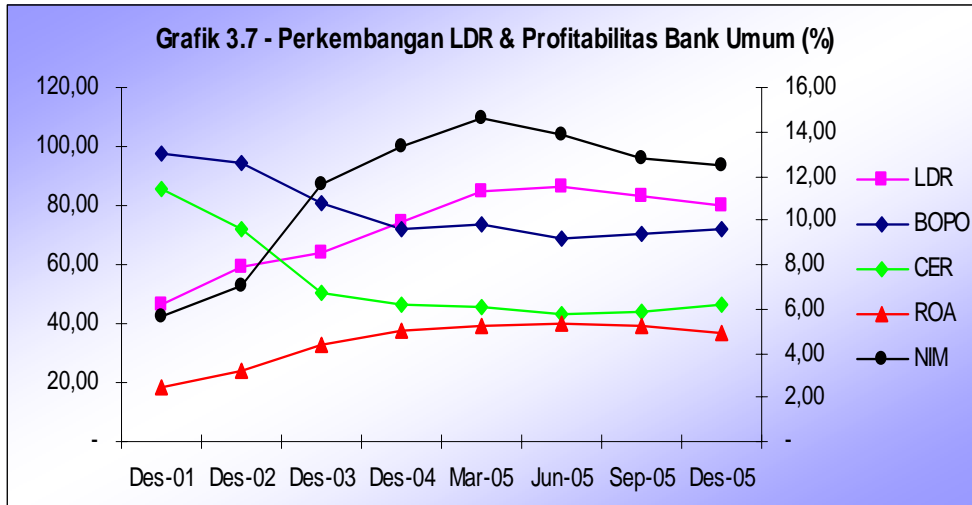
### 3.2.5. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio perbandingan antara kredit yang diberikan oleh Bank Umum terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga atau *Loan to Deposito Ratio (LDR)* cenderung berfluktuatif, dimana pada posisi akhir tahun 2004 tercatat sebesar 74,23%, meningkat menjadi sebesar 83,17% pada posisi triwulan sebelumnya dan kembali menurun menjadi sebesar 80,34% pada posisi triwulan laporan. Penurunan LDR lebih disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah nominal sumber dana pihak ketiga yang lebih besar seperti adanya aliran dari Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan dan dampak dari meningkatnya suku bunga simpanan yang cenderung meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di lembaga perbankan, dibandingkan dengan besarnya peningkatan penyaluran dana oleh bank umum dalam bentuk kredit.

Namun demikian, rasio LDR di Propinsi NTB relatif cukup baik dibandingkan secara nasional yang baru mencapai sebesar 61,67%. LDR bank umum pada triwulan mendatang diperkirakan pada kisaran 80,00% hingga 83,00%. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi bank sebagai lembaga intermediasi terus meningkat dan kondisi usaha di Nusa Tenggara Barat masih terlihat prospektif.



LDR tertinggi di Propinsi Nusa Tenggara Barat terjadi di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 207,56%, disusul Kabupaten Dompu sebesar 173,38%, Kabupaten/Kota Bima 140,28%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 122,04%, Kabupaten Sumbawa/Sumbawa Barat sebesar 73,55% dan terkecil tercatat di Kota Mataram sebesar 57,56%. Artinya daerah Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa/Sumbawa Barat merupakan daerah yang sumber dananya banyak yang disalurkan kepada daerah-daerah lainnya.



### 3.2.6. Profitabilitas & Efisiensi Bank Umum

Secara umum tingkat profitabilitas dan efisiensi bank umum yang diukur berdasarkan rasio ROA (*Return On Asset*), NIM (*Net Interest Margin*), BOPO yaitu perbandingan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan rasio CER (*Cost Efficiency Ratio*) masih relatif baik, meskipun rasio ROA dan NIM yang cenderung menurun dan rasio BOPO serta CER yang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan pengaruh dari meningkatnya biaya operasional bank baik dari sisi *cost of fund* maupun kenaikan biaya *overhead* akibat dari meningkatnya suku bunga simpanan dan dampak kenaikan harga-harga barang akibat kenaikan BBM. Sementara itu, suku bunga kredit yang merupakan unsur terbesar dari pendapatan operasional bank belum banyak mengalami penyesuaian. Untuk menyikapi hal tersebut, bank umum perlu melakukan upaya efisiensi dalam menjalankan aktifitas bisnisnya.

Rasio ROA (*Return On Asset*) yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset sedikit fluktuatif, dimana rasio ROA pada posisi Desember 2004 tercatat sebesar 5,01% meningkat menjadi sebesar 5,26% pada posisi triwulan III 2005 dan kembali turun menjadi sebesar 4,90% pada posisi triwulan laporan. Penurunan ROA dibandingkan dengan triwulan sebelumnya disebabkan peningkatan asset tidak diimbangi dengan peningkatan labanya.

Rasio NIM (*Net Interest Margin*) Bank Umum yaitu perbandingan antara pendapatan bunga setelah dikurangi biaya bunga terhadap total aktiva produktif cenderung menurun, dimana pada



posisi Desember 2004 tercatat sebesar 13,38% menjadi 12,78% pada triwulan sebelumnya dan kembali menurun menjadi sebesar 12,45% pada posisi triwulan laporan.

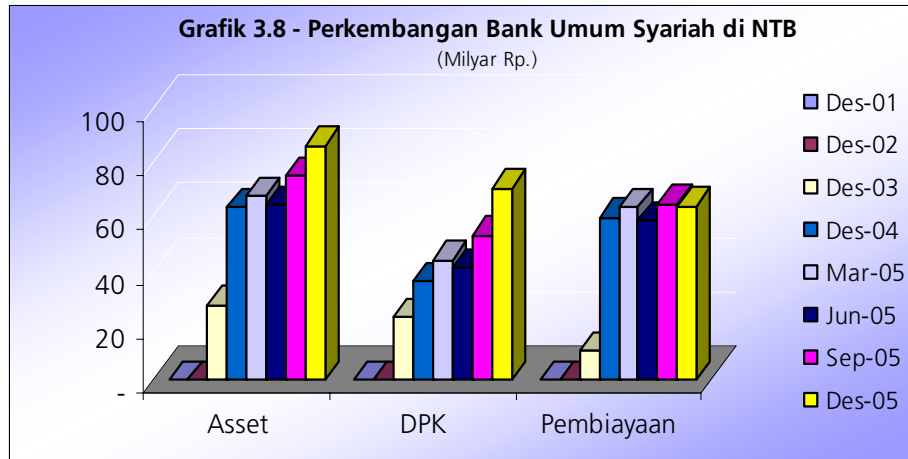
Sementara itu, tingkat efisiensi Bank Umum yang dihitung berdasarkan rasio BOPO yaitu perbandingan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional cenderung berfluktuatif, pada posisi Desember 2004 sebesar 71,99%, kemudian turun menjadi sebesar 70,04% pada posisi triwulan III 2005 dan kembali meningkat menjadi sebesar 71,94% pada posisi triwulan laporan.

Rasio CER (Cost Efficiency Ratio) yaitu perbandingan antara biaya operasional setelah dikurangi dengan biaya bunga dan biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap pendapatan operasional setelah dikurangi biaya bunga, cenderung fluktuatif, dari sebesar 46,25% per posisi Desember 2004 menurun menjadi 43,83% pada posisi triwulan sebelumnya, dan kembali meningkat menjadi sebesar 46,11% pada posisi triwulan laporan. Telah diprediksikan sebelumnya, kenaikan rasio CER dari triwulan sebelumnya, pengeluaran biaya *overhead* yang tidak selaras dengan peningkatan pendapatan bunga, karena bank umum diperkirakan belum melakukan penyesuaian terhadap tingkat suku bunga kreditnya, padahal suku bunga penghimpunan dana sudah mengalami penyesuaian terkait dengan naiknya suku bunga SBI. Oleh karena itu, bank umum perlu melakukan efisiensi terhadap biaya overhead dan menggali potensi *fee based income* guna mengantisipasi peningkatan rasio CER pada triwulan mendatang yang diperkirakan masih mengalami kenaikan, apabila suku bunga penghimpunan dana tidak mengalami penurunan dan suku bunga pinjaman tidak dilakukan penyesuaian.

### 3.3. Bank Umum Syariah

Perkembangan bank umum syariah yang beroperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Dari sisi kelembagaan terjadi peningkatan jumlah kantor bank yang saat ini tercatat sebanyak 4 (empat) kantor cabang syariah yaitu PT.Bank Syariah Mandiri, PT.Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT.Bank NTB Syariah dan terakhir baru beroperasi mulai bulan Desember 2005 PT.BRI Syariah. Kecuali PT.Bank NTB Syariah yang berlokasi di Selong Ibukota Kabupaten Lombok Timur di Mataram bersama Kantor Kas PT.Bank Syariah mandiri dan PT.Bank Syariah Muamalat Indonesia, 3 (tiga) kantor cabang lainnya memilih beroperasi di Kota Mataram.

Kinerja bank umum syariah di NTB pada tahun 2005 sampai dengan posisi triwulan IV cukup prospektif, mengingat penduduk di daerah ini yang mayoritas beragama Islam dan jumlah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di daerah ini relatif sedikit. Kinerja tersebut dapat dilihat antara lain dengan indikator meningkatnya jumlah asset bank umum syariah sebesar 51,63% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2004 dan meningkat sebesar 14,78% dari triwulan sebelumnya, yang saat ini tercatat sebesar Rp85,8 miliar. Namun sebaliknya pangsa asset bank syariah relatif kecil yaitu baru mencapai 1,64% dari total asset bank umum di NTB.



Peningkatan total asset tersebut sejalan dengan meningkatnya sumber dana masyarakat yang berhasil dihimpun sebesar 101,30% (y-t-d) atau 32,28% (y-t-q) dengan nominal sebesar Rp70 miliar dan pembiayaan yang diberikan yang meningkat sebesar 32,44% dari akhir tahun 2004 meskipun mengalami penurunan sebesar 1,10% dibanding triwulan sebelumnya yang saat ini tercatat sebesar Rp63,7 miliar.

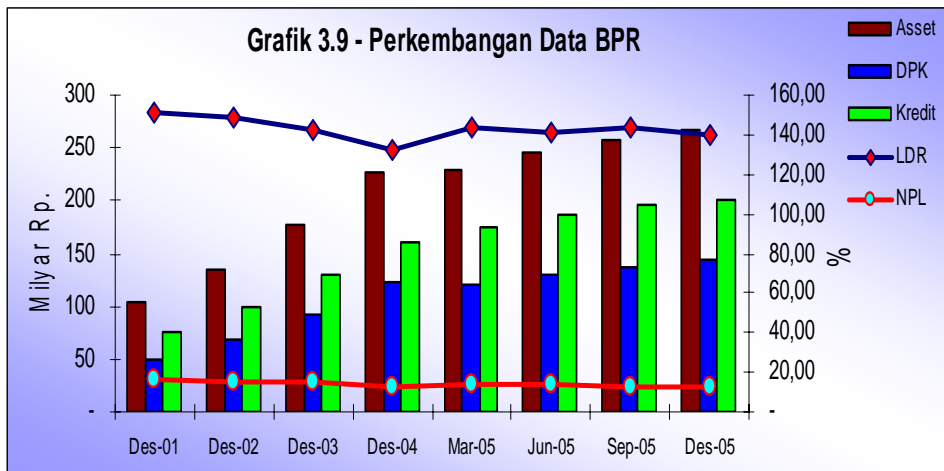
Non Performing Financings (NPFs) terhadap pembiayaan yang diberikan berfluktuasi namun masih relatif baik, dimana pada posisi akhir 2004 tercatat sebesar 0,09% meningkat menjadi 1,23% pada posisi triwulan III 2005 dan kembali menurun menjadi sebesar 0,44% pada posisi triwulan laporan.

Sementara itu rasio FDR (Financing to Deposit Ratio) relatif cukup baik. Pada posisi triwulan laporan tercatat sebesar 90,77% melampaui angka LDR regional sebesar 80,34%, meskipun menurun dibandingkan posisi akhir 2004 maupun posisi akhir triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 137,96% dan 121,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan meningkatkan penghimpunan dana masyarakat oleh bank umum syariah jauh lebih besar daripada peningkatan pembiayaannya.

### 3.4. Perkembangan BPR

Kinerja BPR dari sisi perkembangan total asset, dana pihak ketiga dan kredit pada triwulan IV 2005 secara umum membaik, namun dari rasio-rasio penting lainnya terlihat agak memburuk. Pada saat ini, total assetnya yang telah mencapai angka sebesar Rp267 miliar atau meningkat sebesar 3,70% dibandingkan triwulan sebelumnya (q-t-q) dan meningkat sebesar 17,36% dibandingkan dengan posisi akhir 2004 (y-t-d). Peningkatan asset tersebut sejalan dengan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga masing-masing secara triwulanan sebesar 5,40% (q-t-q) dan 18,13% (y-t-d) sehingga posisi triwulan laporan tercatat sebesar Rp144 miliar dan penyaluran dana terutama pada kredit yang diberikan secara triwulanan meningkat sebesar 2,07% (q-t-q) dan 25,07%

(y-t-d) tercatat menjadi sebesar Rp200 miliar. Pangsa indikator BPR terhadap perbankan di NTB yang mencakup asset, DPK dan kredit, secara keseluruhan masih dibawah angka 6%.



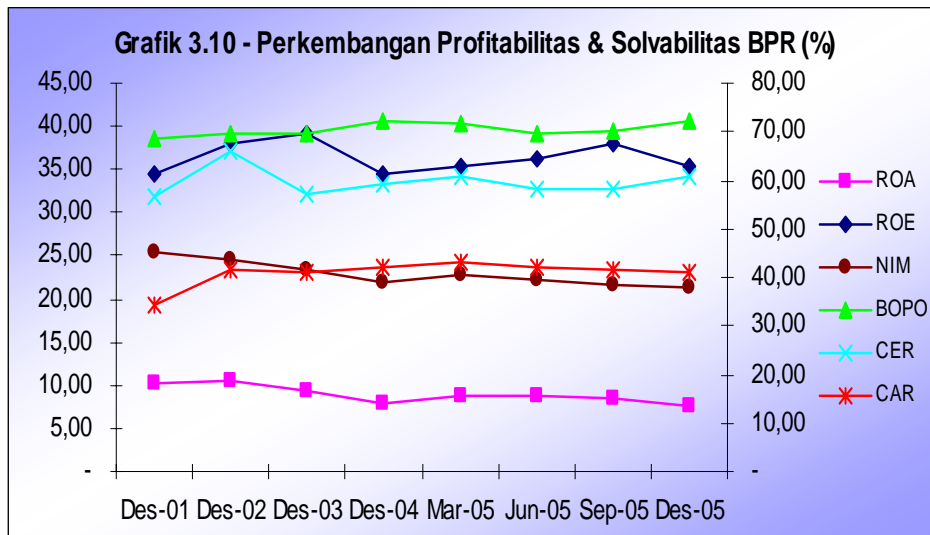
Disisi lain, rasio NPL (*gross*) dan NPL net serta NPL nominal BPR cenderung fluktuatif dimana pada posisi Desember 2004 tercatat sebesar 12,15% (net 8,73%, nominal Rp19,5 miliar) meningkat menjadi sebesar 12,78% (net 9,5%, nominal Rp25,08 miliar) pada posisi triwulan III 2005 dan kembali turun menjadi sebesar 12,30% (net 9,06%, nominal Rp24,64 miliar) pada posisi triwulan laporan. Rasio NPL Net tersebut masih lebih besar dari angka NPL net indikatif yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 8,00% untuk tahun 2006, meskipun terjadi perbaikan kualitas kredit, namun besarnya suku bunga pinjaman yang relatif tetap (jarang berubah) diperkirakan dapat menjadi salah satu sebab utama masih besarnya angka NPL BPR disamping faktor meningkatnya biaya-biaya yang ditanggung debitur akibat kenaikan harga-harga barang.

Sementara itu, rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) cenderung berfluktuatif, dimana pada posisi akhir 2004 tercatat sebesar 131,67% meningkat menjadi sebesar 143,96% pada posisi triwulan III 2005 dan kembali turun menjadi 139,41% pada posisi triwulan laporan. Penurunan LDR disebabkan meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan penyaluran kredit. Meskipun terjadi penurunan, namun rasio LDR masih sangat tinggi dan telah melampaui angka LDR ideal (90-100%) yang lebih disebabkan oleh banyaknya penggunaan sumber dana yang berasal dari pemilik (terutama BPR yang dimiliki Pemda), sehingga fungsi bank sebagai lembaga intermediasi belum optimal karena lemahnya kemampuan memperoleh nasabah penyimpan yang berdampak pada pertumbuhan penghimpunan dana belum maksimal.

Profitabilitas BPR yang diukur dari rasio ROA, ROE, NIM pada posisi triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya cenderung menurun, sejalan dengan peningkatan rasio CER dan BOPO yang merupakan ukuran dari tingkat efisiensi BPR. Penurunan profitabilitas dan meningkatnya rasio efisiensi juga berdampak terhadap menurunnya solvabilitas BPR (secara agregat) yang diukur dengan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dimana pada posisi akhir 2004 tercatat

sebesar 42,05% turun menjadi 41,68% (triwulan sebelumnya) dan 41,18% pada posisi triwulan laporan, disebabkan laba bank yang menjadi komponen pembentukan modal inti mengalami tekanan meskipun meningkat, namun peningkatannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan asset bank yang tercermin dari peningkatan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Memperhatikan posisi CAR yang masih relatif besar (41,18%) tersebut, masih memberi ruang bagi BPR untuk dapat meningkatkan penyaluran dananya, meskipun rasio LDRnya yang relatif masih sangat tinggi.



### 3.4.1. Kelembagaan

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada posisi triwulan IV 2005, tidak berbeda dengan triwulan sebelumnya dimana jumlah BPR tercatat sebanyak 65 (enam puluh lima) dengan komposisi 46 BPR dimiliki Pemerintah daerah sedangkan sisanya sebanyak 19 BPR dimiliki swasta, dengan jumlah kantor BPR sebanyak 68 (enam puluh delapan) termasuk 65 kantor pusat BPR dan 3 kantor cabang, dengan komposisi 46 kantor dimiliki Pemerintah daerah sedangkan sisanya sebanyak 22 kantor dimiliki swasta.

Sementara itu, sebaran operasional BPR di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan laporan terkonsentrasi di wilayah kota Mataram sebanyak 5 kantor (4 KP dan 1 KC), Kabupaten Lombok Barat sebanyak 15 kantor (14 KP dan 1 KC), Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 11 kantor (11 KP), Kabupaten Lombok Timur sebanyak 11 kantor (11 KP), Kabupaten Sumbawa sebanyak 14 kantor (14 KP), Kabupaten Dompu sebanyak 4 kantor (4 KP) dan di Kabupaten Bima sebanyak 8 kantor (7 KP dan 1 KC).

Berdasarkan kegiatan usaha, jumlah BPR konvensional sebanyak 63 kantor pusat dan 3 kantor cabang, sedangkan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah sebanyak 2 kantor pusat.

### 3.4.2. Asset

Total Asset Bank Perkreditan Rakyat sampai dengan triwulan IV 2005 mencapai angka sebesar Rp267 miliar atau meningkat sebesar 3,70% dibandingkan triwulan sebelumnya dan meningkat sebesar 17,36% dibandingkan dengan akhir tahun 2004. Peningkatan asset BPR sejalan dengan meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana terutama dalam bentuk kredit yang diberikan.

Berdasarkan kepemilikannya total asset BPR masih didominasi oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar 52,22% sedangkan sisanya sebesar 47,78% dimiliki oleh swasta. Sedangkan dari lokasi kantor BPR, Kota Mataram meskipun jumlah banknya relatif sedikit namun menguasai pangsa terbesar yaitu mencapai 23,05%, disusul Kabupaten Sumbawa/Sumbawa Barat 20,87%, Kabupaten Lombok Barat sebesar 17,46%, Lombok Tengah 14,57%, Lombok Timur 12,51%, Kabupaten/Kota Bima sebesar 6,96% dan terkecil di Kabupaten Dompu sebesar 4,57%.

### 3.4.3. Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dilakukan BPR sampai dengan posisi triwulan laporan mencapai sebesar Rp143 miliar (jumlah rekening 159.140) atau meningkat sebesar 5,40% (q-t-q) dan meningkat sebesar 18,13% (y-t-d).

Menurut kepemilikannya sampai dengan posisi triwulan laporan, BPR yang dimiliki Pemerintah Daerah hanya berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar 33,96% (jumlah rekening 59,10%), sedangkan porsi terbesar dihimpun oleh BPR yang dimiliki oleh swasta yang mencapai angka 66,04% (jumlah rek. 40,9%). Artinya kemampuan BPR milik swasta dalam menghimpun DPK relatif lebih baik dibandingkan BPR yang dimiliki Pemda, meskipun dari sisi keberhasilan menghimpun jumlah penabung BPR milik pemda lebih dominan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian yang serius apabila BPR milik pemda ingin dapat berkompetisi secara baik dan tidak selalu bergantung sumber dananya pada setoran APBD Pemda, dimana pada masa yang akan datang diperkirakan akan semakin terbatas.

Berdasarkan jenis simpanannya, porsi deposito mencapai 55,61% dan sisanya sebesar 44,39% dalam bentuk tabungan. Hal ini wajar terjadi, mengingat suku bunga deposito yang ditawarkan oleh BPR jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga tabungan. Penghimpunan dana berdasarkan lokasi kantor BPR masih tidak berbeda dengan triwulan sebelumnya. Jumlah BPR yang berlokasi di Kota Mataram menempati urutan teratas yaitu mencapai sebesar 31,54% dari total DPK, disusul Kabupaten Lombok Barat sebesar 18,91%, Kabupaten Sumbawa sebesar 17,84%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 13,98%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 12,05%, Kabupaten Bima sebesar 4,19% dan terkecil Kabupaten Dompu sebesar 1,49%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sumber dana BPR masih bergantung pada dana yang berasal dari penduduk kota besar (ibu kota propinsi) yang memiliki surplus dana. Sehingga terjadi persaingan yang ketat antara BPR dan

bank umum (yang cenderung berada di wilayah kota) baik dari pemberian suku bunga maupun pelayanan yang diberikan.

#### 3.4.4. Perkembangan Kredit yang diberikan

Pertumbuhan penyaluran kredit yang dilakukan BPR sampai dengan posisi triwulan IV 2005 cukup menggembirakan dengan angka nominal sebesar Rp200 miliar atau meningkat sebesar 2,07% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan sebesar 25,07% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2004. Kredit yang diberikan oleh BPR tersebut, menurut penggunaannya lebih terkonsentrasi pada modal kerja yaitu mencapai sebesar 58,04% dari total kredit, disusul kredit konsumsi sebesar 35,51% dan terkecil disalurkan dalam bentuk kredit investasi hanya sebesar 6,46%. Hal ini mencerminkan bahwa pangsa pasar BPR lebih dominan pada segmen usaha mikro.

Penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi (hanya terbagi 5 sektor), porsi terbesar terjadi pada sektor perdagangan, restoran/rumah makan dan hotel/penginapan yaitu mencapai angka 43,90%, disusul sektor lain-lain (cenderung konsumsi) sebesar 41,57%, sektor jasa-jasa sebesar 10,52%, sektor pertanian sebesar 3,32% dan terkecil pada sektor perindustrian sebesar 0,69%. Segmen pasar pedagang-pedagang kecil/bakulan di sekitar pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, pertokoan di daerah kecamatan dan kabupaten masih menjadi target utama pasar BPR.

Meskipun pangsa sektor pertanian tidak terlalu besar, namun kualitas kreditnya menunjukkan kinerja yang paling buruk, tercermin dari rasio NPL (*gross*) sebesar 27,14%, disusul sektor perdagangan sebesar 17,88%, perindustrian 16,38%, jasa-jasa 8,26% dan terkecil pada sektor lain-lain (cenderung konsumsi) sebesar 6,18%. Rendahnya NPL pada sektor lain-lain disebabkan risiko pada sektor ini relatif lebih rendah karena sumber pengembalian yang relatif jelas (misalnya pemotongan gaji pegawai).

Sampai dengan triwulan laporan, BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berhasil menyalurkan kredit sebesar 55,76% dari total kredit yang diberikan dengan NPL (*gross*) tercatat sebesar 13,33%, sedangkan sisanya sebesar 44,24% disalurkan oleh BPR yang dimiliki swasta dengan rasio NPL sebesar 11,00%. Meskipun menguasai pangsa, namun kualitas kredit yang disalurkan oleh bank yang dimiliki oleh pemda lebih buruk dibandingkan dengan swasta. Buruknya kinerja bank milik pemda disebabkan kekuranghatian dalam menyalurkan dana. Disisi lain, kondisi pasar cenderung mulai jenuh pada bank milik pemda yang berada di kecamatan-kecamatan sehingga melakukan ekspansi ke ibukota kabupaten, sementara di lokasi tersebut sudah ada BPR sejenis. Diperkirakan terjadi pembiayaan berganda pada debitur yang sama dan berdampak pada ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya, berakibat munculnya kredit bermasalah yang tercermin dari meningkatnya rasio NPL.

Sementara itu penyaluran kredit berdasarkan lokasi kantor BPR pada triwulan laporan, porsi terbesar ditempati BPR yang beroperasi di Kota Mataram dengan pangsa sebesar 21,98%, disusul



Kabupaten Sumbawa/Sumbawa Barat sebesar 20,79%, Kabupaten Lombok Barat yaitu mencapai sebesar 17,23%, Kabupaten Lombok Tengah sebesar 15,20%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 12,08%, Kabupaten/Kota Bima sebesar 7,45% dan terkecil Kabupaten Dompu yang hanya sebesar 5,27%. Sedangkan rasio NPL (gross) tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Barat sebesar 18,87%, disusul Kabupaten/Kota Bima sebesar 16,88%, Kabupaten Lombok Timur sebesar 16,48%, Dompu 13,32%, Lombok Tengah sebesar 13,04%, Sumbawa/Sumbawa Barat 11,41% dan terkecil terjadi di Kota Mataram sebesar 3,38%. Kualitas kredit yang rendah dan NPL tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Barat dan beberapa daerah lainnya tersebut mencerminkan kinerja penyaluran kredit BPR di wilayah tersebut yang menurun baik dilakukan oleh bank milik pemda (NPL 19,45%) maupun yang dimiliki swasta (18,53%), karena kurang selektifnya beberapa BPR dalam pemberian pinjaman kepada debitur dan kondisi iklim yang kurang mendukung pada sektor pertanian (dalam arti luas) yang menyebabkan NPL di sektor ini relatif cukup tinggi di daerah-daerah tersebut.

Secara agregat NPL (gross) BPR di NTB pada posisi triwulan IV 2005 tercatat sebesar 12,30%, atau meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2004 yang tercatat sebesar 12,15%, namun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III 2005 yang tercatat sebesar 12,78%. Secara nominal, jumlah kredit non lancar juga berfluktuatif, dari sebesar Rp19,46 miliar pada akhir 2004 meningkat menjadi Rp25,08 miliar, namun terjadi penurunan pada akhir 2005 menjadi sebesar Rp24,64 miliar. Sedangkan persentase NPL secara net (setelah dikurangi dengan PPAP), masih diatas NPL indikatif yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8,00%, dimana pada posisi akhir 2005 tercatat sebesar 9,06%, atau meningkat dari akhir 2004 sebesar 8,73% meskipun mengalami penurunan dari posisi akhir triwulan III 2005 yang tercatat sebesar 9,50%. Tingginya persentase NPL Net, menandakan BPR di propinsi ini, belum membentuk cadangan dari risiko kredit yang diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi/kegagalan membayar dari debitur.

#### **3.4.5. Loan to Deposit Ratio**

Perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat yang berhasil dihimpun atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) masih cukup tinggi dan berfluktuatif, dimana pada posisi akhir tahun 2004 mencapai sebesar 131,67%, meningkat menjadi sebesar 143,96% pada posisi triwulan III 2005, namun terjadi penurunan pada akhir 2005 yang tercatat sebesar 139,41%. Penurunan tersebut disebabkan karena peningkatan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun lebih besar dibandingkan dengan peningkatan penyaluran kreditnya.

Angka LDR yang tinggi pada posisi akhir 2005 yang telah melampaui angka LDR indikatif pada kisaran 90-100%, secara regional disumbang oleh BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang mencapai angka sebesar 228,92%, sedangkan rasio LDR yang dimiliki oleh BPR swasta hanya sebesar 93,39% atau telah memenuhi angka LDR indikatif.

Sementara itu, tingginya rasio LDR pada BPR yang dimiliki Pemda lebih disebabkan faktor kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat belum optimal/berhasil, sehingga sumber dana yang digunakan untuk penyaluran dana sebagian besar bersumber dari dana pemilik (setoran modal pemerintah daerah melalui APBD).

#### 3.4.6. Profitabilitas & Efisiensi BPR

Perkembangan profitabilitas BPR yang diukur berdasarkan rasio NIM (*Net Interest Margin*), ROA (*Return On Asset*) dan ROE (*Return On Equity*) meskipun relatif baik, namun cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi akhir triwulan III 2005. Tingkat efisiensi BPR yang diukur dari rasio BOPO (perbandingan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan rasio CER (*Cost Efficiency Ratio*) cenderung meningkat dibandingkan posisi triwulan sebelumnya maupun posisi akhir 2004. Penurunan profitabilitas maupun peningkatan efisiensi karena adanya pengaruh dari peningkatan suku bunga simpanan sebagai dampak kenaikan harga BBM, sementara tingkat bunga pinjaman diperkirakan belum mengalami penyesuaian.

Penurunan maupun peningkatan profitabilitas dan efisiensi BPR tersebut pada akhirnya juga berdampak pada menurunnya solvabilitas BPR yang diukur dari rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu perbandingan antara modal bank dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) dengan komponen terbesar adalah kredit yang diberikan, mengingat ukuran modal inti yang merupakan komponen ukuran modal bank termasuk juga laba tahun berjalan, sedangkan peningkatan laba tahun berjalan lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan assetnya yang tercermin dari peningkatan ATMR BPR. Pada posisi triwulan IV 2005 CAR BPR (agregat) tercatat sebesar 41,18%.

Rasio ROA mengalami kontraksi pada posisi triwulan III 2005 tercatat sebesar 8,45% yang meningkat dibanding akhir 2004 sebesar 7,79%, namun terjadi penurunan pada posisi triwulan laporan menjadi sebesar 7,67%. Menurunnya rasio ROA dibandingkan dengan akhir 2004 maupun posisi triwulan sebelumnya menandakan bahwa BPR belum dapat mengoptimalkan pengelolaan aktivasnya, mengingat terjadinya peningkatan asset yang belum sejalan dengan peningkatan labanya.

Penurunan rasio ROE dibandingkan dengan akhir triwulan sebelumnya dari sebesar 37,94% menjadi 35,35%, disebabkan kemampuan meningkatkan laba yang mengalami tekanan akibat naiknya suku bunga simpanan, meskipun terjadi peningkatan dibandingkan dengan akhir 2004 yang tercatat sebesar 34,38%. Secara umum, tingginya rasio ROE yang pada akhir 2005 tercatat sebesar 35,35% menunjukkan bahwa BPR mampu menggunakan modal secara optimal, terlihat dari dominasi setoran modal dalam penyaluran dana daripada penghimpunan dana masyarakat. Hal ini juga tercermin dari tingginya rasio CAR yang mencapai 41,18% dan rasio LDR yang mencapai 139,41%.

Sedangkan rasio NIM juga cenderung menurun, dimana pada posisi akhir 2004 tercatat sebesar 21,78%, kemudian menjadi sebesar 21,53% pada posisi triwulan sebelumnya dan kembali



turun menjadi sebesar 21,44% pada posisi triwulan laporan, meskipun sempat terjadi kenaikan pada triwulan II 2005 yang tercatat sebesar 22,21%. Penurunan rasio NIM sebagai akibat meningkatnya suku bunga simpanan yang belum dipengaruhi peningkatan suku bunga pinjaman. Namun secara umum tingginya rasio NIM BPR dibandingkan dengan bank umum disebabkan spread antara penghimpunan dan penyaluran dana oleh BPR relatif cukup besar.

Sementara itu, rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan CER (*Cost Efficiency Ratio*) mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, disebabkan pengaruh dari meningkatnya laju inflasi yang berdampak pada peningkatan suku bunga simpanan tercermin dari meningkatnya rasio BOPO, namun tidak diimbangi dengan melakukan efisiensi yang ketat terlihat dari meningkatnya biaya *overhead* yang tercermin dari peningkatan rasio CER.

Rasio BOPO pada posisi akhir 2005 tercatat sebesar 72,27% atau meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 70,09% dan dibandingkan dengan posisi akhir 2004 yang tercatat sebesar 70,45%.

Begitu juga dengan rasio CER cenderung meningkat seperti pada rasio BOPO baik dibandingkan dengan posisi akhir 2004 (59,10%) maupun posisi triwulan sebelumnya (58,26%). Posisi rasio CER pada akhir tahun 2005 tercatat sebesar 60,69%.

### 3.5. Perkembangan Sistem Pembayaran

Jumlah nominal transaksi non tunai melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang bersifat seketika (masuk maupun keluar) selama tahun 2005 yang tercatat melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) Mataram, dengan nominal minimal Rp100 juta per transaksi, secara total sebesar Rp8,82 triliun atau meningkat sebanyak 2,85% dibanding transaksi yang sama selama tahun 2004. Peningkatan transaksi RTGS diantaranya karena adanya aliran transaksi yang masuk dari pemerintah pusat seperti dana-dana untuk Bantuan Langsung Tunai (kompensasi BBM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dana perimbangan (DAU & DAK).

Sedangkan transaksi non tunai lainnya adalah transaksi melalui kegiatan kliring yang selama tahun 2005 tercatat sebesar Rp3,06 triliun atau meningkat sebesar 18,51% pada posisi yang sama selama tahun 2004. Meningkatnya nominal transaksi kliring merupakan salah satu gambaran adanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah ini, disamping kesadaran para pelaku ekonomi yang menggunakan sarana giralisasi dalam kegiatan bisnisnya guna menghindari risiko.

Sementara itu, transaksi keuangan secara tunai berupa aliran uang yang masuk (*inflow*) di KBI Mataram selama tahun 2005 tercatat sebesar Rp3,60 triliun atau meningkat sebanyak 10,83% dibandingkan selama tahun 2004, sedangkan jumlah aliran uang yang keluar (*outflow*) tercatat sebesar Rp3,84 triliun, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp236 miliar. Hal ini terjadi karena

adanya pencairan kredit perbankan, pembelian hasil panen tembakau (pada triwulan III 2005) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (dana kompensasi BBM).

Jumlah uang yang tidak layak edar untuk selanjutnya dimusnahkan selama tahun 2005 tercatat sebesar Rp1,02 triliun atau meningkat sebanyak 47,54% selama tahun 2004, hal ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan jumlah uang lusuh di NTB. Pada umumnya uang yang tidak layak edar (lusuh) banyak diperoleh dari Pulau Sumbawa, mengingat relatif sedikitnya jumlah perbankan di daerah tersebut dibandingkan dengan di Pulau Lombok.

Jumlah uang palsu yang ditemukan/dilaporkan kepada Bank Indonesia Mataram selama tahun 2005 cukup tinggi dan tercatat sebesar Rp48.030.000,- atau meningkat sebesar 182,36% dibandingkan tahun 2004 yang tercatat hanya sebesar Rp17.010.000,-. Modusnya sudah merambah ke daerah yang relatif terpencil (seperti di Lunnyuk, Pulau Sumbawa). Sehingga diharapkan masyarakat terutama para kasir toko atau kasir tempat bisnis lainnya (seperti pom bensin dan pedagang di pasar tradisional) dapat lebih teliti dalam menerima uang sebagai alat pembayaran dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan responsif dari aparat. Sosialisasi keaslian uang rupiah dapat pula melibatkan unsur aparat kecamatan yang dapat menjadi ujung tombak bagi masyarakat setempat dalam rangka memperoleh informasi mengenai keaslian uang rupiah.

### 3.5.1. Transaksi Keuangan Secara Tunai

#### 3.5.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

Aliran uang yang masuk (*inflow*) ke Kantor Bank Indonesia Mataram pada posisi triwulan IV 2005 tercatat sebesar Rp1,13 triliun atau meningkat sebesar 34,29% dibandingkan triwulan sebelumnya, peningkatan terjadi karena adanya aliran uang masuk setelah berlangsungnya kegiatan musiman (hari raya keagamaan) yang di penghujung triwulan sebelumnya terjadi peningkatan uang

**Tabel 3.1 - Perkembangan aliran uang di KBI Mataram**

Posisi	Inflow	Outflow	Net Inflow
2001	2.453	2.181	272
2002	2.622	2.379	244
2003	2.834	3.022	(188)
2004	3.248	3.341	(93)
Tw.I	768	664	104
Tw.II	785	910	(125)
Tw.III	777	889	(112)
Tw.IV	917	877	40
2005	3.600	3.835	(236)
Tw.I	814	698	115
Tw.II	818	937	(119)
Tw.III	840	1.107	(267)
Tw.IV	1.128	1.093	35
y-o-y (%)	10,83	14,81	154,02
q-t-q (%)	34,29	(1,26)	(113,11)

Miliar Rp.

yang keluar (*outflow*). Sedangkan jumlah aliran uang yang keluar dari Kantor Bank Indonesia Mataram pada posisi triwulan yang sama tercatat sebesar Rp1,09 triliun atau menurun sebesar 1,26% dibandingkan triwulan sebelumnya, namun penurunannya tidak terlalu signifikan mengingat di akhir triwulan laporan masih terdapat kegiatan musiman (natal & tahun baru) dan diperkirakan pada awal triwulan I 2005 aliran

uang masuk (*inflow*) lebih besar dari uang keluar (*outflow*).

Selama tahun 2005, jumlah aliran uang yang masuk (*inflow*) di KBI Mataram tercatat sebesar Rp3,60 triliun atau meningkat sebanyak 10,83% dibandingkan selama tahun 2004, sedangkan jumlah aliran uang yang keluar (*outflow*) tercatat sebesar Rp3,84 triliun, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp236 miliar. Hal ini terjadi karena adanya pencairan kredit perbankan, pembelian hasil panen tembakau (pada triwulan III 2005) dan pembayaran Bantuan Langsung Tunai (dana kompensasi BBM).

### 3.5.1.2. Pemberian Tanda Tidak berharga (PTTB) Uang Kartal

Dalam rangka memelihara kualitas uang kartal yang beredar di masyarakat yang dikenal dengan kebijakan *Clean Money Policy*, uang yang sudah tidak layak edar akan dilakukan pemusnahan atau disebut Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB).

Sampai dengan posisi triwulan IV 2005 jumlah uang kartal yang tidak layak edar yang masuk ke Kantor Bank Indonesia Mataram tercatat sebesar Rp1,02 triliun atau meningkat sebesar 47,54% dibandingkan dengan tahun 2004 (Tabel 3.2). Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah uang yang tidak layak edar di Propinsi Nusa Tenggara Barat relatif cukup tinggi dan trendnya menunjukkan peningkatan. Jumlah uang yang tidak layak edar (lusuh) diperkirakan berasal dari pelosok daerah (seperti Pulau Sumbawa).

**Tabel 3.2 -  
Perkembangan PTTB**

*Milyar Rp.*

Posisi	PTTB
<b>2001</b>	<b>398</b>
<b>2002</b>	<b>601</b>
<b>2003</b>	<b>674</b>
<b>2004</b>	<b>690</b>
Tw.I	182
Tw.II	187
Tw.III	143
Tw.IV	178
<b>2005</b>	<b>1.018</b>
Tw.I	188
Tw.II	244
Tw.III	314
Tw.IV	272
<b>y-o-y (%)</b>	<b>47,54</b>
<b>q-t-q (%)</b>	<b>(13,38)</b>

### 3.5.1.3. Uang Palsu

Jumlah uang palsu yang ditemukan atau berdasarkan laporan masyarakat dan perbankan ke Bank Indonesia Mataram selama tahun 2005 tercatat sebesar Rp48.030.000,- atau meningkat sebesar 182,36% dibandingkan tahun 2004 yang tercatat hanya sebesar Rp17.010.000,-. Modus transaksi uang palsu saat ini sudah merambah ke toko retail dan daerah yang relatif terpencil (seperti di Lunnyuk, Pulau Sumbawa). Sehingga diharapkan masyarakat terutama para kasir toko atau kasir tempat bisnis lainnya (seperti pom bensin dan pedagang di pasar tradisional) agar dapat lebih teliti dalam menerima uang sebagai alat pembayaran serta perlu memahami ciri-ciri keaslian uang rupiah dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar pelaku kejahatan dapat dilacak dengan segera. Selama tahun 2005 Bank Indonesia Mataram telah melakukan sosialisasi keaslian ciri-ciri uang rupiah sebanyak 10 kali di berbagai kota di Pulau Lombok ataupun di Pulau Sumbawa yang ditujukan kepada masyarakat luas (seperti, kasir-kasir bank, PT. POS, Pegadaian, Telkom, PLN dan

PDAM, mahasiswa/akademisi, masyarakat desa), sosialisasi juga telah dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Tingginya peredaran uang palsu, perlu diantisipasi oleh berbagai pihak termasuk masyarakat sendiri agar segera melaporkan ke pihak yang berwajib apabila menemukannya dan responsif dari aparat guna membatasi ruang gerak pelaku. Disamping itu dapat pula melibatkan unsur aparat kecamatan dalam melakukan sosialisasi keaslian uang rupiah, sehingga kantor kecamatan dapat menjadi pusat informasi keaslian uang rupiah bagi masyarakat setempat.

**Tabel 3.3 - Uang palsu yang ditemukan di Kantor Bank Indonesia Mataram**

THN	PECAHAN								JUMLAH	
	Rp.100.000		Rp. 50.000		Rp. 20.000		Rp. 10.000			
	Nominal	lbr	Nominal	Lbr	Nominal	lbr	Nominal	Lbr	Nominal	Lbr
2001	-	-	3.700.000	74	600.000	30	370.000	37	4.670.000	141
2002	300.000	3	3.100.000	62	260.000	13	110.000	11	3.770.000	89
2003	200.000	2	1.400.000	28	500.000	25	90.000	9	2.190.000	64
2004	15.900.000	159	900.000	18	180.000	9	30.000	3	17.010.000	189
2005	28.100.000	281	19.300.000	386	160.000	8	470.000	47	48.030.000	722
Tw.I	14.200.000	142	2.200.000	44	40.000	2	10.000	1	16.450.000	189
Tw.II	3.900.000	39	13.150.000	263	60.000	3	330.000	33	17.440.000	338
Tw.III	3.900.000	39	200.000	4	40.000	2	70.000	7	4.210.000	52
Tw.IV	6.100.000	61	3.750.000	75	20.000	1	60.000	6	9.930.000	143
y-o-y (%)	76,73		2.044,44		(11,11)		1.466,67		182,36	
q-t-q (%)	56,41		1.775,00		(50,00)		(14,29)		135,87	

### 3.5.2. Transaksi Keuangan Secara Non Tunai

#### 3.5.2.1. Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jumlah nominal transaksi non tunai melalui RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang bersifat seketika (masuk maupun keluar) selama tahun 2005 yang tercatat melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) Mataram, dengan nominal minimal

**Tabel 3.4 Transaksi RTGS di Kantor Bank Indonesia Mataram**

Nom. (milyar rp.)

Posisi	Transfer Send		Transfer Received		Total	
	Lbr.	Nom.	Lbr.	Nom.	Lbr.	Nom.
<b>2004</b>	<b>4.208</b>	<b>4.825</b>	<b>2.168</b>	<b>3.752</b>	<b>6.376</b>	<b>8.577</b>
Tw.I	659	1.401	486	782	1.145	2.184
Tw.II	1.092	1.070	556	1.009	1.648	2.079
Tw.III	1.087	1.006	536	954	1.623	1.960
Tw.IV	1.370	1.347	590	1.007	1.960	2.354
<b>2005</b>	<b>4.572</b>	<b>4.648</b>	<b>2.202</b>	<b>4.174</b>	<b>6.774</b>	<b>8.821</b>
Tw.I	1.027	858	551	818	1.578	1.675
Tw.II	1.110	1.061	559	1.049	1.669	2.110
Tw.III	1.228	1.100	544	1.139	1.772	2.239
Tw.IV	1.207	1.629	548	1.168	1.755	2.797
<b>y-o-y (%)</b>		<b>(3,67)</b>		<b>11,24</b>		<b>2,85</b>
<b>q-t-q (%)</b>		<b>48,09</b>		<b>2,55</b>		<b>24,92</b>

Rp100 juta per transaksi, secara total sebesar Rp8,82 triliun atau meningkat sebanyak 2,85% dibanding transaksi yang sama selama tahun 2004. Peningkatan transaksi RTGS diantaranya karena adanya aliran transaksi yang masuk dari pemerintah pusat seperti dana-dana untuk Bantuan Langsung Tunai (kompensasi BBM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dana perimbangan (DAU & DAK), tercermin dari meningkatnya transaksi yang masuk (*received*) sebesar 11,24% dibandingkan selama tahun 2004 dan sampai akhir 2005 tercatat sebesar Rp4,17 triliun, meskipun

transaksi RTGS yang keluar (*send*) tercatat sebesar Rp4,65 triliun mengalami penurunan sebesar 3,67% dibandingkan posisi yang sama selama tahun 2004, namun masih terjadi *net send* sebesar Rp474 miliar, artinya lebih banyak nominal transaksi yang keluar daripada masuk. Hal ini merupakan cerminan bahwa di daerah NTB termasuk daerah yang *spending unit* (sumber dana pihak ketiga lebih besar daripada kredit yang disalurkan).

### 3.5.2.2. Transaksi Kliring

Transaksi non tunai lainnya yang melalui kegiatan kliring selama tahun 2005 tercatat sebesar Rp3,06 triliun atau meningkat sebesar 18,51% dari tahun 2004.

Secara triwulanan terjadi peningkatan transaksi sebanyak 12,48% yang tercatat sebesar Rp883 miliar, peningkatan tersebut disebabkan adanya kegiatan *seasonal* (natal/tahun baru) di penghujung triwulan laporan. Transaksi kliring trendnya terus menunjukkan peningkatan, menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di daerah ini, disamping kesadaran para pelaku ekonomi yang menggunakan sarana giralisasi dalam kegiatan bisnisnya guna menghindari risiko.

**Tabel 3.5 -  
Data Perputaran Kliring di KBI Mataram**  
*nominal dlm milyar rp.*

Posisi	Perputaran Kliring	
	Lbr.	Nominal
<b>2001</b>	<b>139.081</b>	<b>5.150</b>
<b>2002</b>	<b>148.047</b>	<b>4.639</b>
<b>2003</b>	<b>150.099</b>	<b>2.441</b>
<b>2004</b>	<b>171.127</b>	<b>2.586</b>
Tw.I	37.258	597
Tw.II	43.116	634
Tw.III	44.235	557
Tw.IV	46.518	798
<b>2005</b>	<b>171.316</b>	<b>3.064</b>
Tw.I	39.226	673
Tw.II	40.940	723
Tw.III	45.077	785
Tw.IV	46.073	883
<b>y-o-y (%)</b>	<b>0,11</b>	<b>18,51</b>
<b>q-t-q (%)</b>	<b>2,21</b>	<b>12,48</b>

### 3.6. Rekomendasi

1. Jumlah kredit non lancar (NPL) perbankan pada triwulan mendatang diperkirakan akan meningkat, dengan :
  - a. memberlakukan analisis kelayakan kredit baru secara lebih berhati-hati terutama permintaan kredit konsumtif dan sektor tertentu yang NPLnya cenderung meningkat.
  - b. Sedapat mungkin menahan laju tingkat suku bunga kredit agar tidak menambah beban debitur melalui langkah efisiensi biaya-biaya yang tidak secara signifikan meningkatkan pendapatan, misalnya mengurangi biaya promosi yang tidak perlu.
  - c. Menggali potensi calon debitur yang bankable dan sedapat mungkin tidak melakukan penetrasi terhadap debitur yang sama, khususnya kredit kepada debitur yang bersifat konsumtif.
2. Perlu optimalisasi penagihan kredit non lancar bagi bank umum di wilayah Bima terutama kredit yang disalurkan untuk sektor konstruksi (NPL=56,46%) dimana sebagian

besarnya terkonsentrasi pada pengerjaan proyek-proyek pemerintah, antara lain dengan melakukan pendekatan terhadap pemerintah daerah, disamping itu perlu lebih selektif dan hati-hati dalam penyaluran kredit ke sektor ini.

3. Perlu adanya pemikiran bagi perbankan di wilayah Sumbawa, Dompu atau Bima untuk membentuk *cash center* guna menjamin kelancaran arus distribusi uang, disamping dapat menekan biaya distribusi, juga dapat menekan peredaran uang tidak layak edar (lusuh) di daerah tersebut ataupun menghambat peredaran uang palsu yang akhir-akhir ini terasa agak meningkat. *Cash center* tersebut nantinya akan berhubungan dengan Bank Indonesia sebagai distributor uang layak edar dan menarik uang tidak layak edar.
4. Perlunya meningkatkan sosialisasi keaslian uang rupiah dan cara penggunaannya agar tidak cepat lusuh terutama kepada masyarakat kecil, bendaharawan dinas, kecamatan/desa, dan perguruan tinggi baik melalui media massa maupun sosialisasi secara langsung oleh Bank Indonesia.

# Bab IV

## Perkembangan Keuangan Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 4.1. Anggaran & Realisasi APBD Kabupaten Sumbawa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2004	ANGGARAN 2005 SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2004	REALISASI 2005
	<b>SALDO AWAL KAS</b>	<b>23.261.003.419,83</b>			
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>25.374.858.110,00</b>	<b>24.915.091.829,00</b>	<b>19.921.611.109,00</b>	<b>15.649.582.397,00</b>
	Pajak Daerah	6.262.903.448,00	6.233.183.100,00	6.316.889.215,00	5.780.864.363,00
	Retribusi Daerah	7.442.549.800,00	5.166.955.000,00	4.579.404.385,00	4.262.293.121,00
	Bagian Laba Usaha Daerah	1.681.704.100,00	1.925.000.000,00	1.661.451.701,00	2.063.824.857,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	9.987.700.762,00	11.589.953.729,00	7.363.865.808,00	3.542.600.056,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>278.413.634.061,00</b>	<b>223.940.692.669,00</b>	<b>292.156.331.727,53</b>	<b>223.919.667.444,00</b>
	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	80.522.079.631,00	25.938.940.682,00	92.042.148.739,00	24.814.430.732,00
	Dana Alokasi Umum	184.992.000.000,00	179.554.000.000,00	184.992.000.000,48	179.553.999.996,00
	Dana Alokasi Khusus	8.600.000.000,00	12.980.000.000,00	8.600.000.000,00	12.980.000.000,00
	Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Dari Pr	4.299.554.430,00	5.467.751.987,00	6.522.182.988,05	6.571.236.716,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>16.294.989.916,00</b>	<b>10.121.270.000,00</b>	<b>16.294.989.912,00</b>	<b>10.121.270.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>320.083.482.087,00</b>	<b>258.977.054.498,00</b>	<b>328.372.932.748,53</b>	<b>249.690.519.841,00</b>
2	<b>BELANJA</b>				
2.1	<b>APARATUR DAERAH</b>	<b>102.610.861.520,00</b>	<b>99.919.065.813,00</b>	<b>95.535.736.541,00</b>	<b>84.777.855.222,00</b>
	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>83.611.517.350,00</b>	<b>81.371.508.005,00</b>	<b>78.003.337.746,00</b>	<b>68.637.372.406,00</b>
	Belanja Pegawai / Personalia	61.665.823.239,00	58.655.754.652,00	57.980.020.016,00	48.926.345.596,00
	Belanja Barang dan Jasa	11.071.485.892,00	12.398.860.707,00	9.793.294.690,00	10.951.492.850,00
	Belanja Perjalanan Dinas	7.201.488.400,00	7.190.979.800,00	6.717.502.800,00	5.802.347.700,00
	Belanja Pemeliharaan	3.672.719.819,00	3.125.912.846,00	3.512.520.240,00	2.957.186.260,00
	<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>	<b>14.349.356.220,00</b>	<b>12.778.260.392,00</b>	<b>13.027.985.675,00</b>	<b>10.797.049.381,00</b>
	Belanja Pegawai / Personalia	2.682.386.600,00	2.072.239.890,00	2.339.875.245,00	1.209.655.092,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.856.365.790,00	7.769.421.402,00	7.113.770.230,00	6.856.424.989,00
	Belanja Perjalanan Dinas	3.497.487.600,00	2.507.537.800,00	3.275.654.200,00	2.311.137.600,00
	Belanja Pemeliharaan	313.116.230,00	429.061.300,00	298.686.000,00	419.831.700,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.649.987.950,00</b>	<b>5.769.297.416,00</b>	<b>4.504.413.120,00</b>	<b>5.343.433.435,00</b>
2.2	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>169.865.030.413,00</b>	<b>151.919.135.531,00</b>	<b>161.091.436.346,00</b>	<b>136.695.891.039,00</b>
	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	<b>105.692.388.375,00</b>	<b>101.189.083.349,00</b>	<b>104.312.119.146,00</b>	<b>93.421.286.002,00</b>
	Belanja Pegawai / Personalia	99.384.254.794,00	91.498.028.297,00	98.395.071.280,00	83.814.454.702,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.500.375.081,00	7.816.176.982,00	4.202.355.956,00	7.808.749.710,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.091.500.000,00	1.062.185.100,00	1.016.277.000,00	1.024.685.100,00
	Belanja Pemeliharaan	716.258.500,00	812.692.970,00	698.414.910,00	773.396.490,00
	<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>	<b>40.067.022.645,00</b>	<b>24.325.997.358,00</b>	<b>37.437.448.438,00</b>	<b>20.242.302.432,00</b>
	Belanja Pegawai / Personalia	8.710.972.900,00	3.195.314.700,00	7.878.036.775,00	2.789.927.692,00
	Belanja Barang dan Jasa	20.393.766.352,00	11.984.617.758,00	18.939.695.718,00	8.898.752.543,00
	Belanja Perjalanan Dinas	3.808.096.600,00	3.056.593.400,00	3.560.672.000,00	2.927.394.200,00
	Belanja Pemeliharaan	7.154.186.793,00	6.089.471.500,00	7.059.043.945,00	5.626.227.997,00
	<b>Belanja Modal</b>	<b>24.105.619.393,00</b>	<b>26.404.054.824,00</b>	<b>19.341.868.762,00</b>	<b>23.032.302.605,00</b>
2.3	<b>BELANJA BAGI HASIL &amp; BANTUAN KEUANG</b>	<b>49.388.608.565,00</b>	<b>25.262.552.950,00</b>	<b>47.998.834.925,00</b>	<b>24.535.890.203,00</b>
2.4	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>	<b>1.824.780.431,30</b>	<b>2.575.679.094,83</b>	<b>856.816.200,00</b>	<b>837.772.550,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>323.689.280.929,30</b>	<b>279.676.433.388,83</b>	<b>305.482.824.012,00</b>	<b>246.847.409.014,00</b>
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(3.605.798.842,30)</b>	<b>(20.699.378.890,83)</b>	<b>22.890.108.736,53</b>	<b>2.843.110.827,00</b>



Tabel 4.2. Pertumbuhan, pencapaian & alokasi APBD Kabupaten Sumbawa

NO	URAIAN	SELISIH ANGGARAN 2005 THD 2004 (%)	SELISIH REALISASI 2005 THD 2004 (%)	PENCAPAIAN REALISASI 2004 (%)	PENCAPAIAN REALISASI 2005 (%)	%ALOKASI ANGGARAN 2004	%ALOKASI ANGGARAN 2005	%ALOKASI REALISASI 2004	% ALOKASI REALISASI 2005
1	<b>SALDO AWAL KAS</b>								
1.1	<b>PENDAPATAN</b>								
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	-1,81	-21,44	78,51	62,81	7,93	9,62	6,07	6,27
	Pajak Daerah	-0,47	-8,49	100,86	92,74	1,96	2,41	1,92	2,32
	Retribusi Daerah	-30,58	-6,92	61,53	82,49	2,33	2,00	1,39	1,71
	Bagian Laba Usaha Daerah	14,47	24,22	98,80	107,21	0,53	0,74	0,51	0,83
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	16,04	-51,89	73,73	30,57	3,12	4,48	2,24	1,42
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	-19,57	-23,36	104,94	99,99	86,98	86,47	88,97	89,68
	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	-67,79	-73,04	114,31	95,66	25,16	10,02	28,03	9,94
	Dana Alokasi Umum	-2,94	-2,94	100,00	100,00	57,79	69,33	56,34	71,91
	Dana Alokasi Khusus	50,93	50,93	100,00	100,00	2,69	5,01	2,62	5,20
	Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan	27,17	0,75	151,69	120,18	1,34	2,11	1,99	2,63
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	-37,89	-37,89	100,00	100,00	5,09	3,91	4,96	4,05
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-19,09	-23,96	102,59	96,41	100,00	100,00	100,00	100,00
2	<b>BELANJA</b>								
2.1	<b>APARATUR DAERAH</b>	-2,62	-11,26	93,10	84,85	31,70	35,73	31,27	34,34
	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	-2,68	-12,01	93,29	84,35	25,83	29,09	25,53	27,81
	Belanja Pegawai / Personalia	-4,88	-15,62	94,02	83,41	19,05	20,97	18,98	19,82
	Belanja Barang dan Jasa	11,99	11,83	88,46	88,33	3,42	4,43	3,21	4,44
	Belanja Perjalanan Dinas	-0,15	-13,62	93,28	80,69	2,22	2,57	2,20	2,35
	Belanja Pemeliharaan	-14,89	-15,81	95,64	94,60	1,13	1,12	1,15	1,20
	<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>	-10,95	-17,12	90,79	84,50	4,43	4,57	4,26	4,37
	Belanja Pegawai / Personalia	-22,75	-48,30	87,23	58,37	0,83	0,74	0,77	0,49
	Belanja Barang dan Jasa	-1,11	-3,62	90,55	88,25	2,43	2,78	2,33	2,78
	Belanja Perjalanan Dinas	-28,30	-29,45	93,66	92,17	1,08	0,90	1,07	0,94
	Belanja Pemeliharaan	37,03	40,56	95,39	97,85	0,10	0,15	0,10	0,17
	<b>Belanja Modal</b>	24,07	18,63	96,87	92,62	1,44	2,06	1,47	2,16
2.2	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>	-10,56	-15,14	94,83	89,98	52,48	54,32	52,73	55,38
	<b>Belanja Administrasi Umum</b>	-4,26	-10,44	98,69	92,32	32,65	36,18	34,15	37,85
	Belanja Pegawai / Personalia	-7,94	-14,82	99,00	91,60	30,70	32,72	32,21	33,95
	Belanja Barang dan Jasa	73,68	85,82	93,38	99,90	1,39	2,79	1,38	3,16
	Belanja Perjalanan Dinas	-2,69	0,83	93,11	96,47	0,34	0,38	0,33	0,42
	Belanja Pemeliharaan	13,46	10,74	97,51	95,16	0,22	0,29	0,23	0,31
	<b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>	-39,29	-45,93	93,44	83,21	12,38	8,70	12,26	8,20
	Belanja Pegawai / Personalia	-63,32	-64,59	90,44	87,31	2,69	1,14	2,58	1,13
	Belanja Barang dan Jasa	-41,23	-53,02	92,87	74,25	6,30	4,29	6,20	3,60
	Belanja Perjalanan Dinas	-19,73	-17,79	93,50	95,77	1,18	1,09	1,17	1,19
	Belanja Pemeliharaan	-14,88	-20,30	98,67	92,39	2,21	2,18	2,31	2,28
	<b>Belanja Modal</b>	9,53	19,08	80,24	87,23	7,45	9,44	6,33	9,33
2.3	<b>BELANJA BAGI HASIL &amp; BANTUAN K</b>	-48,85	-48,88	97,19	97,12	15,26	9,03	15,71	9,94
2.4	<b>BELANJA TIDAK TERSANGKA</b>	41,15	-2,22	46,95	32,53	0,56	0,92	0,28	0,34
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	-13,60	-19,19	94,38	88,26	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	474,06	-87,58	-634,81	-13,74				

Dalam bab ini yang dibahas hanya data keuangan daerah yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, sedangkan data keuangan dari daerah lainnya, hingga tulisan ini dibuat belum tersedia.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan anggaran pendapatan sebesar 19,09% pada struktur APBD Kabupaten Sumbawa pada tahun 2005 dibandingkan tahun 2004. Sumber penurunan anggaran pendapatan terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu sub “bagi hasil pajak dan bukan pajak” yang mencapai sebesar 67,79%, disusul “pendapatan lain-lain yang dianggap sah” sebesar 37,89% dan sub “retribusi daerah” PAD sebesar 30,58%. Penurunan anggaran penerimaan



tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan royalti dari PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT), karena terjadinya pemekaran Kabupaten Sumbawa menjadi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Disisi lain keberadaan PT.NNT terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga kabupaten baru tersebut memperoleh bagian yang lebih besar daripada Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut berimbas pula pada penurunan anggaran belanjanya yang secara total mencapai angka sebesar 13,60% dan berdampak terhadap penurunan pengeluaran belanja publik pada sub belanja operasi dan pemeliharaan sebesar 39,29%. Secara umum ketergantungan daerah ini pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat masih terasa cukup tinggi dengan porsi sebesar 88,97% dan 89,68% masing-masing pada tahun 2004 dan 2005 dari total anggaran pendapatan. Begitu pula halnya dengan perbandingan antara realisasi APBD 2005 terhadap 2004, dimana jumlah pendapatan menurun sebesar 23,96% dan belanja sebesar 19,19%.

Realisasi/pencapaian anggaran tahun 2004 untuk pendapatan tercatat mencapai angka sebesar 102,59% sedangkan anggaran belanja hanya sebesar 94,38%. Pada tahun 2005, anggaran pendapatan yang terealisasi hanya sebesar 96,41% sementara anggaran belanja tercapai sebesar 88,26%. Sehingga pada tahun 2004 maupun 2005 masih terjadi surplus anggaran yang dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.

Sementara itu, alokasi Jumlah belanja pelayanan publik meskipun secara nominal terjadi penurunan namun secara persentase terjadi peningkatan sebesar 2,65% yaitu dari 52,73% pada tahun 2004 menjadi 55,38% tahun 2005. Sumber peningkatan tersebut terutama berasal dari sub item "belanja administrasi umum" yang meningkat sebesar 3,7% (dari 34,15% menjadi 37,85%), namun sub "belanja operasi dan pemeliharaan" justru menurun persentasenya sebesar 4,06% (dari 12,26% menjadi 8,20%). Sedangkan porsi pada sub "belanja modal" terjadi peningkatan baik secara nominal (19,08%) maupun secara persentase (3%). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah belum mampu memberikan stimulus bagi belanja pelayanan publik. Dampaknya terlihat dari perkembangan daerah yang relatif tidak banyak mengalami perubahan yang meningkat. Sektor swasta lebih banyak didorong oleh pembiayaan sendiri dan perbankan. Peningkatan mutu/kualitas hidup rakyat menjadi terbatas dengan kemampuan fiskal yang dimiliki daerah ini. Ditambah lagi dengan porsi belanja modal yang sangat kecil (2004 sebesar 6,33% dan 2005 sebesar 9,33%) dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat belum maksimal, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang terkait dengan pemicu pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat (misalnya kondisi jalan yang cukup memprihatinkan dan terbatasnya sarana kelistrikan). Untuk itu, prioritas porsi belanja modal perlu mendapat perhatian baik dari kalangan pemerintah maupun legislatif untuk membantu sektor swasta/riil dapat berkembang secara baik, agar secara signifikan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta perlahan-lahan dapat membantu mengurangi ketergantungan daerah ini pada pemerintah pusat.

# BAB V

## PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INFLASI REGIONAL

### 1. Prospek Makro Ekonomi Regional (*Economic Outlook*)

Kondisi kegiatan perekonomian di NTB pada triwulan mendatang diperkirakan masih akan mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha, dimana diprediksikan bahwa akan terjadi kembali penurunan kegiatan usaha dengan SBT-27,23%. Indikasi penurunan perkiraan kegiatan usaha tercermin dari ekspektasi negatif terhadap volume permintaan / pesanan / kontrak, nilai penjualan/pendapatan, persediaan hasil pertanian dan ekspektasi penggunaan tenaga kerja. Pada triwulan ini terdapat empat sektor yang mengindikasikan penurunan kegiatan usaha yaitu sektor jasa-jasa (SBT -7,63 %) disusul sektor pertanian (SBT -3,84 %), sektor pertambangan & penggalian (SBT -2,97 %) dan sektor listrik, gas & air bersih. Sedangkan sektor lainnya diprediksi mengalami peningkatan.

Pada sektor jasa-jasa, berdasarkan hasil survei, terjadinya penurunan permintaan terhadap produk dari sektor ini dan naiknya rata-rata harga/tarif merupakan indikator yang membatasi peningkatan kegiatan usaha pada sektor ini. Kenaikan harga/tarif ini masih disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional perusahaan. Hal ini berkaitan dengan masih berlangsungnya penyesuaian harga/tarif akibat kenaikan harga BBM. Sementara itu sektor pertanian juga diperkirakan akan kembali mengalami penurunan kegiatan usaha yang lebih besar, diindikasikan dari penurunan pada hampir seluruh subsektornya kecuali sektor peternakan. Faktor yang mendorong indikasi ini adalah menurunnya produksi dan persediaan hasil panen, terkait dengan faktor *seasonal* dimana pada triwulan I masih merupakan musim tanam dan perkiraan cuaca yang kurang baik. Sektor yang diperkirakan cenderung akan stabil adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air bersih. Namun demikian, terdapat kemungkinan terjadi penurunan sehubungan dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik.

Meskipun beberapa sektor diperkirakan akan mengalami penurunan kegiatan usaha, namun beberapa faktor seperti adanya rencana proyek pembangunan bandara internasional di Lombok Tengah, perbaikan jalan di sebelah utara Pulau Sumbawa, rencana pembangunan Rumah Sakit dan sarana pendidikan di Lombok Tengah, pembangunan bendungan Pandanduri di Lotim, pembangunan di sektor kelistrikan di Lombok dan Sumbawa serta BLT yang terus berlanjut hingga tahun 2006 diharapkan akan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun 2006. Sementara itu, prospek pertumbuhan ekonomi

pada triwulan mendatang diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan semula karena adanya bencana banjir yang menyebabkan berbagai kerusakan prasarana fisik dan tergenangnya areal penanaman padi di beberapa daerah meskipun tidak terlalu signifikan, sehingga angka pertumbuhan ekonomi (q-t-q) pada triwulan I-2006 diprediksikan akan minus/negatif, meskipun secara y-o-y masih ada kemungkinan positif, tetapi dalam kisaran angka maksimum 3%. Ditinjau dari aspek penyaluran kredit perbankan, pertumbuhan penyaluran kredit yang disalurkan kepada sektor riil terutama dipengaruhi oleh perubahan arah kebijakan pemberian kredit dari konsumtif ke modal kerja, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, apalagi sejak setahun terakhir, terdapat kecenderungan adanya pergeseran kredit yang disalurkan oleh perbankan NTB dari konsumsi kepada kredit modal kerja dan investasi. Sementara itu, jumlah *remittance* TKI diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2005.

## 2. Prospek Inflasi

Prediksi inflasi dapat dicermati dari arah kecenderungan pergerakan angka inflasi yang trendnya menunjukkan penurunan sejak akhir tahun 2005, setelah terus mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2005 dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dan November 2005.

Laju inflasi pada awal triwulan I-2006 diperkirakan akan mengalami perlambatan. Meskipun melambat, angka inflasi masih akan cukup tinggi sebagai dampak dari *second round inflation* akibat kenaikan harga BBM yang sangat tinggi dan berlangsung dalam 2 tahap pada tahun 2005 sehingga memiliki dampak berantai cukup panjang dan belum dapat diatasi dalam kurun waktu singkat. Inflasi yang cukup tinggi masih akan terjadi pada beberapa sektor, terutama sektor makanan jadi, sektor perumahan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Perkiraan Masih tingginya perkiraan laju inflasi pada triwulan mendatang dipengaruhi oleh rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik. Sebagai salah satu sasaran operasional yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar yang akan berpengaruh terhadap angka inflasi, BI rate pada triwulan I-2006 diperkirakan masih tetap dipertahankan pada angka yang relatif tinggi hingga triwulan II-2006.

Secara tahunan (y-o-y), angka inflasi Kota Mataram pada triwulan I-2006 diperkirakan masih akan tinggi dan akan berkisar pada angka 16%-18% dan secara triwulanan (q-t-q) akan berada diantara 2%-3%. Prediksi tersebut kemungkinan akan terjadi dengan asumsi iklim/cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan resiko pengiriman barang menjadi tinggi dan *supply*-nya agak terhambat. Selain itu, tidak ada kenaikan harga BBM lanjutan, faktor musiman bersifat normal dan tidak ada faktor eksternal lainnya yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian NTB.